



Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga, M. Eng., IPU.

Salah satu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dalam menentukan arah masa depan yang kita tuju ialah siapakah kita ini. Kata 'siapa' merujuk kepada akar budaya yang menjelaskan nilai-nilai dasar yang kita miliki yang potensial kita gunakan dan kembangkan agar kita tidak tersesat dalam persaingan yang bersifat multi dimensi dan multi nilai. Bagi kita suku bangsa Karo; buku Hubungan Kerajaan Aru dan Peradaban Karo yang diterbitkan melalui kerjasama USU dan Karo Foundation menjawab pertanyaan di atas dengan jelas. Kita bersyukur atas terbitnya buku ini agar kita semua terutama generasi muda semakin mudah memahami nilai budaya leluhur yang masih relevan dan kokoh untuk dijadikan fondasi kehidupan dalam menghadapi persaingan yang penuh komplikasi ini.



Lom Lom Suwondo, S.S - Wakil Bupati Deliserdang

Kerajaan Haru (Aru) dan peradaban Karo memiliki hubungan yang sangat erat baik secara budaya, wilayah, maupun sejarah. Haru yang pernah berjaya di pesisir Sumatra Timur diketahui memiliki unsur kuat dari masyarakat Karo, meskipun bersifat multi-etnis dan kosmopolit. Ketika Haru melemah akibat tekanan Aceh pada abad ke-16, sebagian penduduknya bergerak ke pedalaman dan turut membentuk identitas serta sistem sosial masyarakat Karo. Karena itu, Haru bukan sepenuhnya "kerajaan Karo", tetapi peradaban Karo merupakan salah satu fondasi penting dalam pembentukan Haru dan warisannya masih terasa dalam budaya Karo hingga kini.

Kami berterimakasih atas Upaya menggali data Haru, Karo dan Peradabannya serta menjadikannya sebuah buku. Sebuah Upaya yang tidak mudah mengingat minimnya data Haru yang beragam versi yang masih perlu ditelusuri keabsahannya. Pelan tapi pasti data data semakin tersingkap tersajikan kepermukaan. Mudah mudahan melalui buku ini menambah pengetahuan baru tentang Aru, Karo dan peradabannya.

Terimakasih kami haturkan kepada semua penulis didalam penyusunan *Book Chapter* ini, serta seluruh pihak yang terkait didalamnya. Semoga data yang tersaji dapat menjadi acuan riset yang lanjutan bagi peneliti lainnya.



Ir. Analgin Ginting, M. Min - Sekretaris Umum Karo Foundation

Buku ini merupakan hasil berharga dari simposium yang diselenggarakan pada Mei 2025, diperkaya dengan tulisan para dosen FIB USU dan anggota Karo Foundation. Tujuan penerbitan buku ini sederhana namun mulia — agar gema simposium tentang Hubungan Kerajaan Aru dan Peradaban Karo terus bergema, meneguhkan pijakan akademis bahwa Kerajaan Aru adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas Suku Karo. Mari kita baca, pahami, dan jadikan buku ini inspirasi untuk memperkuat kesadaran sejarah serta kebanggaan budaya kita.



QRCBN: 62-2937-3867-807

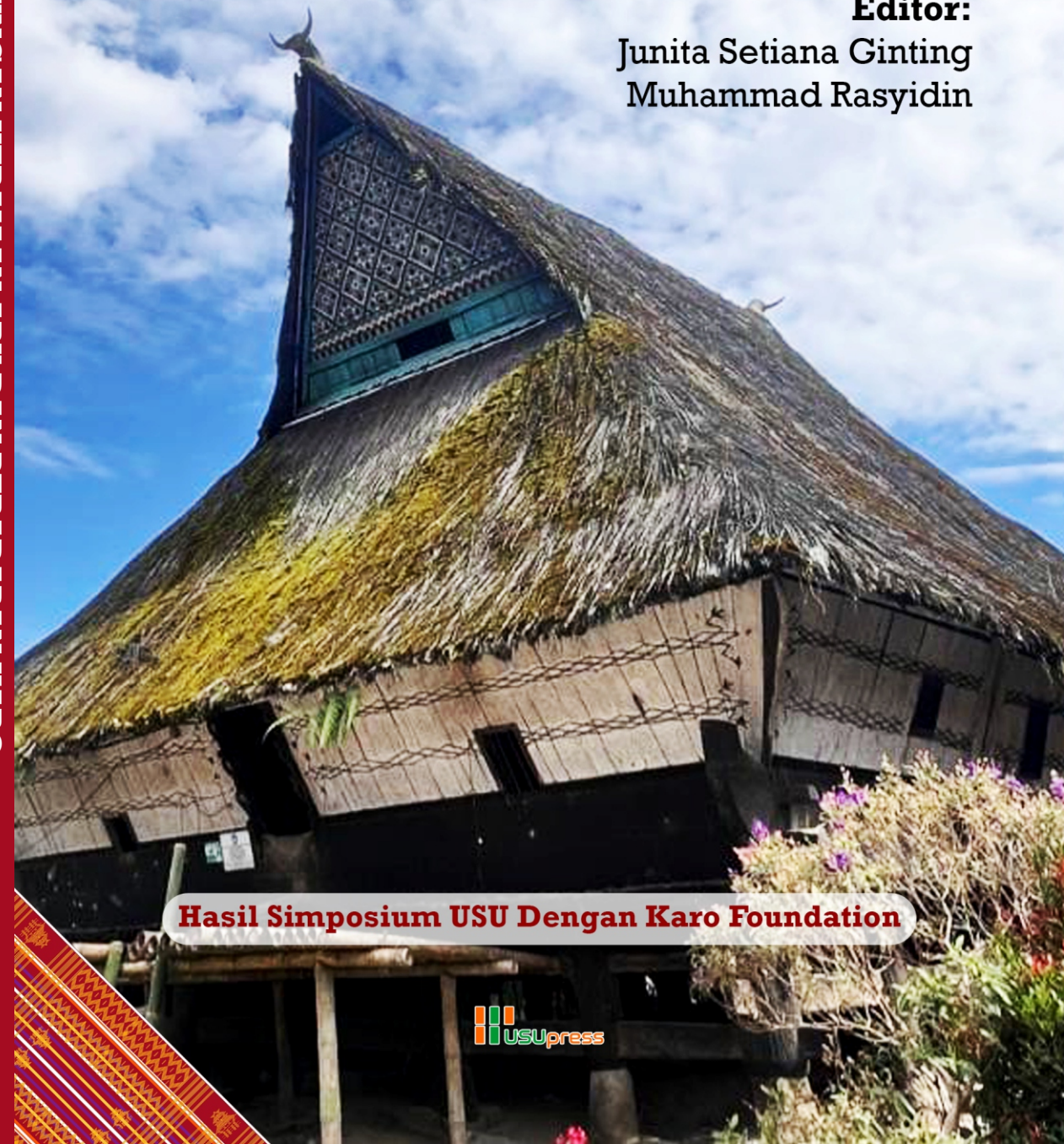


HUBUNGAN KERAJAAN ARU DAN PERADABAN KARO

Editor:

Junita Setiana Ginting
Muhammad Rasyidin

HUBUNGAN KERAJAAN ARU DAN PERADABAN KARO



Hasil Simposium USU Dengan Karo Foundation



HUBUNGAN KERAJAAN ARU DAN PERADABAN KARO

Editor:

Junita Setiana Ginting

Muhammad Rasyidin

Disampaikan pada Simposium Nasional “*Hubungan Kerajaan Aru dengan Peradaban Karo*” yang diselenggarakan atas kerjasama Program Studi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara dengan karo Foundation pada tanggal 08 Mei 2025.

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

QRCBN : 62-2937-3867-807

Hubungan Kerajaan Aru dan Peradaban Karo/Editor: Junita
Setiana Ginting; Muhammad Rasyidin – Medan: USU Press
2025

viii, 122 p; illus : 25 cm

Bibliografi

QRCBN : 62-2937-3867-807

Dicetak di Medan, Indonesia

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehubungan dengan *book chapter* yang berjudul “*Hubungan Kerajaan Aru dan Peradaban Karo*” ini telah diselesaikan. Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan yang terdiri dari lima tulisan utama yang membahas tentang hubungan antara Kerajaan Aru dengan Peradaban Karo. Makalah tersebut telah dipresentasikan pada kegiatan Simposium Nasional, kelima tulisan ini memberikan pemahaman yang diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang hubungan Kerajaan Aru dengan Peradaban Karo. Kelima makalah tersebut ditulis dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu, seperti pendekatan sejarah, arkeologi, dan antropologi. Selain itu, terdapat empat tulisan tambahan yang membahas tentang masyarakat Karo dari sudut pandang budayanya.

Buku ini tentu masih belum sempurna dan memiliki keterbatasan. Namun besar harapan dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat untuk menambah khazanah tulisan tentang hubungan antara Kerajaan Aru dengan Peradaban Karo serta nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Etnis Karo.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan berupa moril dan materil kami sampaikan kepada Karo Foundation, demikian juga kepada Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya USU, Program Studi S1 Ilmu Sejarah FIB USU serta semua pihak yang telah mendukung terlaksana kegiatan ini.

Salam Hormat

Editor

Kata Sambutan

Ketua Umum Karo Foundation



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan anugerah-Nya, simposium ilmiah bertema “Hubungan Kerajaan Aru dengan Budaya Karo” yang dilaksanakan atas kerja sama antara Universitas Sumatera Utara (USU) dengan Karo Foundation telah berlangsung dengan sangat baik dan menghasilkan karya akademik yang berharga. Atas nama Karo Foundation, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara, para dosen, peneliti, dan pemakalah dari Medan, Jakarta, dan Malaysia, yang dengan semangat ilmiah dan kecintaan pada sejarah telah memberikan sumbangan pemikiran yang luar biasa.

Simposium ini bukan sekadar forum ilmiah, melainkan juga gerakan kebudayaan dan intelektual untuk menelusuri kembali akar peradaban dan jati diri bangsa, khususnya bagi masyarakat Karo dan Sumatera Utara. Upaya menemukan keterkaitan antara Kerajaan Aru dengan peradaban dan kebudayaan Karo bukan hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan identitas dan kebanggaan kultural yang berakar pada fakta ilmiah dan penelitian akademis.

Saya menyambut dengan gembira penerbitan Book Chapter ini sebagai buah intelektual dari simposium tersebut. Buku ini merupakan bukti nyata bahwa dialog antara akademisi, peneliti, dan masyarakat dapat menghasilkan karya bersama yang bernilai tinggi. Harapan saya, buku ini tidak hanya menjadi bacaan para ahli sejarah dan antropologi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Karo untuk mengenal asal usul, memahami kebudayaan sendiri, dan mengembangkan rasa cinta terhadap warisan leluhur.

Sebagaimana diuraikan para penulis, hubungan antara Kerajaan Aru dan masyarakat Karo bukanlah mitos, tetapi memiliki dasar historis dan arkeologis yang kuat. Kajian ini memperlihatkan

bahwa Karo merupakan bagian penting dari dinamika peradaban di pesisir timur Sumatera dan Selat Malaka. Melalui pemahaman sejarah yang benar, kita akan semakin menyadari betapa besar kontribusi leluhur Karo terhadap peradaban Nusantara. Dengan demikian, penghargaan terhadap budaya lokal bukan hanya bentuk kebanggaan etnis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga bangsa Indonesia untuk menjaga dan melestarikan keragaman budaya nasional.

Kepada generasi muda Karo, saya berpesan: bacalah buku ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. Di dalamnya terdapat pengetahuan, inspirasi, dan kebanggaan yang dapat meneguhkan identitas kalian sebagai pewaris kebudayaan besar. Jadikan warisan ini sebagai fondasi untuk melangkah maju di tengah dunia modern, tanpa kehilangan akar dan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, para peneliti dan penulis book chapter, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya simposium dan penerbitan buku ini. Semoga kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat seperti Karo Foundation dapat terus dilanjutkan dalam penelitian-penelitian berikutnya untuk menggali sejarah, budaya, dan potensi masyarakat Karo secara lebih luas dan mendalam.

Dengan penuh rasa hormat, saya berharap Book Chapter ini dapat menjadi referensi ilmiah, sumber inspirasi, dan sarana edukatif bagi siapa pun yang ingin memahami perjalanan panjang hubungan Kerajaan Aru dengan kebudayaan Karo, serta menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan peradaban bangsa yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

Jakarta, 6 Oktober 2025

Hormat saya,

Letjen TNI (Purn) Musa Bangun
Ketua Umum Karo Foundation

Kata Sambutan

Dekan



Dengan bangga saya memperkenalkan terbitnya Book Chapter berjudul Hubungan Kerajaan Aru dan Peradaban Karo, sebuah karya yang dihasilkan oleh para Akademisi dan peneliti dari dalam dan luar negeri.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian mendalam dan kolaborasi yang kuat, mencerminkan komitmen dalam mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya lokal.

Buku ini tidak saja mengayakan literatur tetapi juga menambah khazanah literatur tentang sejarah dan peradaban di Sumatera Utara.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghargai dan mempromosikan kekayaan budaya Masyarakat Karo dan Kerajaan Aru.

Inilah bukti kontribusi akademik yang menunjukkan dedikasi Fakultas Ilmu Budaya USU terhadap penelitian dan diseminasi ilmu pengetahuan.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada semua penulis dan pihak yang terlibat dalam penyusunan Book Chapter ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat akademis, peneliti, dan semua pihak yang tertarik dengan sejarah dan budaya Indonesia.

Besar harapan buku ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lanjut dan semoga dapat meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya kita.

Dekan

Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Sumatera Utara

Daftar isi

Kata Pengantar.....	iii
Kata Sambutan Ketua Umum Karo Foundation.....	iv
Kata Sambutan Dekan	vi
Daftar Isi	vii

Bagian I

Sejarah Aru dan Hubungannya dengan Karo?.....	1
Erond L. Damanik	

Bagian II

Penelitian Sejarah berbasis Pendekatan Arkeologi (Hubungan antara Aru dan Karo)	14
Mokhtar Saidin	

Bagian III

Kota Rantang dan Hubungannya dengan Kerajaan Aru: Analisis Awal Kerajaan Aru	23
Suprayitno	

Bagian IV

Relasi Kerajaan Aru dengan Karo dari Perspektif Budaya	30
Julianus Limbeng	

Bagian V

Kerajaan H(Aru) dan Keterkaitan dengan Peradaban Karo.....	48
Martin L. Peranginangin	

Bagian VI

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Budaya Runggu pada Etnis Karo, Sumatera Utara.....	56
Junita Setiana Ginting, Edi Sumarno, M. Aziz Rizky Lubis, dan Penina Simanjuntak	

Bagian VII

Kolaborasi Multihelix dalam Menghadapi Risiko Bencana di Tanah Karo	69
Ernalem Bangun	

Bagian VIII

Kekuasaan dalam Masyarakat Karo: Perspektif Adat dan Kekerabatan <i>Power in Karo Society: Customary and Kinship Perspectives</i>	81
Lila Pelita Hati, Lestari Dara Cinta Utami Ginting, dan Liandra Khairunnisa	

Bagian IX

Kebudayaan Musikal Masyarakat Karo	103
Yoe Anto Ginting, Hubari Gulo	

Biografi Editor	117
Biografi Penulis	118

Bagian I

Sejarah Aru dan Hubungannya dengan Karo?

Erond L. Damanik¹

¹Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

Pendahuluan

Pada sebagian sumber, “Aru” ditulis inkonsisten; “(D)Aru,” “(H)Aru” atau “(A)aru” dan pada makalah ini lebih mengikuti “Aru,” yang bagi banyak penulis diyakini adalah populasi serupa. Entitas politik tersebut memiliki organisasi tradisional berpola “kepala pemimpin” (*chiefdom*) yang berdiri antara abad 13-16 di pantai timur Sumatra bagian utara. Kepemimpinan formal dikendalikan seseorang atau sekelompok elit yang sah untuk menyatukan seluruh entitas pada suatu kawasan teritorial untuk mengendalikan produksi dan jalur distribusi. Sebagai struktur kekuasaan politik pada organisasi masyarakat tradisional, *chiefdom* adalah evolusi kepemimpinan yang melembaga untuk mengendalikan suatu entitas politik yaitu kelompok etnik (*ethnic group*) (Balandier, 1967).

Entitas politik bernama “Aru” memunculkan polemik setidaknya menyangkut tiga poin mendasar; (1) pendahulu populasi pada entitas Karo atau Melayu, (2) keletakan entitas di Teluk Aru, Delitua, Kota Tjina, atau Barumun, dan (3) *origins chiefdom* pada entitas politik yang mengenal konsepsi bangsawan tradisional, “*sibayak*” di Karo dan “*kesultanan*” di Melayu. Para penulis mengajukan beragam asumsi, khususnya yang berasal dari Karo ataupun Melayu.

Tulisan ini, berdasar telaah-telaah kepustakaan menawarkan dua asumsi paling masuk akal; (1) etimologis “Aru, Aaru, Daru, ataupun Haru” meskipun penulisan inkonsisten sepanjang abad 14-17 lebih dekat dengan “Karau” atau “Caraw” berdasar penulis

pada awal abad ke-19 yang sebetulnya adalah entitas Karo, dan (2) *ethnic cleavages* yakni pembelahan etnik yang terjadi sepanjang kolonialisme di timur laut Sumatra Utara, “batak” di “Karo Gugung” (*hinterland*), dan “Karo Jehe” (*lowland*) (Perret, 2010; Damanik, 2019). Aru di dataran rendah Deli, dengan demikian tidak bisa dilepaskan dari fenomena etnisitas selama periode kolonialisme.

Sumber awal dan kesudahannya

Sepanjang yang dapat dilacak, referensi pertama yang mencatat Aru, Aaru, Daru, atau Haru, berasal dari dinasti Yuan pada abad ke-13 (Wolters, 1977). Merujuk sumber Tiongkok terutama perjalanan admiral *Zheng He* (Cheng Ho) pada awal hingga menjelang pertengahan Abad ke-15, tercatat tiga kali kunjungan ke Aru pada 1413-1415, 1421-1422, dan 1431-1433 (Mills, 1970; Groeneveltd, 2009). Berdasar sumber itu, lokasi entitas Aru dilukiskan sebagai berikut:

“Apabila dari Malaka, kapal akan tiba di Kerajaan Aru setelah berlayar 4 hari 4 malam di bawah angin buritan. Di situ terdapat sebuah pelabuhan yang berair tawar. Di sebelah barat kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Pasai sementara di selatan dan utara terdapat gunung yang tinggi dan luas. Bagian timur merupakan tanah datar yang dipakai orang Aru sebagai ladang untuk menanam padi. Berasnya kecil dan halus...hasil buminya yang utama adalah kemenyan.”

Lokasi entitas Aru, merujuk sumber Tiongkok pada pertengahan abad ke-15 memiliki persamaan dengan sumber Eropa pada awal abad ke-16. Misalnya, “*Suma Oriental*,” yang didasarkan pada catatan Tome Pires menyebut “Aru” atau “(D)aru” salah satu diantara 19 entitas politik yang dikunjunginya pada 1515. Entitas ini dikatakan terletak diantara “Pase” (Samudra Pasai) dan “Delley” (Deli):

“...one side by the kingdom of Pase and on the other by the kingdom of Aru Daru)...He is a Moorish knight...wherefore they say he is very rich”[...satu sisi oleh Kerajaan Pase dan di sisi lain oleh Kerajaan Aru (Daru)...Dia adalah seorang ksatria Moor...karena itu mereka mengatakan dia sangat kaya] (Cortesao, 1976).

Dipastikan bahwa berdasar sumber-sumber itu, Aru” adalah entitas politik yang terletak di pantai timur Sumatra bagian utara. Menjelang paruh kedua abad ke-16, sumber lain mencatat lokasi yang tidak jauh berbeda dengan Tome Pires, namun lebih spesifik. Merujuk sumber Portugis dalam “*Peregrinacao*” (petualangan atau perjalanan), Fernao Mendez Pinto pada 1539 menyebut bahwa entitas “Aaru” berdekatan dengan sungai “*Puneticao*” (Viale, 1991; Cogan, 2020; The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2024) yang besar kemungkinan sungai dimaksud adalah *Lau Patani*. Bila merujuk catatan Barbosa, entitas Aru mencirikan populasi pagan dan antropopagi (Dames, 1921).

Sebagai catatan, “pagan” dan “antropopagi” adalah dua karakter yang banyak dilekatkan para penulis awal untuk menggambarkan entitas ataupun komunitas yang bermukim di pedalaman (yang sebetulnya samasekali tidak pernah dikunjungi) melainkan diperoleh berdasar informan lokal di pesisir pantai. Di Sumatra bagian utara, catatan mula-mula yang menggambarkan adanya entitas antropopagi atau kanibalisme bersumber dari Marco Polo (1958) yang didasarkan pada perjalanannya bertahun 1290-an di Pulau Sabang. Penjelajah tersebut jelas mencatat “*Bate, Batta* atau *Batech*” sebagai entitas kanibal yang bermukim di pedalaman Sabang. Jelas, Marco Polo tidak pernah melihatnya, melainkan memperoleh informasi dari masyarakat yang ditemuinya di pesisir ketika melakukan transaksi dagang. Pada umumnya, kedua citra itu, baik pagan ataupun antropopagi (kanibal) dilekatkan pada entitas penganut kepercayaan tradisional (Hirouse, 2009; Damanik, 2017).

Sayangnya, selama kolonialisme, kedua citra itu terus dilekatkan pada pemukim di pegunungan, “Batak” (*Batta, Batech, Bata*, ataupun *Battak*) yang masih berpegangan pada keyakinan tradisional, dan “Melayu” bagi pemukim yang menganut agama samawi di pesisir (Perret, 2010; Damanik, 2017; 2018). Itulah sebabnya, keletakan atau lokasi “entitas Batak” yang berubah-ubah sebelum akhirnya terkonsentrasi disekitar Danau Toba (Reid (2009). Pada 1290-an terletak di Sabang, lalu pindah ke pantai timur Sumatra seperti dicatat Pires pada 1515, dan pindah lagi ke *Panaju* (kemungkinan besar adalah Panai) di pantai barat seperti

dicatat Pinto pada 1539, dan akhirnya terkonsentrasi disekitar Danau Toba sejak 1925 seperti tergambar dalam peta etnik yang dibuat saat itu (Collet, 1925).

Merujuk sumber Inggris berdasar misi ke pantai timur Sumatra pada 1823, Anderson (1976) mencatat lokasi Kerajaan Aru di “Delli Tuah” (*old Delli*) atau Delitua yang memiliki putri terkenal perkasa, *Rajah Putri Iju* atau Putri Hijau.

*“At Delli Tuah, or Old Delli, there are the remains of an old fort, with large square stones, the walls thirty feet in height, and two 179 hundred fathoms in circumference. **Rajah Putri Iju**, the celebrated princess, is stated to have built it”* [Di Delli Tuah atau Delli Tua, terdapat sisa-sisa benteng tua, dengan batu-batu persegi besar, tembok setinggi dua puluh lima meter dan keliling dua ratus tujuh puluh meter. Rajah Putri Iju, seorang putri yang terkenal, disebut telah membangunnya].

Menariknya sumber Anderson mencatat adanya figur perempuan bernama “**Rajah Putri Iju**” (Putri Hijau) yang terkenal dan dikenal dalam banyak sumber Aceh, Simalungun, Karo, dan Melayu. Figur tersebut berdasar legenda Karo dinyatakan memiliki klan “Sembiring”, sementara pada orang Simalungun menjadi leluhur yang membentuk Kerajaan Dolog Silou klan Purba Tambak. Di Melayu, lebih mengemuka melalui legenda Putri Hijau yang memiliki dua saudara laki-laki dan terkenal rupawan. Kecantikannya menggugah hati pangeran Aceh dan mengutus Gocah Pahlawan menaklukkan Aru Delitua melalui sebuah meriam pemberian Portugis. Cerita itu dikembangkan dengan berdirinya Kesultanan Deli yang lama di Namurambe, sebelum akhirnya pindah ke Labuhandeli sekaligus menurunkan kesultanan lainnya di pantai timur Sumatra Utara (Sinar, 1986). Sebagai catatan juga, “Putri Hijau” di Indonesia adalah folklor yang memiliki kemiripan dalam mitologi India, “*Green Princess*” yang merujuk pada “*Green Tara*,” Dewi Hijau yang melambangkan perlindungan dan pengetahuan. Ia digambarkan dengan warna kulit hijau yang dikaitkan dengan “*wisdom*” dan “*love*”. Dalam catatan lain, *Green Tara* adalah permaisuri Amoghasiddhi, salah satu Buddha yang “lahir sendiri.” (Preston, 2024).

Lokasi di Delitua, Namurambe, ditemukan sebidang tanah berbenteng yang berdampingan dengan Lau Patani dan banyak disebut “Benteng Putri Hijau” sebagai lokasi Kerajaan Aru yang lama (Damanik, 2012; Miksic, 1979). Sumber Anderson paralel dengan Pinto yang menyatakan bahwa entitas Aru yakni lokasi berbenteng (Benteng Putri Hijau) berdekatan dengan Lau Patani. Rujukan lain dalam buku *“Lintasan sejarah peradaban dan budaya penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur 1612-1950,”* Husny (1978) menulis sebagai berikut:

“Nama Aru (Haru atau Harau) adalah nama dinasti, bukanlah marga. Sama halnya dengan dinasti “Ming” atau “Mandsyu” ataupun “Firaun” masa dahulu. Marga yang diberikan pada Dewa Sakti adalah serupa dengan yang dipunyai raja Kuta Buluh. Dewa Sakti ditempatkan dan dirajakan di wilayah kerajaannya sendiri, bukan mendapat tanah dari raja Kuta Buluh. Atas mufakat masyarakat, di bangun pula ibukota kerajaan yang baru itu di daerah pedalaman dengan nama “kota tua” berbenteng, dilingkari pohon- pohon bambu aur yang rapat. Dari situ, raja Dewa Sakti memerintah kerajaannya sebagai zuriat turunan raja Aru Lama.”

Kuotasi itu menegaskan bahwa Aru adalah entitas yang memiliki klan, Sembiring pemberian *Sibayak* (kerajaan) Kuta Buluh, salah satu kawasan di dataran tinggi Karo (Brahmoputro, 1981; Singarimbun, 1975; Husny, 1978; Meuraxa, 1973). Entitas tersebut membangun kerajaan di sebuah lahan berbenteng dan mengakui sebagai keturunan “Aru Lama.” Tidak terbantahkan bahwa catatan Husny di atas kuat mengindikasikan bahwa entitas Aru memiliki keterhubungan dan keterkaitan dengan Karo.

Aru adalah entitas maritim yang wilayahnya berbatas langsung dengan Selat Malaka dan menguasai beberapa bandar perdagangan (pelabuhan), umumnya di muara-muara sungai besar di sepanjang pantai timur Sumatra seperti Teluk Aru, Langkat (McKinnon dan Sinar, 1978; Soedewo, 2015), Kota Tjina, Medan Marelán (Milner, McKinnon, dan Sinar, 1978; McKinnon, 1984) termasuk Barumun (Haan, 1897). Melalui pelabuhan-pelabuhan itu, entitas politik tersebut memperdagangkan kemenyan, beras, kamfer, dan bahan aromatik lainnya yang dikumpulkan dari pegunungan (Mills, 1970). Catatan lain

memperlihatkan bahwa temuan-temuan jalan setapak (*footprints*) yang menghubungkan pesisir dan pegunungan ataupun pedalaman menegaskan saling kontak antara kedua kawasan yang memperdagangkan keramik, pakaian, besi dan garam yang berasal dari pesisir dan diusung ke pedalaman (McKinnon, 2009).

Kesatuan entitas Aru, pada 1511 hanya menyisakan pelabuhan kecil jika dibanding dengan Pedir dan Samudra (Tibbets, 1979). Entitas politik tersebut terus merosot hingga 1612 yang kemungkinan besar disebabkan bangkitnya tirani Iskandar Muda di Aceh (Beaulieu, 1666; Reid, 1995). Bahkan, pada 1686, entitas Aru semakin terdesak dan mengecil di muara Sungai Barumon dimana pengaruhnya tidak lagi diperhitungkan (Haan, 1897). Pada pertengahan abad ke- 17 dan sesudahnya, entitas Aru samasekali tidak pernah disebutkan lagi dan Sumatra bagian utara benar-benar tertutup bagi pedagang internasional (Hamilton, 1727) hingga kedatangan seorang Inggris pada 1823 yakni John Anderson.

Aru menjadi salah satu entitas yang sulit ditaklukkan Aceh. Pada 1539 misalnya, Aru mendapat serangan Aceh untuk menguasai sumberdaya alam dan jalur distribusi melalui pelabuhan-pelabuhan dagang ditepi pantai. Namun serangan itu dapat ditahan dan menegakkan kembali dengan meminta bantuan Johor. Berdasar catatan Mendez Pinto bertahun 1539, seorang arkeolog berkebangsaan Inggris, Edmund McKinnon (1984) mencatat sebagai berikut:

"A sixteenth century account by the Portuguese writer Pinto states that Aru was conquered by the Acehnese in 1539 and recounts how the Queen of Aru made her way to Johor and the events that transpired thereafter." [Sebuah catatan pada abad ke-16 yang ditulis oleh penulis Portugis, Pinto yang menyatakan bahwa Aru ditaklukkan Aceh pada 1539 dan menceritakan bagaimana Ratu Aru melakukan perjalanan ke Johor dan kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya].

Entitas Aru memiliki pertalian kekerabatan melalui kepemimpinan tradisional (*maharaja diraja*) dengan Siak maupun Malaka pada era Mansyur Shah (Brown, 1970; Rockhill, 1914). Dalam catatan Sinar (2006) ditegaskan bahwa kesudahan Aru

berkenaan dengan rencana unifikasi Sumatra dalam genggamannya Aceh pada awal abad ke-16. Secara mengesankan, catatan Sinar mencatat sebagai berikut:

“...Pada abad ke-15, Kerajaan Aru menjadi setaraf dengan Malaka dan Pasai, dan pada awalnya berdiri pada abad ke-14 sebelum akhirnya pindah ke Delitua pada abad ke-15 yang bertahan hingga abad ke-16. Kerajaan Aru, sejak berdiri menjadi sasaran Aceh dalam rencana unifikasi pengaruhnya di Sumatra hingga abad ke-16.”

Kenyataan entitas Aru, seolah-olah berpindah-pindah atau lebih dari satu entitas tidak dapat diterima akal. Sebaliknya, paling mungkin adalah entitas Aru yang menguasai seluruh jaringan pelabuhan di pantai timur Sumatra bagian utara; Teluk Aru, Kota Cina, Delitua, hingga Barumun (Perret, 2010). Pada akhirnya, entitas politik ini tidak cukup kuat mempertahankan eksistensinya sebagai dampak serangan-serangan entitas politik lainnya yang berkeinginan menguasai sumber daya produksi dan jalur distribusi. Pada beberapasumber, entitas politik ini digambarkan sebagai bajak laut, perampok, bahkan pencuri di lautan. Meskipun memiliki pertalian dengan tetangganya, Malaka, tetapi keduanya bermusuhan. Sebetulnya, wilayahnya tidak memiliki sumber produksi memadai kecuali sumberdaya aromatik. Kenyataan ini menghantarkan entitas ini dicitrakan sebagai perampok di lautan yang berpindah-pindah dimana harus menunggu angin sebelum bertolak ke wilayah asalnya.

Nama entitas politik di Sumatra Utara ini dapat dikatakan sezaman dengan Majapahit di Pulau Jawa yang terserap dalam sastra *Nagarakretagama* (abad ke- 14) dan *Pararaton* (abad ke-15) yang tersebut dalam “Sumpah Palapa” Gadjah Mada yang mencatat suatu entitas politik bernama “*ring Haru*” (Pigeaud, 1960; Riana, 2009). Aru, Aaru, Daru atau Haru besar kemungkinan adalah entitas politik pendahulu yang berasal dari Karo yang di atas entitas itu terbentuk Kerajaan Deli (Callenfels, 1924). Kemungkinan, pamor entitas Aru yang cukup besar pengaruhnya saat itu, menjadi dasar terserapnya nama entitas tersebut dalam sastra Majapahit sebagaimana kerajaan itu melegenda pada beberapa entitas di Sumatra Utara seperti Simalungun, Melayu,

dan Karo. Fenomena saling cuplik tersebut mengindikasikan pengaruh pamor dari keduanya yang dikenal luas saat itu.

Apa hubungannya Aru dengan entitas Karo saat ini?

Berdasar uraian di atas, dapat dipetik beberapa rumusan mendasar; (1) Entitas Aru, Aaru, Daru, atau Haru adalah objek yang sama dan paling banyak dicatat guna menyebut komunitas maritim di pantai timur Sumatra bagian utara sepanjang abad 14-17. Entitas politik ini merosot dan menghilang pada paruh kedua abad 17 setelah serangan besar-besaran yang berkeinginan menyatukannya di bawah kendali Aceh sejak Kesultanan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-17 hingga menjelang paruh kedua abad ke-19, entitas tersebut samasekali menghilang dari sejumlah catatan. Bahkan, kendatipun Sumatra bagian utara pada abad ke-18 dikenal penghasil lada (*black pepper*), entitas tersebut samasekali tidak pernah disebut. Artinya, selain entitas tersebut tidak lagi diperhitungkan pada jalur perniagaan, tetapi juga terabaikan.

Berikutnya pada awal abad ke-19, terutama atas lawatan Anderson, meskipun Aru tidak tercatat pada tulisannya, sebaliknya mencatat “Karau” ataupun “Carow” atau “Caraw.” Sesungguhnya, nama entitas yang dilukiskan Anderson tersebut adalah Aru karena memiliki kesamaan setting lokasi. Catatan sejarah Aru yang hidup 150 tahun sebelumnya, nyatanya hidup luas di era Anderson melalui detail-detail informasi tempat dan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Dipastikan bahwa Anderson mendapat informasi itu dari informan lokal yang berhasil dikunjunginya. Artinya, entitas Aru yang pernah hidup sepanjang abad ke-14 hingga 17 adalah entitas yang sama pada abad ke-18 hingga 19 yakni Karo.

Entitas politik Aru yang membentuk “kepala pemimpin” (*chiefdom*) adalah organisasi tradisional Karo, *sibayak* yakni elit tradisional yang mengendalikan seluruh entitas, teritorial, hubungan antar kawasan, dan perdagangan. Sistem organisasi tradisional tetap dipertahankan di pedalaman sementara di pesisir ditransformasi menjadi “kesultanan” yang menandai menguatnya pengaruh Aceh pada pertengahan abad ke-17.

Selama periode kolonialisme terutama korporasi perkebunan Eropa pada 1863, terutama pasca Perang Sunggal, 1870-1875 dampak perdagangan opium dan konsesi tanpa sepengetahuan kedatukan Sunggal klan Surbakti, entitas Karo mengalami pembelahan (*ethnic cleavages*) yang dipisahkan berdasarkan geografi dan budaya. Berdasar geografi memunculkan Karo Gugung di pedalaman dan Karo Jehe di dataran rendah, berdasar budaya memunculkan Karo Kristen di pedalaman dan Karo Islam di dataran rendah Deli (Langkat, Binjai, dan Medan). Selama periode kolonialisme, serangkaian atribut-atribut dicari dan ditentukan sebagai dasar pemisahan sekaligus penyatuan atas komunitas yang dipisahkan, baik teritorial yang dipisahkan sungai dan lembah, sejarah asal usul, mitologi, pendidikan, pers (surat kabar), paguyuban, maupun figur-figur intelektual dari dalam (*intellectual from the inside*). Peristiwa dan sejumlah fenomena sepanjang kolonialisme menjadi dasar pemisahan internal entitas Karo, baik secara geografis maupun kultural yang terus berkecamuk hingga periode Reformasi. Namun, sesudah implementasi otonomi daerah, muncul kembali semacam upaya rekonsiliasi etnik untuk menyatukan entitas yang terbelah itu terutama yang digerakkan tokoh-tokoh politik daerah. Itu adalah pertanda mulai tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan kesetiaan bahwa mereka adalah sesama atau satu kesatuan etnik (*ethnic-based loyalty and awareness*).

Penutup

Bila Aru adalah satu kesatuan etnitas politik yang pamornya dikenal sebagai kekuatan maritim yang mengendalikan faktor produksi dan jalur distribusi, setidaknya peran itu dapat dimainkan komunitas Karo saat ini sebagai sentra holtikultura dan perkebunan termasuk rekreasi dan hiburan di Sumatra Utara. Itu adalah mekanisme untuk menghidupkan pamor Aru yang pernah kuat dan bersatu. Faktor figur pemersatu tentu saja dibutuhkan dimana kontribusinya menjadi bagian integral dari upaya membangun kesadaran dan loyalitas etnik sehingga utuh dan bertahan lama. Pasang surut politik sudah ditunjukkan Aru hingga Karau dan hari ini Karo bahwa “kebersatuan” adalah modal paling

azasi untuk mencapai keberhasilan. Niscaya tanpa kesadaran dan loyalitas itu, niscaya sama seperti Aru yang tenggelam ditelan dinamika dan hanya termemori dalam sejarah, dimana kita hanya dapat berkhayal tanpa memetik “pelajaran terbaik” serta makna di balik rangkaian sejarah yang pernah populer itu.

Referensi

- Anderson, John. 1976. *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Balandier, George. 1967. *Political anthropology*. Harmondsworth, UK.: Penguin Books.
- Beaulieu, Augustin De. 1666. The tyranni of Iskandar Muda. Dalam Melchisedech Thevenot (ed.). *Relations de Divers voyages curieux*. Paris: Cramoisy.
- Brahmoputro. 1981. *Karo dari zaman ke zaman*. Medan.
- Brown, C.C. 1970. *Sejarah Melayu or Malay Annals*. Kuala Lumpur: Oxford in
- Asia Historical Reprints. Callenfels, P.V. van Stein. 1924. De Batu kemang. *Oudheidkundig Verslag uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, 3-4; 134-138.
- Cogan, Henry. 2020. *The voyages and adventures of Ferdinand Mendez Pinto, the Portuguese*. London: Alpha Edition (versi Bahasa Inggris terbit pertama pada 1692).
- Collet. O.J.A. 1925. *Terres et peuples de Sumatra*. Amsterdam: Elsevier.
- Cortese, Armando (ed.). 1976. *The suma oriental of Tome Pires*. The Book of
- Francisco Rodrigues. Damanik, Erond L. 2019. Gugung dan Jehe: Pembelahan etnik Karo di Sumatra Utara, *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 3(1): 1-32, <http://doi.org/10.33652/handep.v3i1.46>
- Damanik, Erond L. 2017. *Rumor kanibal, menolak Batak dan jejak perdagangan: Etnohistori Sumatra bagian utara*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L. 2017. Sumatera dan kabar-kabar kanibalisme. Dalam S. Sugiharta (ed.), *Sumatera Silang Budaya: Kontestasi Nilai-Nilai Historis, Arkeologis, dan Antropologis*

- serta *Upaya Pelestarian Cagar Budaya* (hlm 17-33).
Batusangkar: BPCB Sumatera Barat.
- Damanik, Erond L. 2018. Batak dan bukan Batak: Paradigma sosiohistoris tentang konstruksi identitas etnik di Kota Medan, 1906-1939. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2): 71-87.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19624>
- Damanik. Erond L. 2012. Traces of early Chinese and Southeast Asian trade at Benteng Putri Hijau, Namurambe, Northeast Sumatra. Dalam D. Bonatz., A. Reinecke, dan M.L. Tjoa-Bonatz (eds.), *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist*. Singapura: NUS Press.
- Dames, Mansel Longworth (ed.). 1921. *The book of Duarte Barbosa*. London: Hakluyt Society.
- Groeneveldt, Willem Pieter. 2009. *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Gatot Triwira (alihabahasa). Jakarta: Komunitas Bambu.
- Haan, F. De. 1897. Een oud bericht aangaande de Batta's. *Tijdschrift van het Bataviasche Genootschap*, 39: 647-648.
- Hamilton, Alexander. 1727. *A new account of the East Indies*.
Edinburg Hirose, Masashi. 2009. *The role of local informants in the making of the image of cannibalism in North Sumatra*. Dalam D. Bonatz., J. Miksic., J. D. Neidel, dan M.L.Tjoa-Bonatz (eds.), *From distant tale: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra*. Newcastels: Cambridge Scholars
- Publishing. Husny, Tengku Lah. 1978. *Lintasan sejarah peradaban dan budaya penduduk Melayu pesisir Deli Sumatra Timur, 1612-1950*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- McKinnon, Edmund E., dan Sinar, Lukman. 1978. A note on Pulau Kompei in Aru Bay, Northeastern Sumatra. *Indonesia*, 26: 47-73.
- McKinnon, Edmund E. 1984. *Kota Cina: Its context and meaning in the trade of Southeast Asia in the twelfth to fourteenth*

- centuries. Ph.D diss. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- McKinnon, Edmund E. 2009 *Ceramics, cloth, iron and salt: Coastal hinterland interaction in the Karo region of Northeastern Sumatra*. Dalam D. Bonatz., J. Miksic., J. D. Neidel, dan M.L. Tjoa-Bonatz (eds.), *From distant tale: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Meuraxa, Dada. 1973. *Sejarah kebudayaan suku-suku di Sumatra Utara*. Medan: Sasterawan.
- Mills, John Vivian Gottleb. 1970. *Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan: The overall survey of the Oceans shore in 1433*. Cambridge: Hakluyt Society.
- Milner, Anthony C., McKinnon, Edmund E., dan Sinar, Lukman. 1978. A note on Aru and Kota Cina. *Indonesia*, 26: 1-42.
- Miksic, John. 1979. *Archaeology, trade and society in Northeast Sumatra*. Ph. D diss. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme dan etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO Jakarta.
- Pigeaud, Theodore G. Th. 1960. *Java in the 14th century: A study in cultural history, the Nagara-Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D.* The Hague: Martinus Nijhoff.
- Polo, Marco. 1958. *Cannibals and kings, Northern Sumatra in the 1290s: The travels of Marco Polo*. Harmondsworth: Penguins Books.
- Preston, Charles. 2024, 22 November. List of Hindu Deities. *Encyclopedia Britannica*, diambil online 24 April 2025 pada <https://www.britannica.com/topic/list-of-Hindu-deities-2066639>.
- Reid, Anthony. 1995a. *Witnesses to Sumatra: A travellers anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Reid, Anthony. 1995b. *Perjuangan rakyat: Revolusi dan hancurnya kerajaan tradisional di Sumatra*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Reid, Anthony. 2009. Is there a Batak History? Dalam D. Bonatz., J. Miksic., J.D.

- Neidel., dan M.L. Tjoa-Bonatz (eds.), *From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra* (hlm. 104-119). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.
- Riana, I Ketut. 2009. *Kakawin desa Warnnana, uthawi, Nagarakrtagama: Masa keemasan Majapahit*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rockhill, William Woodville. 1915. Notes on the relations and trade of China with the Eastern Archipelago and the Coast of the Indian Ocean during the fourteenth century. *Toung-pao*, 16(3): 374-392.
- Sinar, Lukman. 1986. *Sari sejarah Serdang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah
- Sinar, Lukman. 2006. *Bangun dan runtuhnya kerajaan Melayu Sumatra Timur*. Medan. Yayasan Kesultanan Serdang.
- Singarimbun, Masri. 1975. *Kinship, descent and alliance among the Karo Batak*. Berkeley: University of California Press.
- Soedewo, Ery. 2015. Manik-manik kaca salah satu indikator kejayaan dan keruntuhan perniagaan Pulau Kampai. *Kalpataru*, 24(2): 137, <https://doi.org/10.24832/kpt.v24i2.40>
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2024, 4 Juli. Fernão Mendes Pinto. *Encyclopedia Britannica*. Diperoleh pada 23 Mei 2025 dari <https://www.britannica.com/biography/Fernao-Mendes-Pinto>.
- Tibbets, Gerald R. 1979. *A study of arabic texts containing material on Southeast Asia*. Leiden: E.J. Brill.
- Viale, Robert. 1991. *Peregrination of Mendez Pinto*. Paris: La Difference.
- Wolters, Oliver William. 1977. *Early Indonesian commerce: A study of the origins of Srīvijaya*. Ithaca: Cornell University Press.

Bagian II

Penelitian Sejarah berbasis Pendekatan Arkeologi (Hubungan antara Aru dan Karo)

Mokhtar Saidin¹

Abstrak

Kemana arah tuju penyelidikan Kerajaan Aru dan hubungannya dengan peradaban Karo? Jika sekadar untuk mengetahui apakah dia Kerajaan Aru dan apakah hubungannya dengan peradaban Karo maka telah terjawab dengan hasil penyelidikan sedia ada? Namun, jika ianya hendak dijadikan sebagai sumber kebanggaan Karo malah boleh menjadi sebagai sumber Kebanggaan Sumatera mahupun Indonesia, maka penyelidikannya perlu dinaiktaraf sehingga boleh menghasilkan OUV “*Outstanding Universal Value*” Nilai Keunggulan Sejagat, untuk dicalonkan sebagai “Tapak Warisan Dunia” World Heritage Site, UNESCO. Untuk mencapai tahap tertinggi ini, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh tapak lain di Indonesia yang telah menjadi Tapak Warisan Dunia UNESCO seperti tapak Candi Borobudur dan Parambanan (1991), tapak Sangiran (1996), tapak Landskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai manifestasi falsafah Tri Hita Karana (2012), Warisan Perlombongan Arang Ombilin, Sawahlunto (2019) dan Paksi Kosmologi Yogyakarta dan Mercu Tanda Bersejarahnya (2023), yang kesemuanya mempunyai bukti arkeologi yang saintifik dan kukuh. Sehubungan itu kertas kerja ini akan membincangkan skop penyelidikan arkeologi yang boleh dilaksanakan dalam memantapkan lagi data Kerajaan Aru dan hubungannya dengan peradaban Karo.

Kata Kunci: Kerajaan Aru, Peradaban Karo, OUV, Arkeologi

Pendahuluan

Sehingga kini begitu banyak bukti rekod dokumen bertulis dan rekod lisan daripada temubual tentang Kerajaan Aru. Akan tetapi rekod penyelidikan arkeologi saintifiknya masih terhad yang sangat penting untuk mengesahkan dapatan rekod bertulis dan lisan, khasnya di lapangan. Arkeologi adalah satu disiplin ilmu yang penting dalam kajian sejarah yang melibatkan penyelidikan dan penemuan artifak, ekofak, struktur, dan peninggalan lain yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kehidupan manusia di masa lalu. Dalam konteks kajian sejarah, arkeologi berfungsi untuk mengisi jurang pengetahuan dan memahami peradaban yang telah lama wujud melalui peninggalan yang ditinggalkan. Artikel ini akan membincangkan maksud arkeologi, kaedah kajiannya, serta kepentingan peninggalan zaman dalam pemahaman sejarah manusia. Tumpuan arkeologi diberikan kepada isu Lokasi & Paleoalam, Pentarikan dan Fungsi untuk mendapatkan data perhubungannya dengan peradaban Karo dengan lebih holistik lagi. Terlebih dahulu diulas tentang syarat menjadi sebuah Tapak Warisan Dunia UNESCO).

Tapak Warisan Dunia, UNESCO

Mengikut kriteria pemilihan tapak Warisan Dunia, UNESCO, 2016, setiap tapak yang hendak dicalonkan mesti mempunyai OUV *outstanding universal value*/nilai keunggulan sejagat yang jelas dan memenuhi sekurang-kurangnya satu daripada kriteria budaya berikut:

- (1) Mewakili karya/ciptaan agung oleh manusia yang genius kreatif
- (2) Untuk mempamerkan perubahan penting nilai manusia, dalam jangka masa tertentu atau dalam kawasan budaya dunia, mengenai perkembangan dalam seni bina atau teknologi, seni monumental, perancangan bandar atau reka bentuk landskap
- (3) Untuk memberikan kesaksian yang unik atau sekurang-kurangnya luar biasa terhadap tradisi budaya atau tamadun yang masih hidup, atau yang telah lenyap

- (4) Untuk menjadi contoh yang luar biasa bagi jenis bangunan, seni bina atau teknologi binaan atau landskap yang menggambarkan peringkat penting dalam sejarah manusia
- (5) Untuk menjadi contoh luar biasa bagi penempatan manusia tradisional, guna tanah atau guna laut yang mewakili budaya, atau interaksi manusia dengan alam sekitar terutamanya apabila ia menjadi terdedah di bawah kesan perubahan yang tidak dapat dipulihkan.
- (6) Untuk dikaitkan secara langsung atau nyata dengan peristiwa atau tradisi hidup, dengan idea, atau dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastera yang mempunyai kepentingan universal yang luar biasa. Kriteria ini boleh dijadikan pelan panduan penyelidikan Kerajaan Aru dan hubungannya dengan Peradaban Karo.

Apakah Arkeologi

Arkeologi berasal daripada dua kata Yunani, iaitu “archaios” yang bermaksud ‘lama’ dan “logos” yang bermaksud ‘ilmu’. Secara ringkas, arkeologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang budaya dan peradaban manusia yang telah wujud sebelum ini dengan menggunakan sisa-sisa atau peninggalan yang ditemukan dari tanah atau tapak arkeologi. Peninggalan ini boleh merangkumi pelbagai jenis bahan, seperti (i) artifak- objek buatan manusia seperti alat, perhiasan, dan senjata, (ii) ekofak- objek semula jadi yang tidak diubahsuai ditemui di tapak yang menyediakan maklumat tentang persekitaran masa lalu dan interaksi manusia dengannya, seperti sisa tumbuhan (benih, debunga) atau sisa haiwan (tulang, cengkerang) yang menawarkan pandangan tentang diet masa lalu, pertanian dan kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem (iii) fosil- rangka, (iv) struktur senibina dan lain-lain.

Kaedah kajian dalam Arkeologi

Arkeologi menggunakan pelbagai kaedah dan menganalisis peninggalan sejarah. Antara kaedah utama yang digunakan termasuk (i) ekskavasi tapak- aktiviti ini melibatkan penggalian

tanah di tapak arkeologi untuk menemukan artifak dan struktur. Penggalian biasanya dilakukan secara sistematis untuk memastikan data yang diperoleh adalah tepat dan tidak hilang (ii) analisis artifak & ekofak – jenis dan kategori, termasuk mengenal pasti jenis bahan, fungsi, dan umur artifak tersebut. Analisis kimia dan fizikal juga dilakukan untuk menentukan komposisi dan teknik pembuatan, (iii) kajian Konteks- setiap penemuan arkeologi tidak boleh dipisahkan dari konteksnya. Konteks merujuk kepada lokasi dan keadaan di mana artifak dijumpai. Kajian konteks membantu arkeolog untuk memahami hubungan antara artifak dan masyarakat yang menggunakannya, (iv) pemodelan rekonstruktif- arkeolog menggunakan data yang dikumpulkan untuk membentuk model kehidupan masyarakat terdahulu. Ini termasuk rekonstruksi sosial, ekonomi, dan keagamaan berdasarkan bukti yang ada.

Kepentingan Arkeologi dalam Kajian Sejarah

Penyelidikan arkeologi yang saintifik akan dapat membantu ahli sejarah tentang (i) memahami evolusi budaya- kita akan dapat memahami bagaimana budaya manusia telah berkembang dari masa ke masa melalui arkeologi. Artifak seperti alat pertanian, senjata, dan perhiasan mencerminkan perubahan dalam teknik dan cara hidup manusia, (ii) menjawab persoalan sejarah yang tidak dapat dijawab oleh dokumen bertulis yang sering kali dipengaruhi oleh penulisnya, yang mungkin memiliki agenda tertentu. Namun, peninggalan arkeologi memberikan perspektif yang lebih objektif tentang peradaban lampau (iii) menyimpan pengetahuan tradisional- arkeologi membantu dalam memelihara pengetahuan tradisional dan warisan budaya. Artifak yang dijumpai sering kali mempunyai nilai yang tinggi dalam memahami amalan dan kepercayaan masyarakat purba, (iv) membantu dalam pengurusan warisan budaya- dengan memahami sejarah melalui arkeologi, kita dapat lebih baik dalam mengurus dan memelihara tapak warisan budaya. Ini penting untuk generasi akan datang agar mereka dapat belajar dan menghargai sejarah nenek moyang mereka.

Oleh kerana itu arkeologi adalah penting dalam kajian Kerajaan Aru dan hubungannya dengan peradaban Karo kerana ia

memberikan bukti fizikal yang dapat menjelaskan dan melengkapi narasi sejarah yang ditulis, serta membantu memahami budaya dan peradaban manusia. Arkeologi merupakan kunci penting dalam mengungkap rahsia sejarah manusia melalui peninggalan zaman. Melalui kajian dan analisis yang teliti, arkeologi memberikan kita pemandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi, beradaptasi, dan berkembang dalam pelbagai persekitaran sepanjang sejarah. Dengan penghargaan terhadap arkeologi, kita tidak hanya menghargai warisan nenek moyang kita, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan lebih beradab.

Kerajaan Aru-Peradaban Karo: Lokasi

Lokasi sebenar Kerajaan Aru adalah sangat penting diketahui untuk mengesahkan fakta di dokumen bertulis. Malah ianya menjadi perkara penting di dalam OUV. Lokasi sebenar akan menunjukkan bukti fizikal Kerajaan Aru. “Kerajaan” menunjukkan Aru mempunyai satu kuasa pemerintahan dan rakyat yang diperintah, serta keluasan pemerintahan yang jelas. Sekitaran yang ada sekarang tidak semestinya sama dengan sekitar pada abad ke13-17M. Oleh kerana itu paleoalam Kerajaan Aru perlu diketahui dengan jelas.

“Berdasarkan rekod tulisan China, Arab, Eropah dan Indonesia wilayah Kerajaan Aru cukup luas dari Sungai Tamiang sampai ke Sungai Rokan. pusat pemerintahan Aru telah berpindah-pindah. Boleh jadi berawal dari Hulu Besitang atau Teluk Haru di Langkat, kemudian ke Muara Sungai Belawan, Sungai Deli (Situs Kota Cina dan Kuta Rentang), Hulu Sungai Barumon atau Muara Sungai Panai dan terakhir ke Deli Tua, sekitar 25 km dari Muara Sungai Belawan. Hulu Sungai Deli atau muara Sungai (Lau Tani) di Deli Tua tempat di mana Benteng Putri Hijau dibangun sangat tepat dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Aru pada periode akhir antara abad ke 16-17 M”

Maka, pendekatan arkeologi boleh membantu melengkapkan bukti fizikal di lapangan. Kaedah survei dan pemetaan saintifik

ialah aktiviti utama yang sangat diperlukan sebelum ekskavasi dijalankan untuk mendedahkan semua kemungkinan bukti fizikal. Kaedah survei dan pemetaan saintifik perlu melibatkan teknologi LIDAR, interpretasi remote sensing, interpretasi foto udara, geofizik dan interpretasi peta geologi serta peta topografi.

Kerajaan Aru-Peradaban Karo: Pentarikan

“Berdasarkan rekod tulisan China, Arab, Eropah dan Indonesia Kerajaan Aru telah wujud sejak abad 13-17 M”.

Sebagai sebuah negeri yang besar dengan kronologi masa yang panjang hampir tiga abad, adalah dijangka pusat pemerintahan Aru telah berpindah-pindah”.

“Rekod Dinasti Yuan:

(i) Kublai Khan (1282) menuntut Aru untuk tunduk kepada kekuasaan China

(ii) Aru kirim ufti pada tahun (1295)”

“Pada tahun 1564, Kerajaan Aru dikalahkan oleh tentera Uthmaniyah semasa ekspedisi Uthmaniyah ke Aceh. Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda dari Aceh melakukan serangan terakhir untuk menutup nasib Kerajaan Aru. Kerajaan Aru lenyap pada awal abad ke-17. Negara penggantinya adalah Deli yang turun statusnya menjadi protektorat Aceh (1632–1669), dan di kemudian hari ditakluk pula oleh Siak (1669–1854)”

OUV mementingkan asal-usul Kerajaan Aru- daripada aspek di mana? Dan bila ianya bermula? Oleh kerana itu, selepas survei dan pemetaan saintifik ialah aktiviti ekskavasi. Hanya melalui ekskavasi sahaja yang akan dapat mendedahkan bahan pentarikan untuk pentarikan mutlak. Maka, dengan mendapatkan pentarikan mutlak membolehkan kita mengetahui di mana Kerajaan Aru berlangsung pada kronologi masa tertentu dengan lebih tepat. Ekskavasi membolehkan kita menemui bahan atau sampel pentarikan seperti bahan organik (arang, sedimen terbakar, dll) untuk pentarikan radiakarbon serta sampel tanah di dinding petak ekskavasi dan bata untuk pentarikan OSL dan TL.

Kerajaan Aru-Peradaban Karo: Fungsi

Sebagai sebuah “Kerajaan”, Aru mesti mempunyai fungsi fizikal sebagai pusat pemerintahan, kawasan rakyat, pusat perniagaan, pelabuhan, sistem keselamatan, sistem pendidikan, industri dan pelbagai lagi prasarana pemerintahan yang menggambarkan masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Fungsi ini sangat penting diketengahkan di dalam OUV, apatah lagi ianya berlangsung sekitar tiga abad.

“Berdasarkan rekod tulisan China, Arab, Eropah dan Indonesia Hulu Sungai Deli atau muara Sungai (Lau Tani) di Deli Tua tempat di mana Benteng Putri Hijau dibangun sangat tepat dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Aru pada periode akhir antara abad ke 16-17 M”

“Pada abad ke-15, Kerajaan Haru menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, setara dengan Kesultanan Melaka dan Samudera Pasai. Hikayat Melayu mencatat bahwa surat dari Raja Haru dan Pasai diterima di Melaka dengan upacara kenegaraan penuh, menunjukkan status tinggi kedua kerajaan tersebut”

Fungsi boleh dikenalpasti dengan survei dan pemetaan saintifik lagi melalui kaedah LIDAR, remote sensing, foto udara dan interpretasi peta geologi dan peta topografi. Kemudian ianya disahkan daripada artifak dan ekofak yang ditemui semasa ekskavasi.

Kerajaan Aru-Peradaban Karo: Hubungan

Perkaitan Peradaban antara Kerajaan Aru dan Peradaban Karo hanya akan dapat dilengkapkan dengan sekurang-kurangnya melakukan tiga pendekatan arkeologi di atas. Lokasi & paleoalam, pentarikhan dan fungsi akan dapat mengesahkan hubungan antara keduanya malah dapat melengkapkan lagi bukti hubungan tersebut. Ini adalah sangat penting untuk ditunjukkan dalam OUV khasnya jika tajuk ini “Kerajaan Aru dan Hubungannya dengan Peradaban Karo” yang akan dihantar ke UNESCO.

“Berdasarkan rekod tulisan China, Arab, Eropah dan Indonesia, Dalam sejarah Melayu, ada disebutkan tentang nama-nama pembesar Aru yang erat kaitannya dengan nama-nama atau marga orang Karo, seperti Serbanyaman Raja Purba dan Raja Kembat dan nama Aru atau Haru juga dapat dikaitkan dengan Karo”

Kerajaan Aru-Peradaban Karo: Masa Depan Penyelidikan

Penyelidikan tentang Kerajaan Aru dan hubungannya dengan Peradaban Karo daripada aspek arkeologi pada masa depan sangat memerlukan Kumpulan/team penyelidik saintis yang lengkap, minima mempunyai ahli- (1) Ahli geologis- aktiviti survei dan pemetaan saintifik terperinci, geofizik, geokimia, petrologi dll, (2) Ahli arkeologis- aktiviti ekskavasi dan analisis saintifik dll, (3) Ahli zoologi- analisis bukti fauna, (4) Ahli botani- analisis bukti flora termasuk palinologi dan lain-lain pakar yang berkaitan dengan penemuan. Kesemua hasil penyelidikan perlu diterbitkan dalam jurnal antarabangsa yang diiktiraf untuk menjadi bahan bukti kepada UNESCO.

Kumpulan penyelidik ini mudah dibentuk di peringkat universiti, contohnya di USU sendiri, kerana telah mempunyai staf yang berkaitan dan ini memudahkan permohonan geran penyelidikan yang besar untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Kesimpulan

Dokumen bertulis tentang Kerajaan Aru didapati sangat meluas skop perbincangannya. Namun buktinya di lapangan perlu dilengkapi lagi untuk membolehkan fungsinya secara fizikal dapat dilihat dan dijadikan sumber kebanggaan negara yang akhirnya boleh dicalonkan sebagai tapak Warisan Dunia UNESCO. Pendekatan arkeologi yang sistematik dan saintifik boleh membantu melengkapkan fakta ini khasnya tentang hubungannya dengan Peradaban Karo.

Referensi

- Ahmat Adam, 2019, Hikayat Raja-raja Pasai, Perpustakaan Negara Malaysia.
- Binford, L R, 1983, *In pursuit the past*, Thames & Hudson, London.
- Brahma Putro, 1981, Karo, dari jaman ke jaman, 1, Yayasan Massa Cabang Medan.
- Groeneveldt, W.P. 1960. *Historical Note on Indonesian and Malaya compiled from Chinese Sourche*. Jakarta: CV Bhratara.
- Hill, AH, 1968, The coming of Islam to North Sumatra, *Journal of Southeast Asian History*, 4(1):6-21.
- Hodder, I, 1986, *Reading the past*, Cambridge University Press.
- Milner, A.C., E. Edwards McKinnon, and Tengku Luckman Sinar. 1978. A Note on Aru and Kota Cina. *Journal Indonesia*: 1-42.
- Muf Fadlin and Heristina Dewi, 2019, The Haru Kingdom in Sumatra Crosees the Ages, *Grenek Music Journal*, 8 (2):69.
- Munof, PM (terjemahan), 2009, Kerajaan-kerajaan awal kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia, Yogyakarta:Mitra Abadi
- Perret, D, 2010, *Kolonialisme dan etnisitas Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*, Penerbit Kepustakaan Populer Garmedia.
- Renfrew, C and P Bahn, 1991, *Archaeology: Theories, Methods and Practice*, Thames and Hudson Ltd. London.
- Suprayitno. 2012. Islamisasi di Sumatera Utara: Studi Tentang Batu Nisan di Kota Rantang dan Barus. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* :154-173.
- Suprayitno, Kota Rantang dan Hubungannya dengan Kerajaan Aru. 2008. *Waspada*. 18 May 2008.
- Supriatna, Eman. 2022. Kerajaan Aru/Haru dalam Lintasan Sejarah Islam di Nusantara. *Jurnal Pendidikan Mutiara*: 1-9.
- Rajali. Makam Sultan Di Temukan Di Tanah Deli. *Gemarnews.com*. 11 November 2020.
- Tengku Luckman Sinar. Data Sejarah Haru-Deli Tua-Puteri Hijau-Meriam Puntung. *Waspada*. 8 June 2008.
- Tengku Luckman Sinar, 1986, *Sari Sejarah Serdang*, 1-2, Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Trigger, B C, 1989, A history of Archaeological Thought, Cambridge University Press.

Bagian III

Kota Rintang dan Hubungannya dengan Kerajaan Aru: Analisis Awal Kerajaan Aru

Suprayitno¹

¹Program Studi S2 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

Pendahuluan

Kerajaan Aru memang wujud pada pada ke-13 hingga awal abad ke-16 sebagaimana disebut-sebut dalam berbagai sumber tertulis diatas. Namun adakah data-data arkeologis yang dapat mendukung eksistensi Kerajaan Aru? Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di Kota Rintang, meski sezaman dengan masa kerajaan Aru, tetapi belum secara langsung berkaitan dengan Kerajaan Aru. Hubungannya dengan eksistensi Kerajaan Aru selama ini baru sebaru sebatas interpretasi (tafsiran).

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka pada tanggal 8 Mei 2008, penulis datang ke Kota Rintang untuk meneliti keberadaan situs di kawasan tersebut, khususnya Batu Nisan Aceh, setelah sehari sebelumnya mengunjungi Museum Negeri Medan untuk mencari informasi awal tentang keberadaan situs tersebut. Berdasarkan kajian lapangan diperoleh informasi bahwa ada 15 buah batu nisan yang terdapat dalam tiga lokasi berbeda dengan kondisi 11 utuh dan 4 lainnya rusak, termasuk yang telah dibawa ke Museum Negeri Medan.

Semua batu nisan itu tidak ada mengandung tulisan yang berhubungan dengan tokoh/orang yang dikuburkan disitu. Kecuali sebuah batu nisan yang hanya bertuliskan kalimah syahadah, yang letaknya jauh di tengah rawa-rawa. Karena itu nama-nama penguasa Aru sebagaimana disebut dalam sumber China dan Sejarah Melayu belum diketahui dimana makam atau kuburannya.

Apakah di antara makam-makam itu terdapat makam penguasa Aru? Sulit untuk memastikannya.

Pembahasan

Penulis mencoba mengaitkan nisan di Kota Rintang itu dengan keberadaan Kerajaan Aru berdasarkan analisis motif/dekorasi batu nisan dan perbandingan dengan bentuk batu nisan sejenis yang terdapat di beberapa wilayah di Sumatera dan Malaysia. Para peneliti menyatakan batu nisan yang terdapat di Kota Rintang adalah jenis batu nisan Aceh atau dikenal dengan batu Aceh. Benarkah demikian? Istilah batu Aceh pertamakali diperkenalkan oleh H.S. Sircom pada tahun 1920 dalam artikelnya berjudul "Keramat in Lower Pahang" dalam *Journal of the Federated Malay States Museum (JFMSM)*, vol. IX, Plate II, p. 153. Sejak itu dikenalah istilah batu Aceh untuk menyebutkan kepada batu nisan dengan ciri-ciri tertentu.

Dalam realitasnya batu aceh memiliki beragam bentuk, ukuran dan jumlah informasi yang terdapat dalam pertulisan batu nisan itu. Dalam berbagai literatur yang telah diterbitkan berbagai deskripsi muncul sesuai dengan selera penulisnya, maka deskripsinya tergantung pada berbagai penafsiran. Othman Mohd. Yatim (1988:xxxv) membaginya atas dua bentuk utama yaitu slab dan pilar. Nisan slab berbentuk dasar pipih baik yang polos maupun yang telah dihiasai.

Nisan pilar berbentuk dasar tonggak/tiang baik yang empat persegi maupun bulat. Diluar itu ia berusaha menciptakan sebuah system yang sederhana dari bentuk dasar itu dengan menggunakan sebuah system tatanama alfabetis (tipe A-N) dan hal itu didukung dengan merujuk kepada bentuk dan gambar yang ada dalam teks. Ambary (1988: 12-14) menggolongkan batu nisan Aceh dalam tiga kelas utama yaitu bentuk gabungan sayap-burcranc, bentuk persegi panjang, dan silindrik. Bentuk sayap-burcranc adalah menyerupai tanduk kerbau. Nisan persegi panjang adalah nisan-nisan berbentuk rectang-ular yang pada bagian puncaknya berbentuk mahkota dari nisan tersebut. Nisan silindrik adalah nisan-nisan yang berbentuk dasar bulat seperti kerucut terbalik. Sementara itu Herwandi (2003: 98-100)

menggolongkannya menjadi Tipe A1, A2, A3 dan A4 untuk nisan dengan bentuk dasar pipih/slab, sedangkan untuk nisan bentuk dasar pillar (tiang) dan silindrik dikelompokkannya menjadi Tipe B1, B2, C1, dan C2.

Berdasarkan penggolongan itu, maka batu nisan yang terdapat di Kota Rintang termasuk batu nisan Aceh. Jenis pertama, tipe A (Othman Yatim) yakni berbentuk dasar pipih (slab), sayap (Ambary) dan A1 (Herwandi) dan kedua; tipe F (pipih/slab Othman Yatim), pipih polos (Ambary) dan A3 (Herwandi). Menurut Othman golongan batu nisan dengan Tipe tersebut termasuk jenis batu nisan yang tertua digunakan di semenanjung tanah Melayu (Malaysia).

Jenis batu nisan itu diperkirakan digunakan pada Tahun 1400-an, sebagaimana terdapat pada Makam Tun Teja di Pangkalan Semak, Merlimau, Melaka, makam Raja Beruas di Perak, Makam Lubok Pelang, Kampung Pematang Pasir, Negeri Pahang dan Makam Sultan Alauddin Riayat Shah (wafat 1488 M) Kampung Raja, Pagoh Muar, Johor. Bahkan di Sumatera (Aceh) jenis batu nisan ini ditemukan di Makam Sultan Malik Al-Saleh yang wafat 1293 di desa Meunasah Beringin, Samudera Pasai, Makam Tengku Peut ploh peut (abad ke-15), Bintan Puyuh, Pulau Bintan wafat 1490, Komplek Makam Kampung Pande Banda Aceh. Dengan begitu jelas jenis batu nisan yang ada di Kota Rintang sudah tersebar merata di Sumatera dan Malaysia.

Dari periodisasinya, dikenal pasti jenis batu nisan ini sudah digunakan sejak abad ke-13. Nama-nama negeri dimana ditemukan jenis batu nisan ini, dapat dijadikan rujukan untuk mengenal pasti tahun batu nisan itu digunakan, disamping tarikh yang terdapat pada batu nisan tersebut. Samudera Pasai, Beruas, Melaka, Pahang adalah negeri-negeri Melayu yang sudah wujud sejak abad ke-13, 14 dan 15. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batu nisan di Kota Rintang tentu semasa dengan batu nisan di Samudera Pasai dan sudah digunakan pada abad ke-13. Jika demikian, maka daerah Kota Rintang, Hamparan Perak sudah menjadi kawasan penting sejak abad itu. Boleh diduga batu nisan itu sengaja dipesan dari Aceh untuk makam golongan elite di Hamparan Perak. Meskipun pada batu nisan itu tidak ada

dituliskan nama tokoh yang meninggal, tetapi diduga kuat batu nisan itu adalah milik keluarga golongan bangsawan atau paling tidak orang kaya di daerah itu. Karena jenis batu nisan itu merupakan bukan batu nisan lokal. Ia pasti dipesan dari Aceh oleh orang-orang penting di Hamparan Perak ketika itu.

Memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan daerah itu merupakan komplek pemakaman keluarga kerajaan. Tetapi dari tipologi batu nisan dan dekorasinya dapat diduga bahwa lokasi Kerajaan Aru berada di sekitar kawasan itu. Apalagi di temukan juga kayu bekas perahu dan keramik-keramik buatan China pada abad ke-13. Menurut keterangan penduduk setempat, pada tahun 1990-an, di tengah-tengah persawahan/rawa-rawa masih terdapat tiang kapal. Oleh karena itu, bisa disimpulkan kawasan Hamparan Perak pada masa dahulu pernah menjadi bandar perdagangan penting di tepi Selat Melaka/Pantai Timur Sumatera.

Mungkin saja Kawasan Hamparan Perak pada abad ke-13 merupakan kawasan pantai, bukannya Labuhan dan Belawan yang muncul pada abad ke 19, sebagai bandar/istana Kesultanan Deli. Kajian Geomorfologi tentang wilayah pantai Sumatera Timur menjadi tumpuan dasar untuk membuktikan itu semua. Kajian seperti itu telah dilakukan oleh Prof Sartono untuk daerah Palembang dan Jambi, sebagaimana telah dimanfaatkan oleh Selamat Mulyana dalam membuktikan posisi sebenarnya Kerajaan Moloyu (Melayu) sebagaimana disebut dalam sumber-sumber China di Muara Sungai Batang Hari (Jambi).

Muara Sungai Batang Hari ternyata pada abad ke 5 M bukanlah yang ada sekarang, tetapi jauh menjorok ke daratan dekat dengan kota Jambi sekarang. Kajian Koopman untuk wilayah pantai Perak di Malaysia telah penulis manfaatkan untuk menentukan secara pasti lokasi Istana Kesultanan Perak awal, pada tahun 1528. Sayang penulis belum memperoleh informasi apakah sudah ada kajian tersebut untuk wilayah Sumatera Timur.

Dekorasi yang terdapat batu nisan di Kota Rintang cukup sederhana, bahkan ada yang masih polos dan hanya di hiasai dengan hiasan motif aneuk abi. Batu nisan yang terakhir ini bentuknya sangat kecil yakni berukuran tinggi dari dasar sampai puncak 22 cm sedangkan tangkainya 13 cm. Dari bentuk, ukuran,

dan motifnya penulis menyimpulkan bahwa itu adalah batu nisan untuk anak-anak. Aneuk abi dalam bahasa Aceh berarti anak ayah.

Sementara batu nisan yang terbesar berukuran tinggi dari dasar sampai ke puncak 45 cm dan tangkainya 15 cm. Ketebalan batu nisan itu mencapai 14,5 cm di bagian badan dan di bagian leher yang berbentuk sayap menonjol keluar, ke kanan dan ke kiri berukuran 23,5 cm. Motif ukiran yang terdapat pada batu nisan itu adalah motif bungong anek abi , bungong glima, bungong puta talou dua dan bungong puta talou lhee. Menurut Othman Yatim (1988) motif-motif atau pola hias seperti itu telah berumur cukup tua.

Berdasarkan hasil risetnya pola-pola hias itu telah menghiasi makam-makam Islam di Aceh dan Semenanjung Tanah Melayu sejak berkuasanya Kerajaan Samudera Pasai sampai masa jayanya Kerajaan Melaka dan Kerajaan Aceh Darussalam. Pola hiasan ini telah meramalkan dinamika kesenian sejak abad ke-13 M sampai abad ke 16 M. Dari analisis motif dan dekorasinya jelas batu nisan itu merupakan batu nisan Aceh yang dapat dikatakan berasal dari Aceh, mungkin dari Kampung Pande di Banda Aceh yang merupakan kawasan tempat para ahli ukir batu nisan Aceh. Di kawasan ini penulis juga banyak menjumpai berbagai jenis batu nisan Aceh dari beragam bentuk, ada yang masih jelas menunjukkan perpaduan dengan unsur pra-Islam (Hindu).

Dari hasil analisis dekorasi pada batu nisan di Kota Rintang, jelas menunjukkan bahwa batu nisan itu merupakan batu nisan Aceh dan sudah dikenal sejak abad ke-13 M se zaman dengan masa berkembangnya Kerajaan Aru. Oleh karena itu, kawasan Kota Rintang, Hamparan Perak dapat dipastikan menempati posisi yang penting di dalam sejarah Kerajaan Aru/Haru, setidaknya sejak abad ke 13 sampai awal abad ke 16 M. Dengan begitu hubungan antara berbagai temuan di Kota Rintang dengan Kerajaan Aru/Haru dapat dijelaskan melalui kajian periode/masa dipergunakannya batu nisan tersebut atau berbagai keramik-keramik yang ditemukan di lokasi tersebut dengan masa eksisnya kerajaan Aru.

Referensi

- Anderson, Jhon. Mission to The East-Coast of Sumatra in 1823, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1971.
- Brahmoputro, Karo dari Jaman Ke Jaman, Medan: Merga Silima, 1981.
- Cortesao, A., The Suma Oriental of Tome Pires, London, Haklyut Society, 1944.
- Groeneveldt, W.P., Historical Note on Indonesian and Malaya compiled from Chinese Sourche, Jakarta, CV Bhratara, 1960.
- Lombard, D., Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1641-1795, terj. Winarsih Arifin, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- Ma Huan, Ying Yei Sheng Lan, 1970.
- Mill, J.V., "Malaca, Meredional India and Chatay, dalam Journal of the Malayan/Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Singapore, Printers Limited, 1931.
- Milner, AC, E.Edwards Mc Kinnon, and Tengku Luckman Sinar, "A Note on Aru and Kota Cina, Journal Indonesia, Cornell University Southeast Asia Program, vol.26, Okt.1978
- Marsden, William. Sejarah Sumatera. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mohd.Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan, Waspada, 1981.
- Mohd. Yamin, Atlas Sejarah, Jakarta, Bhratara, 1953.
- H.Cogan.translate 1653, *The Voyages and Adventures of Fernad Mendez Pinto*, London: Dawnsons of Mall, 1969.
- Reid, Anthony. Soematra Tempoe Doeloe, Komunitas Bambu, 2010.
- Schadee, WHM, Geschiedenis van Sumatra`s Ooskust, deel I, Amsterdam, 1918.
- Shellabear, W.G., Sejarah Melayu, Singapura, Malaya Publishing House, 1986.
- Selamat Mulyana, Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi, Jakarta, Yayasan Idayu, 1981
- Siti Hawa Haji Saleh, Bustanus Salatin, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Suprayitno, "Kota Rantang dan Hubungannya dengan Kerajaan Aru", dalam Waspada, 2008.

Tengku Luckman Sinar, *Sari Sedjarah Serdang*, Jilid I, Medan, 1971.

Tengku Luckman Sinar, "Data Sejarah Haru-Deli Tua-Puteri Hijau-Meriam Puntung" dalam Waspada On Line, 8 Juni 2008.

TM. Lah Husny, 1967. *Lintasan Sejarah dan Perababan Penduduk Melayu Pesisir Deli, Sumatera Timur*. Medan: BP. Husny, 1967.

Tengku Luckman Sinar, *Sari Sejarah Serdang*, Medan, 1971.

Tim Penelitian, *Laporan Penelitian Komprehensif Pada Situs yang di duga sebagai Benteng Putri Hijau*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, 2009.

<http://akhirmh.blogspot.com/2016/01/sejarah-kota-medan-13-kerajaan-arua-di.html>

Bagian IV

Relasi Kerajaan Aru dengan Karo dari Perspektif Budaya

Julianus Limbeng¹

¹ Pamong Budaya Ahli Madya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Pendahuluan

Menelusuri relasi Kerajaan Aru dengan Karo dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satu dengan perspektif kebudayaan. Perspektif kebudayaan yang dimaksud meliputi unsur-unsur, ciri dan dinamika kebudayaan dan interaksinya dengan berbagai hal. Banyak informasi telah didapatkan dari hasil catatan perjalanan dan riset selama ini yang dapat dijadikan bahan kajian, namun satu pertanyaan dari hasil tersebut yang belum terjawab dengan baik adalah di mana letak Kerajaan Aru itu. Mengapa ini penting, karena lokus akan dapat menjadi pemantik selanjutnya dikaitkan dengan isu-isu kebudayaan lain melalui pendekatan difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi dan terori-teori kebudayaan lainnya sebagai perangkat analisis. Namun hal itu juga tidaklah gampang, karena kebudayaan itu sendiri cair dan ada yang kontinu dan diskontinu. Dari berbagai literatur setidaknya Kerajaan Aru itu ada di beberapa pernyataan, seperti Pesisir Sumatera, Teluk Aru (Langkat), Linagga, Barumun, Kota Cina (Marelan); Kota Rintang (Deli Serdang); Deli Tua (Deli Serdang), dan disebutkan juga letaknya dekat Belawan. Tidak ada secara pasti yang menyatakan letak Kerajaan Aru itu dimana, namun berbagai temuan artefak dan beberapa petunjuk dari catatan-catatan mengenai Kerajaan Aru kiranya dapat menjadi informasi yang sangat berharga yang dapat dijadikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk dianalisis dalam rangka menindaklanjuti sekaligus melengkapi *puzzle* yang belum terjawab.

Kerajaan Aru dalam buku “Karo Dari Zaman ke Zaman” karya Brahma Putro (1995), da banyak informasi mengenai Kerajaan Haru kemudian disebut Haro. Disebutkan, bahwa pada abad pertama Masehi sudah ada kerajaan di Sumatera Utara, rajanya bernama Pa Lagan. Menilik dari nama itu merupakan bahasa yang berasal dari suku Karo. Dalam buku ini disebutkan Kerajaan Haru Wampu dan Kerajaan Haru Mabar (1225-1539). Tapi dari beberapa catatan bahwa kerajaan Aru itu diyakini ada pada tahun 1225 hingga dikalahkan Aceh pada tahun 1613 dengan ibukota Kota Rantang hingga Delitua, dan menyebutkan bahwa Kesultanan Deli lah sebagai penerusnya (Milner, McKinnon & Sinar, 1978; 4-5)

Banyaknya pendapat tentang dimana letak Kerajaan Aru disebabkan sedikitnya informasi tertulis yang ditemukan seperti prasasti misalnya, namun keberadaannya tidak dapat dibantahkan karena banyak catatan-catatan yang menyebutnya. Informasi tentang Kerajaan Aru ini misalnya terdapat dalam kitab (1) *Pararaton* (Pustaka Raja-raja, Para Ratu) – Menyebutkan Haru (Aru) sebagai salah satu kerajaan yang berkonflik dengan Majapahit; (2) *Nagarakretagama* – mengindikasikan bahwa Haru adalah bagian dari wilayah yang diperhitungkan dalam ekspansi Majapahit; (3) *Sulalatus Salatin* – Menggambarkan hubungan Aru dengan Kesultanan Malaka dan konflik yang terjadi; (4) Situs Benteng Putri Hijau¹ – situs arkeologi di Delitua yang diduga terkait dengan Kerajaan Aru, meskipun belum ada prasasti yang secara eksplisit mengonfirmasi hal ini.

Tengku Luckman Sinar (1971) mencatat bahwa nama Aru muncul pertama kali pada tahun 1282 dalam kronik Cina masa Dinasti Yuan, Tionghoa pada masa kepemimpinan Kublai Khan, yang menyebutkan Kublai Khan menuntut tunduknya penguasa Haru pada Cina pada 1282, yang ditanggapi dengan pengiriman upeti oleh saudara penguasa Haru pada 1295. Demikian pula dalam buku “Sejarah Melayu” yang banyak menyebut tentang Kerajaan Aru. Berdasarkan literatur tersebut, Lukman Sinar

¹ Situs Benteng Putri Hijau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deliserdang No 1863 Tahun 2004, mengacu kepada Undang-undang Cagar Budaya No 11 tahun 2010.

(2006:17) dalam penjelasan lebih lanjut mengemukakan bahwa pusat Kerajaan Aru adalah Deli Tua dan telah menganut Islam.² Jika Delitua benar-benar merupakan pusat Kerajaan Aru maka relasinya dengan Karo menjadi sangat kuat, hingga saat ini Delitua menjadi salah satu wilayah orang Karo saat ini. Namun dari sumber yang lain kemungkinan ada lokasi lain selain Delitua. Penguatan yang lain adalah catatan P.J. Vet (1866-1867) adanya epigrafi dalam Meriam yang terdapat di sana dengan tulisan '*Sanat ... 03 alamat Balun Aru*'. Meskipun belum menemukan apa arti sebenarnya dari tulisan tersebut, namun setidaknya telah memberikan petunjuk penting Delitua sebagai wilayah orang Karo dengan Kerajaan Aru.³

Letak Kerajaan Aru itu sendiri menjadi sangat penting, karena akan dapat menjadi satu petunjuk bagaimana relasinya dengan Karo. Jika dilihat dari berbagai sumber kemungkinan lokasi Kerajaan Aru itu berpindah-pindah di beberapa lokasi. Hal ini dapat kita simpulkan dari beberapa ciri Kerajaan Aru yang disebutkan dalam berbagai referensi seperti catatan-catatan perjalanan orang asing yang pernah berkunjung kesana. Namun yang pasti relasi semua sumber mengatakan bahwa Kerajaan Aru itu ada di Sumatera, persisnya Sumatera Utara saat ini.

W.P. Groeneveldt (2018) dalam *Nusantara dalam Catatan Tionghoa* melampirkan kutipan soal Aru yang dicatat dalam *Yingya Shenglan*, *Xingcha Shenglan*, dan *Ming-Shih*. Dari ketiga sumber itu, disebutkan bahwa Aru adalah negara kecil

² Sejumlah sumber lain juga menyebutkan bahwa Kerajaan Aru merupakan Kerajaan Melayu yang amat besar pada zamannya. Akan tetapi, Daniel Perret dalam buku "Kolonialisme dan Etnisitas" (2010), yang merujuk pada R. Djajadiningrat dalam buku "Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek" (1934), mengatakan bahwa dalam bahasa Aceh "Haro" atau "Karu" berarti suasana bergejolak dan rusuh di sebuah wilayah.

³ Sanat...03 Tidak Jelas, Namun Apabila 03 Berarti Tahun 1003 Hijriyah, Berarti Cocok Dengan 1539 Masehi, yang menurut Pinto merupakan ditaklukkannya Haru oleh Sultan Aceh, Al Qahhar. "Alamat Balun Haru" dapat juga berarti Alamat sadar (siuman) Haru, tetapi dalam bahasa Aceh dapat berarti: "Dalam Tahun 03, di tempat saya menyerahkan Haru kepada Tuanku". Dalam Bahasa Melayu "Balun" juga berarti "sadar" atau juga "dilibas". Terlepas dari isi/arti pertulisan tersebut, di tengah-tengah benteng Putri Hijau telah didapatkan bukti tentang nama Haru.

di pesisir timur Sumatra yang hidupnya bergantung pada perdagangan kapur barus yang diedarkan di Selat Malaka. Catatan lain juga menyebutkan komoditas yang ada di wilayah ini seperti padi, lada, kemenyan. Kita tidak tahu apakah Delitua termasuk daerah pesisir yang dimaksud, karena informasi Laksamana Cheng Ho yang lain menyebutkan dapat dijangkau empat atau lima hari dari Malaka. Ini dapat direkonstruksi tentunya dengan kondisi Sungai Petani pada saat itu yang belum mengalami pendangkalan hingga dapat dilalui kapal pada jamannya.

Pembahasan

Dari berbagai sumber yang ada hingga saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana relasi Kerajaan Aru dengan Karo? Apakah Kerajaan Aru itu Karo? Karena penulis tidak melakukan penelitian secara langsung, yang dapat dilakukan adalah melihat perspektif kebudayaan dengan pendekatan wacana kritis. Dari analisis wacana yang ada, maka yang penting dikaji adalah bagaimana cara-cara manusia beradaptasi dan mengeksploitasi alam guna mewujudkan cita-citanya. Dalam berbagai sumber tentang Kerajaan Aru hubungannya dengan aspek ekonomi dan sumber daya alam menjadi isu penting walaupun kita juga melihat kisah 'cinta dan heroisme' menyertainya dalam beberapa versi tentang Putri Hijau. Itulah kemudian yang menyebabkan berbagai perubahan-perubahan dalam kebudayaan hingga yang kita lihat saat ini. Justru bagaimana kemudian kita melihat relasinya untuk menjawab pertanyaan apakah Aru Karo, mencoba analisis yang komprehensif, dan tulisan ini hanya melihat secuil saja dari perspektif kebudayaan.

1. Kajian dari Perspektif Kebudayaan

Kebudayaan adalah sebuah pergulatan abadi manusia dalam tiga dimensi yang universal yaitu ide atau gagasan, perilaku dan hasil perilaku itu sendiri. Ide menyangkut cita-cita, keyakinan dan perangkat nilai-nilai yang kemudian menggerakkan aktivitas manusia untuk menghasilkan berbagai hasil dengan cara belajar dan beradaptasi dengan

lingkungannya. Hasil dari aktivitas inilah yang kemudian dapat dilihat dari dua perspektif utama dalam kebudayaan. Dari perspektif kebudayaan secara umum ada dua pendekatan yang dilakukan untuk melihat kebudayaan, yaitu bersifat benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*). Pendekatan ini juga secara umum yang dipakai berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kebudayaan dengan lahirnya dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya penekanannya lebih ke benda dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan penekanannya lebih ke non-benda beserta seluruh turunannya.

Saat ini penelitian terhadap benda-benda cagar budaya sudah banyak dilakukan dan temuan-temuan arkeologi pun telah menunjukkan informasi penting bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia saat itu. Temuan nisan di Kota Rantang, uang dirham di situs benteng Putri Hijau, penemuan berbagai keramik Cina di Kota Rantang, Meriam di situs Putri Hijau, pecahan Meriam di Sukanalu (Karo), menjadi artefak yang memberikan informasi tentang Kerajaan Aru. Namun dari sisi non benda, relasi Kerajaan Aru dengan Karo juga dapat dianalisis dari obyek pemajuan kebudayaan/Obyek pemajuan kebudayaan yang dimaksud adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olah raga tradisionalnya.

Laporan Mendez Pinto (1645) yang juga sangat penting mengatakan bahwa Ibukota (H)Aru berada dekat Sungai *Panetican*, yang dapat dijangkau lima hari melalui pelayaran dari Malaka. Apakah itu yang dimaksud sama dengan Sungai Petani (Karo: *Lau Tani* atau *Lau Petani*)⁴ yang ada di Delitua, memang dalam tradisi lisan Karo dikenal dalam cerita Putri Hijau. Pinto juga mencatat bahwa Raja Aru sedang sibuk mempersiapkan kubu-kubu dan benteng-benteng dan letak istananya lebih kurang satu kilometer ke

⁴ Tentang Lau Petani ini memang dikuatkan oleh Jhon Miksic (1979).

dalam benteng, dan juga memiliki sebuah meriam besar yang dibeli dari seorang pelarian dari Portugis. Informasi ini menjadi penting untuk merekonstruksi di lapangan.

Catatan perjalanan seperti Zeng He (Laksamana Cheng Ho) pada tahun 1413-1415; 1421-1422; dan 1431-1433; catatan perjalanan Anderson dari misi perjalanannya ke Sumatera Timur tahun 1823; Agustin de Beaulieu tahun 1621 Jhon Miksic tahun 1979, dan lain-lain, memberikan banyak informasi yang dapat kita kaji relasinya dari sisi kebendaan maupun non benda. Laporan Cheng Ho misalnya menyebutkan bahwa "... Kerajaan Aru berbatasan dengan Pasai, Sebelah Selatan dan Utara terdapat gunung yang tinggi dan luas. Bagian Timur merupakan tanah datar yang dipakai orang Aru sebagai ladang untuk menanam padi. Berasnya kecil dan halus. Hasil buminya yang utama adalah kemenyan...."

Jika kita kaitkan dengan beberapa Lokasi Kerajaan Aru yang disebutkan di atas dengan laporan tersebut, kira-kira di mana letak yang paling mendukung dengan kondisi yang digambarkan tersebut. Demikian juga dari sisi komoditas yang disebutkan misalnya padi yang halus dan kemenyan, apakah Delitua misalnya memiliki komoditas masa lampau penghasil kemenyan. Apakah kondisi alam Delitua memungkinkan kemenyan tumbuh, dan seterusnya. Rekonstruksi berdasarkan informasi menyeluruh mungkin juga dapat memberikan gambaran dari beberapa catatan tersebut. Bisa saja lokasi Kerajaan Aru ini bukan hanya di satu tempat, namun mengalami beberapa kali perpindahan karena berbagai faktor.

Ketika lokasi ini dapat digambarkan dari hasil rekonstruksi tersebut, untuk melihat relasi antara Kerajaan Aru dengan Karo akan sangat membantu dari perspektif lain seperti kebudayaannya. Kebudayaan yang dimaksud di sini lebih menitik beratkan ke pada relasi seluruh informasi dikaitkan dengan kebudayaan dan segala perubahannya. Dalam tulisan ini sebagai contoh akan difokuskan kepada obyek pemajuan kebudayaannya, karena penelitian

arkeologis sudah banyak dilakukan meskipun tinggalan artefaknya memang masih sangat terbatas dan membutuhkan pendalaman baik dari sisi Sejarah maupun arkeologi. Kajian tradisi lisan yang masih hidup hingga saat ini perlu dikaji dan dihubungkan dengan cerita-cerita atau catatan-catatan tentang Kerajaan Aru itu sendiri.

Cerita keagungan Aru di abad ke-16 secara panjang lebar dijabarkan Fernão Mendez Pinto dalam *Peregrinação*⁵ yang terbit pada abad ke-17 misalnya dapat kita cari relasinya dengan tradisi lisan yang saat ini masih hidup di masyarakat Karo. Dikutip dari terjemahan Armando Cortesao terhadap *Suma Oriental* (2018), dikatakan bahwa Kerajaan Aru gemar sekali berperang dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya. *Baheula* kata Pires, raja-raja di dunia Melayu seakan memiliki musuh bebuyutan, misal Pedir melawan Kedah, Pahang melawan Siam, Palembang melawan Lingga dan seterusnya. Cerita-cerita tentang perang ini adakah kita temukan saat ini dengan tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat Karo? Setidaknya gambaran tentang nenek moyang orang Karo pada masa lampau biasanya akan digambarkan dalam cerita-cerita berupa epos sebagai memori kolektif masyarakat yang diturunkan dari waktu ke waktu berupa tradisi lisan, karena sumber tertulis sukar ditemukan.

Salah satu memori kolektif masyarakat di sekitar Delitua, bahwa Lokasi benteng putri hijau tersebut dikenal dengan nama Pancur Gading. Bahkan perkumpulan masyarakat perantau asal Delitua Sekitar di Jakarta pun dibuat Namanya Perpulungan Pancur Gading (Perkumpulan Pancur Gading). Pancur Gading mengingatkan tempat pemandian Putri Hijau, namun Putri Hijau sendiri tidak menggunakan Bahasa Karo yang biasa penyebutan untuk Perempuan adalah digunakan kata *Beru* (Bandingkan cerita yang hidup di Karo seperti *Beru Sibou* – asal mula nira/enau, *Beru Ginting Sope Mbelin*, *Beru*

⁵ Namun demikian, *Suma Oriental* yang ditulis Tome Pires sebenarnya lebih dahulu menyebut soal Aru—walau lebih singkat dari pada Pinto.

Dayang – cerita asal mula padi dan lain-lain). Mengapa cerita rakyat ini menggunakan kata Putri Hijau? Bahkan situsnya di Desa Seberaya pun menggunakan kata Putri Hijau⁶. Ini pun menjadi kajian yang menarik yang perlu didalami, termasuk bagaimana relasi Melayu dan Karo.

Jika kita kaji informasi lain, misalnya dikutip dari terjemahan Armando Cortesao terhadap *Suma Oriental* (2018), dikatakan bahwa Kerajaan Aru gemar sekali ‘berperang’ dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Sepanjang penelusuran saya dalam cerita tentang perang misalnya pada masyarakat Karo ditemukan cerita tentang Putri Hijau dan Si Tajur dalam cerita Penganjak Uda Si Tajur. Cerita Kuda Si Tajur meskipun ada momen dalam cerita tersebut perang, yang berakhir tewasnya si Tajur dengan mengendarai kudanya, namun jika kita hubungkan dengan Kerajaan Aru mungkin alurnya agak jauh. Penganjak Kuda Si Tajur jika dianalisis lebih ke arah pemahaman keberagaman budaya sekaligus teknis mendasar dalam bermain alat musik *kulcapi* (*long neck lute*), karena memang biasanya orang yang pandai bercerita Kuda Si Tajur, menceritakannya lewat permainan alat musik petik *kulcapi* tersebut.

Beda halnya dengan *turi-turin* Putri Hijau, cerita ini memang banyak sekali berkaitan dengan perang dan cerita-cerita Kerajaan Aru yang disebut, misalnya Raja dari Aceh (Aceh). Namun perlu diketahui bahwa cerita Putri Hijau ini sendiri ditemukan setidaknya 4 versi menurut etnis yang ada di Sumatera Utara (Kasim, 2009). Cerita Putri Hijau hidup di Tengah-tengah masyarakat Melayu, Simalungun, Aceh dan Karo (lihat Buku Benteng Putri Hijau terbitan Pemkab Deli Serdang). Cerita pada masyarakat Karo sendiri pun memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dipungkiri karena proses penyebaran cerita dalam tradisi lisan secara oral, memungkinkan sekali terjadi varian.

⁶ Penamaan Putri Hijau sendiri versi masyarakat Seberaya didasari peristiwa yang terjadi pada saat dirinya dilahirkan. Ketika momen tersebut, tiba-tiba muncul cahaya hijau yang terang ketika proses kelahiran tersebut. Ia memiliki dua saudara yaitu Naga dan Mariam.

Cerita prosa rakyat ini pun sebenarnya dapat dilihat sebagai salah satu cara masyarakat menyampaikan informasi sejarah kepada orang lain dengan pendekatan lisan. Karena proses penyampaian secara lisan maka terjadi perubahan-perubahan. Namun jika kita kaitkan dengan perspektif sejarah maka tokoh-tokoh dalam *turi-turin* tersebut dapat kita kaji lebih mendalam menghubungkannya dengan makna-makna, konsep-konsep, termasuk konsep warna (hijau – Putri Hijau), simbol, dan antropomorfisme⁷ (Naga, Meriam) yang ada dalam cerita tersebut. Saya tidak ingin memperdalam masalah ini dalam tulisan ini, tetapi hanya lebih membuka cakrawala bagaimana kita dapat melihatnya secara luas.

Apa yang saya ungkapkan di sini adalah masih sebagian kecil saja. Kita bisa mengkaji dari berbagai sudut kebudayaan misalnya dari sisi keseniannya. Tidak ada digambarkan dari catatan-catatan yang ada tentang kesenian Aru itu seperti apa, namun jika kita mengacu kepada pesisir timur Sumatera, maka kesenian pesisir biasanya banyak dipengaruhi oleh kesenian dari India, Arab, China dan negara-negara Eropa. Kesenian seperti Zapin hampir ada di setiap kebudayaan pesisir Nusantara meskipun memiliki penamaan yang sedikit berbeda. Namun di Karo dari sisi ritmis dan tariannya, kesenian Zapin tidak ditemukan pada masyarakat Karo, tetapi Patam-Patam yang ada di Karo malah mempengaruhi kesenian melayu yang disebut dengan Sigubang (T. Lukman Sinar, 1990).

Jika kita telisik dari sisi adat dan upacara yang berhubungan dengan sistem kepercayaan masyarakat, disebutkan bahwa pada abad ke-15, pemimpin Kerajaan Aru dan penduduknya kemungkinan besar telah memeluk agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam *Yingyai Shenglan* (1416), karya Ma Huan yang ikut mendampingi Laksamana Cheng Ho dalam pengembaraannya.

⁷ Sebuah konsep yang mendalam dan kaya, merujuk pada pemberian atribut manusiawi atau sifat-sifat yang berhubungan dengan manusia pada benda mati, hewan, atau entitas non-manusia.

Dalam Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulalatus Salatin disebutkan bahwa kerajaan tersebut mengalami islamisasi oleh Nakhoda Ismail dan Fakir Muhammad, yang juga mengislamkan Merah Silu, Raja Samudera Pasai pada pertengahan abad ke-13.

Selanjutnya, Tengku Luckman Sinar (1971) mencatat bahwa nama Aru muncul pertama kali pada 1282 dalam kronik Cina masa Dinasti Yuan, Tionghoa pada masa kepemimpinan Kublai Khan, yang menyebutkan Kublai Khan menuntut tunduknya penguasa Haru pada Cina pada 1282, yang ditanggapi dengan pengiriman upeti oleh saudara penguasa Haru pada 1295. Demikian pula dalam buku "Sejarah Melayu" yang banyak menyebut tentang kerajaan Aru. Berdasarkan literatur tersebut, Lukman Sinar dalam penjelasan lebih lanjut mengemukakan bahwa pusat kerajaan Aru adalah Deli Tua dan telah menganut Islam.

Bukti telah menganut Islam ini sebenarnya dapat kita lihat dari nama-nama penguasa Kerajaan Aru yang mulai dari Sultan Husin (1410—1456), Sultan Mansur Shah (1456—1477), Sultan Ali Boncar (1477—1500), *Pertarungan Aceh* (1500—1538), Putri Enche Sinni/Putri Hijau (±1538—1564), Sultan Abdullah bin Alaudin dari Aceh (1564—1599), hingga *Serangan Aceh masa Iskandar Muda* (1613). Sebelum Sultan Husin nama-nama penguasa yang dikenal tidak secara langsung dapat diidentifikasi sebagai pemeluk islam seperti Raja Serbanyaman, Raja Kemat. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bahwa orang Karo memiliki *merga* (*clan*) yang selalu mengikuti namanya. Walaupun Serbanyaman itu meskipun tidak menggunakan *merga*, namun kita tau bahwa ia adalah Karo bermarga Surbakti, yang kemudian dapat kita katakana berakulturasi dengan Melayu.

Relasi Melayu dengan Karo ini pun menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji, termasuk perubahan identitas pada orang Karo, terutama mengapa tidak menggunakan 'merga' lagi sebagai salah satu identitasnya. Hubungan geografis dan sejarah menjadi penting jika kita melihat relasi

Aru dengan Karo, terutama di wilayah pesisir yang juga didiami oleh masyarakat Karo dalam waktu lama terjadi interaksi, perkawinan campur dan akulturasi budaya bahkan tekanan politik. Jika ditelusuri jejak-jejak Karo sebenarnya masih ada, setidaknya dapat dilihat dari struktur keluarga, cerita lisan keluarga, tradisi dan adat tertentu yang masih digunakan. Cerita tentang hilangnya merga-merga orang Karo ini menjadi menarik, dan disinilah pentingnya kegunaan seluruh refleksi nilai-nilai filosofis bagi kehidupan sosial budaya atau bahkan politik sehari-hari. Sebab, masalah diskontinuitas kebudayaan dan konsep tentang kebenaran yang selama ini erat kaitannya dengan kekuasaan dan pengetahuan, telah melahirkan konsep tentang ideologi yang bisa saja merepresi.

Jika dilihat dari geografisnya, orang-orang Karo yang tinggal di daerah pesisir ini sudah pasti memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa lain seperti eropa, cina, arab dan India. Peninggalan arkeologi di Kota Cina menunjukkan wilayah Haru memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok dan India. Peradaban bangsa-bangsa ini memiliki pengaruh dalam sosiokulturalnya. Satu sisi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan mungkin jarang berhubungan dengan bangsa-bangsa tersebut. Sejarah ke-Kristenan di Tanah Karo tercatat dimulai dari badan Zending Belanda NZG mengirimkan misionarisnya H.C. Kruyt ditemani Nicolas Pontoh dari Tomohon, yang menginjakkan kakinya pertama sekali pada tanggal 18 April 1890. Sementara menurut catatan Netscher (1864:342-343), disebutkan suku [Karo] yang berada di dataran tinggi hampir tidak pernah berhubungan dengan orang Eropa.

“Suku-suku Batak ini, terutama yang berada di dataran tinggi, hampir tidak pernah berhubungan dengan orang Eropa. Saya memiliki kesempatan untuk mengamati reaksi beberapa orang Batak dari Sebalengga [Lingga] dan Gunung Raya saat mereka pertama kali bertemu dengan orang Eropa. Ketika saya berada di Deli pada Februari 1863, dua kepala suku terkemuka datang dengan sekitar 500

pengikut dari suku-suku tersebut. Saya mengundang mereka untuk mengunjungi kapal uap milik Kerajaan Belanda, Haarlemmermeer. Mereka menerima undangan tersebut, dan saya belum pernah melihat ekspresi keheranan sebesar itu ketika mereka menyaksikan meriam-meriam besar, ruang mesin, dan awak kapal bersenjata yang terdiri dari orang Eropa dalam jumlah banyak”.⁸

Apa yang dikemukakan di atas adalah sebagian yang secara lugas dapat kita analisis relasinya sekaligus memberikan arahan pentingnya penelusuran yang lebih mendalam. Unsur-unsur kebudayaan lain seperti pengetahuan tradisional kemaritiman, arsitektur, kosmologi, sistem peralatan hidup, adat istiadat, ritus dan upacara, permainan rakyat, oleh raga tradisional, tentunya masih dapat kita jadikan sebagai bahan analisis. Namun sejauh ini say melihat relasinya memang ada disebabkan karena pertemuan budaya yang tidak bisa dihindarkan. Namun apakah kerajaan Aru itu Karo, saya belum dapat menyimpulkan. Jika Kerajaan Aru seperti digambarkan sebagai sebuah Kerajaan maritim yang kuat maka memori kolektif masyarakat Karo saat ini seharusnya banyak tradisi-tradisi lisan yang berkaitan dengan kelautan, cerita-cerita epos, pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan budaya kosmologi maritim, meskipun masyarakat Karo dewasa ini secara umum tidak bertempat tinggal di daerah pesisir. Pires (2005) misalnya mengatakan bahwa musuh bebuyutan Aru itu adalah Malaka, ini jelas-jelas ada relasinya dengan lautan, karena Sumatera dengan Malaka dibatasi oleh lautan. Keahlian di wilayah perairan pasti meninggalkan cerita-cerita tentang nenek moyangnya sebagai pelaut. Bahkan Pires mengatakan bahwa mata pencaharian orang Aru itu adalah merampok. Mungkin saja ada pengetahuan itu, namun saat ini sudah hilang, atau memang tidak ada

⁸ Meskipun laporan-laporan seperti ini atau laporan serupa dari tokoh lain sifatnya sangat subjektif melihat sebuah situasi yang ia temukan, namun setidaknya dapat memberikan informasi yang dapat sebagai bahan dinalalisis.

sama sekali. Justru itu masih membutuhkan kajian yang lebih komprehensif.

Kedepan dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan perluasan sumber-sumber informasi dari kisah-kisah perjalanan yang ada yang dilakukan oleh bangsa luar, maupun temuan-temuan arkeologi yang masih membutuhkan langkah-langkah yang tepat dan terukur. Mungkin saja melakukan ekskavasi di lokasi-lokasi yang disebutkan di awal di mana Kerajaan Aru tersebut. Hasil-hasil riset yang ada hingga saat ini perlu dilakukan pendalaman dan kelanjutan dengan berbagai disiplin ilmu dalam sebuah Konsorsium Aru. Artinya untuk melakukannya agar bekerja secara tim dengan masing-masing kepakarannya, sehingga bisa saling melengkapi.

2. Saran Tindak Lanjut

Kembali kepada permasalahan yang disebutkan awal, yaitu bagaimana relasi Kerajaan Aru dengan Karo? Apakah Kerajaan Aru itu Karo? Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Kerajaan Aru merupakan Kerajaan Melayu yang amat besar pada zamannya. Akan tetapi, Daniel Perret dalam buku "Kolonialisme dan Etnisitas" (2010), yang merujuk pada R. Djajadiningrat dalam buku "Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek" (1934), mengatakan bahwa dalam bahasa Aceh "Haro" atau "Karu" berarti suasana bergejolak dan rusuh di sebuah wilayah. Sementara Putro (1981:39) telah dijelaskan bahwa kata Karo itu berasal dari kata Haro, Haru, Karau, Harau, Aru, namun ini menurut saya masih perlu diperdalam. Menurut Putro kata Haru atau Aru berasal dari Bahasa Karo tua yang sampai saat ini masih hidup dalam Bahasa Karo dan Pakpak yang artinya khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Bangsa Proto Malay (Melayu Tua) yang berdiam di dataran renda Pantai Sumatera Timur merasa khawatir dan sangsi terhadap imigran-imigran ras Deutro Malay (Melayu Muda) dan melarikan diri ke pedalaman, yaitu Lokasi-lokasi yang didiami masyarakat Karo saat ini.

Dari perspektif kebudayaan dengan analisis wacana dari berbagai referensi yang ada, serta catatan dari China, Arab, Eropah dan lokal yang tersedia dan beberapa hasil riset yang telah dilakukan, masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang lebih spesifik seperti sejarah, arkeologi, filologi, antropologi, bahasa, kekerabatan bahasa, bahkan kajian perdagangan dan ekonominya, termasuk mengkaji relasi komoditas dengan kewilayahan yang disebutkan dalam berbagai referensi, apakah komoditas-komoditas yang disebutkan misalnya kemenyan, kapur barus, padi kecil tersebut secara historis memang ditemukan di daerah Karo. Informasi-informasi kecil pun perlu didata secara menyeluruh seperti epigrafi, pecahan keramik, makam, dan obyek pemajuan kebudayaannya dapat membantu dan menjelaskan secara ilmiah tentang Kerajaan Aru, terutama untuk menjawab apakah Aru itu Karo.

Sebagai langkah tindak lanjut saya menyarankan pertama, beberapa hal yang perlu dilakukan misalnya memperdalam dan memperbanyak literatur sebagai sumber sejarah disamping memperdalam catatan sejarah seperti Pararaton, Nagarakertagama, dan Sulalatus Salatin, yang menyebutkan Kerajaan Aru sebagai kekuatan besar di Sumatra; Mengkaji laporan dari penjelajah seperti Tomé Pires, yang menggambarkan Aru sebagai kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Selat Malaka; Mengkaji temuan-temuan naskah kuno yang ada – filologi – Aksara Karo.

Kedua, selain sumber literatur yang tak kalah pentingnya adalah melakukan lebih luas lagi penelitian arkeologi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi situs-situs yang diduga sebagai peninggalan Kerajaan Aru, seperti Benteng Putri Hijau dan Kota Rantang di Deli Serdang; melakukan ekskavasi untuk menemukan artefak yang dapat memberikan petunjuk tentang kehidupan masyarakat Aru; Analisis linguisistik dan kekerabatan budaya; meneliti bahasa/aksara yang digunakan di wilayah Kerajaan

Aru dan membandingkannya dengan bahasa Karo serta bahasa Melayu Kuno; mengidentifikasi pola kekerabatan dan sistem sosial yang mungkin menunjukkan hubungan antara masyarakat Aru dan Karo; Difusi – Polygenesis – Monogenesis [artefak] – Asimilasi – akulturasi – akomodasi.

Ketiga, selain sumber literatur, perlu juga didukung oleh obyek pemajuan kebudayaan dengan melakukan kajian etnografi, tradisi lisan dan seluruh pengetahuan tradisionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan cerita rakyat dan tradisi lisan dari masyarakat Karo yang mungkin memiliki hubungan dengan Kerajaan Aru (Turi-turin Putri Hijau, *Kuda Si Tajur*, dll) – dan berbagai *memory collective* yang ada saat ini; meneliti sistem *merga* (*clan*) dan struktur sosial masyarakat Karo untuk melihat apakah ada kesinambungan dengan struktur kerajaan, dengan Cina, Melayu, India, atau bahkan dengan bangsa Eropa lainnya, dan bagaimana hubungannya dengan Karo.

Keempat, analisis ekonomi perdagangan mala lalu, dengan melihat komoditi-komiti yang disampaikan dalam catatan perjalanan beberapa tokoh. Apakah komoditi-komoditi tersebut identik dengan masyarakat Karo, atau mungkin terjadi perubahan atau hilangnya komoditas tersebut; perlu mengkaji pola perdagangan Kerajaan Aru, terutama dalam komoditas seperti kamper, kemenyan, kapur barus, beras, dan madu, yang menjadi produk utama kerajaan; menelusuri jalur perdagangan yang digunakan oleh Aru dan bagaimana kerajaan ini berinteraksi dengan dunia luar, seperti temuan keramik yang biasanya berasal dari Cina.

Kelima, perlunya rekonstruksi geografis dan ekologis. Memang ini bukan pekerjaan gampang karena harus menggunakan peta sejarah dan data geospasial untuk menentukan lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Aru; meneliti perubahan lanskap yang mungkin mempengaruhi keberadaan kerajaan ini. Ini semua harus didukung oleh disiplin ilmu yang mumpuni di bidannya. Jika ingin secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka

pekerjaan ini membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, komitmen, kejujuran ilmiah, dan dukungan dana yang signifikan.

Penutup

Mengungkapkan relasi Kerajaan Aru (yang pernah berjaya di wilayah pesisir timur Sumatra, terutama di daerah Deli Serdang dan sekitarnya) dengan Karo Hubungan antara Kerajaan Aru dengan masyarakat Karo (yang umumnya mendiami daerah dataran tinggi di Sumatra Utara) dari perspektif budaya memiliki beberapa dimensi penting. Walaupun bukti tertulis secara rinci tidak banyak maupun kajian berdasarkan obyek kebudayaan dan peninggalan artefak, beberapa poin bisa menggambarkan hubungan mereka secara kultural. Untuk melihat lebih mendalam relasinya, maka diperlukan penelitian lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan dukungan dana.

Keraton/Kesultanan/Kerajaan Aru memiliki peran, kontribusi dan sejarah yang sangat penting dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pendorong nasionalisme, warisan sistem politik, diplomasi, pelestarian kebudayaan dan pengembangan ekonomi. Nilai-nilai Sejarah dan budaya Kerajaan Aru secara sistematis dan berkelanjutan perlu terus digali, dipelajari, dan diaktualisasikan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan, sekaligus memperkuat identitas atau jati diri untuk penguatan karakter bangsa.

Referensi

- Aditya, Rendy. 2017. *Pola Melodi Kulcapi Pada Lagu Turi-Turien Penganjak Kuda Sitajur Dan Pemaknaannya Pada Masyarakat Karo*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Anderson, John. 1976. *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Balandier, George. 1967. *Political anthropology*. Harmondsworth, UK.: Penguin Books.
- Beaulieu, Augustin De. 1666. The tyranni of Iskandar Muda. Dalam Melchisedech Thevenot (ed.). *Relations de Divers voyages curieux*. Paris: Cramoisy.

- Brown, C.C. 1970. *Sejarah Melayu or Malay Annals*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia Historical Reprints.
- Callenfels, P.V. van Stein. 1924. De Batu kemang. *Oudheidkundig Verslag uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, 3-4; 134-138.
- Cogan, Henry. 2020. *The voyages and adventures of Ferdinand Mendez Pinto, the Portuguese*. London: Alpha Edition (versi Bahasa Inggris terbit pertama pada 1692).
- Collet. O.J.A. 1925. *Terres et peuples de Sumatra*. Amsterdam: Elsevier. Cortesao, Armando (ed.). 1976. *The suma oriental of Tome Pires*. The Book of Francisco Rodrigues.
- Husny, Tengku Lah. 1978. *Lintasan sejarah peradaban dan budaya penduduk Melayu pesisir Deli Sumatra Timur, 1612-1950*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kasim, Razali., dan M.O. 2009. Parlindungan. *Kemajemukan Kumpulan Kisah Putri Hijau di Sumatera Utara*, Lubuk Pakam: Pemkab Deli Serdang.
- McKinnon, Edmund E., dan Sinar, Lukman. 1978. A note on Pulau Kompei in Aru Bay, Northeastern Sumatra. *Indonesia*, 26: 47-73.
- McKinnon, Edmund E. 1984. *Kota Cina: Its context and meaning in the trade of Southeast Asia in the twelfth to fourteenth centuries*. Ph.D diss. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- McKinnon, Edmund E. 2009 Ceramics, cloth, iron and salt: Coastal hinterland interaction in the Karo region of Northeastern Sumatra. Dalam D. Bonatz., J.
- Milner, Anthony C., McKinnon, Edmund E., dan Sinar, Lukman. 1978. "A note on Aru and Kota Cina. Indonesia", Cornell University Press. diakses, 27 April 2025.
- Miksic, John. 1979. *Archaeology, trade and society in Northeast Sumatra*. Ph. D diss. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- Oktavilyana, Sabrina, Lila Pelita Hati, dan Lestari Dara Cinta Utami. 2023. "Peranan Legenda Putri Hijau Di Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo dalam

- Penulisan Sejarah Lokal." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2.9 (2023): 1315-1322.
- Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme dan etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO Jakarta.
- Pigeaud, Theodore G. Th. 1960. *Java in the 14th century: A study in cultural history, the Nagara-Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D.* The Hague: Martinus Nijhoff.
- Pires, Tomé. 2005. "The Suma Oriental of Tomé Pires". Dalam Cortesão. Armando (ed.). Vol. 1. New Delhi: Asian Educational Services.
- Polo, Marco. 1958. *Cannibals and kings, Northern Sumatra in the 1290s: The travels of Marco Polo*. Harmondsworth: Penguins Books.
- Putro, Brahma. 1981. *Karo Dari Zaman Ke Zaman*. Medan: CV. Ulih Saber.
- Reid, Anthony. 1995a. *Witnesses to Sumatra: A Travellers Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Reid, Anthony. 1995b. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan hancurnya Kerajaan tradisional di Sumatra*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Reid, Anthony. 2009. Is there a Batak History? Dalam D. Bonatz., J. Miksic., J.D. Neidel., dan M.L. Tjoa-Bonatz (eds.), *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra* (hlm. 104-119). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.
- Sinar, Lukman. 1971. *Sari Sejarah Serdang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Sinar, Lukman. 1990. *Pengantar Etnomusikologi dan Tarian Melayu*. Medan: Perwira.
- Sinar, Lukman. 2006. *Bangun dan runtuhnya kerajaan Melayu Sumatra Timur*. Medan. Yayasan Kesultanan Serdang.
- Soedewo, Ery. 2015. Manik-manik kaca salah satu indikator kejayaan dan keruntuhan perniagaan Pulau Kampai. *Kalpataru*, 24(2): 137.

Bagian V

Kerajaan H(Aru) dan Keterkaitan dengan Peradaban Karo

Martin L. Peranginangin¹

¹Redaktur Tabloid Sora Mido

Pendahuluan

Kerajaan Haru merupakan kerajaan yang besar yang tercatat eksis antara abad 13 hingga abad ke 16. Di masa jayanya wilayah kerajaan meliputi Tamiang hingga Rokan. Sebagai kerajaan maritim kerap kali berperang sehingga pusat kerajaan sering berpindah-pindah. Dan barang tentu wilayah kekuasaan dari kerajaan Haru juga berubah, tidak selamanya antara Tamiang dan Rokan. Lalu, melihat peta wilayah kerajaan Haru tentu timbul pertanyaan, apakah Haru itu Karo? Bukankah suku-suku antara Aceh Tamiang hingga Rokan (Riau) bukan lagi suku Karo? Terdapat banyak suku-suku mendiami wilayah tersebut terutama Melayu, Simalungun, Batak Toba dan lainnya selain Karo.

Melihat Haru di masa silam tentu kurang tepat dengan memakai data kondisi masa kini. Dari sisi demografi sudah beragam suku yang mendiami wilayah tersebut dan kita harus membatasi ruang dan waktu ketika Haru saat dicatat keberadaannya.

Letak Geografi

Penjelajah Tiongkok laksamana Ceng Ho pernah mengunjungi Haru di pantai timur Sumatera di abad XIII (1282). Demikian juga pengelana Portugis Tome Pires juga mencatat tentang keberadaan Haru bangsa yang memiliki kekuatan maritim yang kuat. Dan kekuatannya diperhitungkan menjadi pengendali perdagangan di selat Malaka. Haru juga dicatat sebagai penghasil rempah-rempah yang baik. Pinto mencatat keberadaan Haru berada di Puneticao (lau Petani, bahasa Karo) yang masih ada

sampai saat ini, meski di hilir sekarang dinamakan sungai Deli. Hingga saat ini warga di sepanjang hulu sungai Petani umumnya berprofesi sebagai petani, terutama tanaman keras (Sora Sirulo). Hulu sungai Petani di Sibolangit hingga Delitua masih dinamakan lau Petani.

Kerajaan Haru, Aru, Aaru atau Harw disebut kerajaan Hindu, seperti ditulis dalam beberapa literatur seperti ditulis Brahma Putro Mangaraja Onggang Parlindungan (MOP) Siregar, Batara Sangti. Haru Wampu adalah Kerajaan Batak (Karo) yang menganut Hindu menurut Brahma Putro, rajanya Raja Mbelin Kembaren. Raja pertama Haru bernama Pa Lagan dan ratu terakhir bernama Seh Ngenana beru Sembiring Meliala. (Karo dari Zaman ke Zaman).

Namun ada juga yang menyebut raja Haru telah menganut Islam. Hal ini dikarenakan pengaruh dari hubungan dengan kesultanan Johor. Dalam riwayatnya, Haru kerap sekali diserang kerajaan lain, sebut saja kesultanan Malaka, Majapahit dalam kisah Pararaton, Sriwijaya dan lainnya. Armando Cortesao terhadap Suma Oriental (2018), dikatakan bahwa Kerajaan Aru gemar sekali berperang dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya.

Kesultanan Aceh juga sampai tiga kali menganeksasi Haru (DR. Suprayitno). Haru terlalu kuat untuk ditaklukkan, hingga pada akhirnya, menurut catatan Ahmad Dahlan Ph.D dalam bukunya Sejarah Melayu, pada tahun 1539 di masa Aceh di bawah pemerintahan Sultan Alaidin Rayat Syah Al-Kahar, Aceh menyerang kerajaan Haru dengan armada 160 kapal dan tentara sejumlah 12.000 orang dibantu oleh beberapa penasihat perang dan tentara bayaran dari Turki, India, Persia dan Venesia. Haru takluk, raja Haru Ali Boncar terbunuh. Kekuasaannya digantikan ratu Seh Ngenana Sembiring (Ame Sinik, Enche Sinni (bhs Melayu). Literatur menulis tujuan Aceh menyerang Haru yakni hendak mengislamkan Haru dan merebut ratu Haru menjadi permaisuri (Baca riwayat Hamparan Perak dan kisah Putri Hijau) yang melegenda di Karo, Melayu dan juga Aceh. Ratu Haru kemudian meminta bala bantuan ke Sultan Johor, Johor bersedia membantu dengan syarat ratu Haru bersedia menjadi

permasisirinya. Aceh akhirnya bisa dipukul mundur dari pusat Kerajaan Haru yang terakhir di Delitua.

Kerajaan Haru yang kita lihat dari kondisi geografis yang tentu sangat strategis menjadi pemain penting dalam perniagaan di Selat Malaka. Bahkan disebut Haru merupakan perompak dan bajak laut yang ganas. Letak pusat Kerajaan Haru berada di pesisir, pernah di Teluk Aru di Langkat pernah juga di Labuan, Sumatera Timur. Hal ini mendorong saya menarik kesimpulan Kerajaan Haru sering terjadi peperangan dengan kerajaan/bangsa lain, dan berakibat pusat kerajaan berpindah-pindah.

Situs kota Cina yang oleh Milner dihubungkan dengan Kerajaan Aru atau Haru menunjukkan kebangkitan kerajaan ini setelah lemahnya pengaruh Sriwijaya. Letaknya berada di antara sungai Belawan dan Sungai Deli yang bermuara di Selat Malaka. Dari temuan arkeologis di situs itu, diduga kontak dagang dan budaya telah berkembang sejak abad ke-11. Pasca Sriwijaya diserang Kerajaan Chola pada 1025, semua wilayah bawahannya di Sumatra bagian utara dan semenanjung Malaya semakin aktif dalam perniagaan intrnasional. Ini dikatakan Ery Soedewo, peneliti Balai Arkeologi Sumatra Utara dalam “Manik-Manik Kaca Salah Satu Indikator Kejayaan dan Keruntuhan Perniagaan Pulau Kampai” yang terbit di jurnal Kalpataru, Vol. 24 No. 2 (2015).

Bukti arkeologis itu menunjukan kemakmuran dan pengaruh terbesar kerajaan Aru atau Haru terjadi sejak pertengahan abad ke-12 hingga ke-14. “Pada saat kapal Dinasti Sung berdagang dengan Sriwijaya, tepat sebelum Aru menarik perhatian Kubilai Khan” lanjut Milner. Kemasyuran Kerajaan Haru di abad ke-16 secara panjang lebar dijabarkan Fernão Mendez Pinto dalam Peregrinação yang terbit pada abad ke-17. Demikian juga buku Suma Oriental yang ditulis Tome Pires yang lebih dahulu menyebut tentang Aru walau lebih singkat daripada Pinto. Jatuh banggunnya Kerajaan Huru berdampak pula terhadap pusat pemerintahan yang tidak berada di suatu tempat. Jeja-jejak Kerajaan Haru dapat kemudian di teliti sebagai bukti arkeologis. Teluk Aru, Haru Wampu, Kot Rintang, Labuan, Hamparan Perak, Delitua dan tempat-tempat lainnya yang masih perlu di dalam.

Edmund Edwards McKinnon telah melakukan kajian arkeologis di situs benteng Putri Hijau di Delitua sebagai bekas jejak Kerajaan Haru.

Pembesar Kerajaan Haru

Untuk melihat lebih jauh keterkaitan Kerajaan Haru dan peradaban Karo tentu harus juga melihat siapa yang menjadi pembesar atau raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Haru. Minim literatur yang menuliskannya. Namun Brahma Putro dalam buku Karo dari Zaman ke Zaman menyebut raja Haru yang pertama yakni Pa Lagan. Nama ini berbau bahasa Karo, meski perlu dikaji lebih jauh secara ilmiah mengenai riwayat Pa Lagan ini. Sebutan 'Pa' itu identik dengan julukan atau sapaan dimasyarakat Karo. Pa berarti bapak, bapa, atau pak. Sebut saja Pa Timpus, Pa Mbelgah, Pa Pelia, Pa Tolong yang sangat populer di masa lalu. Sebutan orang tua bukan nama asli, namun nama panggilan yang melekat pada dirinya. Adalah tabu menyebut nama orang tua bagi orang yang usianya lebih muda. Itu tradisi di masyarakat Karo, sehingga nama panggilan kerap sekali disebut nama anaknya yang paling tua. Misalnya bapa Ame, bapa Corah, bapa Jilena dst. Bapa itu mengacu pada Pa itu tadi, jadi nama sebenarnya sering kali tidak diketahui orang.

Selain nama Pa Lagan, ada nama Raja Mbelin Kembaren. Putro menulis bahwa ada kaitan pembesar dari Pagaruyung (Pustaka Alim Kembaren) dengan kerajaan Haru. Namun yang paling sering dicatat yakni raja terakhir Haru. Sementara dalam rentang masa Kerajaan Haru dari abad 13 sampai 16, terjadi pasang surut eksistensi kerajaan Haru, nama-nama pembesarnya juga sangat jarang dipublikasi. Barangkali terbatasnya sumber bacaan, atau terbatasnya catatan-catatan kerajaan masa lalu. Tulisan-tulisan tentang Haru justru lebih banyak ditulis oleh pengelana dari luar, seperti dari Portugis, Tiongkok, Prancis, Malaka dan Aceh dan kesultanan Melayu. Mungkin saja, karena kerajaan yang dikenal suka berperang dan pusat kerajaan berpindah-pindah membuat dokumen dan situs-situs tentang Haru minim terdokumentasi. Sisa-sisa keruntuhan Haru juga terabaikan setelah kekuasaan berpindah ke kesultanan Aceh, serta akhirnya

diteruskan kesultanan Deli. Jarak waktu antara abad 16 hingga saat ini keberadaan Haru pudar di bawah bayang-banyak kekuasaan baru.

Nama-nama pembesar Haru dicatat oleh Roy Fachraby Ginting tidak konsisten dan terput-putus. Mengikuti pasan-surut eksistensi Haru, seperti berikut

- Raja Serbanyanan tahun 1225 – 1255
- Raja Kembat tahun 1255 - 1292 □ Sultan Husin tahun 1410 – 1456 □ Sultan Mansyur Syah tahun 1456 – 1477 □ Sultan Ali Boncar tahun 1477 – 1500
- Ratu Enche Sinni (Seh Ngenana Sembiring; Brahma Putro) tahun 1538 – 1564
- Sultan Abdulah bin Alaudin dari Aceh tahun 1564 – 1599
- Kesultanan Deli berdiri tahun 1632 Gocah Pahlawan sultan pertama dengan mempersunting Nang Beluan beru Surbak adik raja urung Sunggal.

Mengamatir riwayat pembesar-pembesar dari Kerajaan Haru dari awal hingga ratu terakhir bahwa ada dua arus peradaban yang berkembang di masa keajaan ini yakni Karo dan Melayu. Awal mula titiperadaban Karo namun ada pengaruh Islam (Melayu). Sisa-sisa keruntuhan kerajaan Haru di Delitua meninggalkan situs Benteng Putri Hijau, Pancur Gading di Delitua diyakini tempat pemandian dari Putri Hijau, demikian juga di Sukanalu dan Seberaya terdapat situs pemujaan Putri Hijau yang masih dalam peradaban Hindu atau agama Pemena Karo. Seberaya menurut Putro merupakan awal peradaban Hindu Karo. Seberaya adalah asal dari Putri Hijau (Seh Ngenana beru Sembiring Meliala) dan Seberaya merupakan kampung mula-mula di dataran Tinggi Karo. Seberaya adalah dari asal kata Bahasa Karo, Sabe = Pemujaan dan Raya = agung dan besar. Tradisi-tradisi Hindu Karo (pemena) masih bisa dijumpai hingga sampai kolonial tiba di Sumatera Timur, seperti tradisi membakar mayat Bahkan agama Hindu Karo masih eksis sampai saat ini di desa Lau Rakit, Deli Serdang Hulu yang memiliki pure Persadanta. Sementara di Tanah Karo jumlah penganut agama Hindu semakin menurun drastis sejak berkembangnya agama Kristen setelah masuknya zending. Putro

menyebutkan Hindu Karo mulai bermukim di dataran tinggi Karo sekitar tahun 1331– 1365. Rentang waktu tersebut merupakan masa jeda kekuasaan kerajaan Haru. Terjadi migrasi dari dataran rendah ke dataran tinggi.

Ketika kolonial mulai menancapkan kekuasaan di Deli, suku Karo terjadi pembelaha. Karo gugung (dataran tinggi) menganut tradisi pemena kemudian didatangkan misionaris oleh colonial untuk mengkristenkan mereka. Sementara Karo Jahe semakin kental dengan budaya Melayu meski di beberapa tempat masih dijumpai orang Karo yang berbudaya Melayu. Seperti di daerah Bahorok, Langkat, daerah urung Senembah, Deli Serdang dan juga di Hamparan Perak, serta kota Medan. Di Urung Senembah kerap dijumpai menggunakan nama kebesaran Melayu “Wan” dan juga menggunakan merga Barus. Dari Urung Hamparan Perak masih menggunakan merga Pelawi. Sementara orang Karo di Langkat dengan resam Melayu umumnya mengaku keturunan dari Peranginangin.

Keruntuhan Haru dan Berdirinya Kesultanan Deli

Menurut Hikayat Deli menceritakan kisah kesultanan Deli yang didirikan oleh seorang raja India bernama Muhammad Dalik berlayar ke Nusantara dan kapalnya terdampar di dekat Kuala Pasai. Di saat itu ada kenduri besar di sana karena raja Pasai baru saja mangkat. Tidak lama kemudian ia pergi ke negeri Aceh karena kesultanan Aceh kesulitan menaklukkan 7 orang Rum yang mengacau negeri. Akhirnya Muhammad Dalik dapat membunuh satu per satu pengacau tersebut. Ia menyaru ke Aceh dengan memakai nama Lebai Hitam.

Atas jasanya menumpas pengacau tersebut, sultan Aceh mangganugrahan gelar Laksamana Kud Bintang dan mejabat sebagai Laksamana Aceh. Kemudian ia dapat lagi menaklukkan Gajah ‘Gandasuli’ sehingga dinaikkan lagi pangkatnya menjadi Gocah Pahlawan untuk mengepalai orang-orang besar Aceh dan raja-raja bekas taklukan Aceh. Setelah dapat menaklukkan semenanjung Malaka gelarnya menjadi Seri Paduka Pahlawan Laksamana Kud Bintang. Kemudian Gocah Pahlawan sebagai

panglima perang kesultanan Aceh juga dapat menaklukkan kerajaan Haru.

Karena istrinya difitnah mempunyai affair dengan Sultan Aceh, ia kemudian meninggalkan kesultanan Aceh dan membuka negeri baru di Sungai Lalang Percut. Kekuasaannya sebagai wakil sultan Aceh untuk wilayah bekas Kerajaan Haru dengan wilayah dari Tamiang sampai Sungai Rokan dengan misi:

- Menghancurkan sisa-sisa perlawanan pejuang Haru
- Mengembangkan misi Islam ke wilayah pedalaman
- Mengatur pemerintahan yang menjadi bagian dari kesultanan Aceh

Untuk memperkuat kedudukannya ia kemudian mempersunting adik raja urung Sunggal (Datuk Itam Surbakti) yang bernama Puteri Nang Beluan Beru Surbakti sekitar tahun 1632. Pada waktu itu wilayah urung Sunggal sampai ke pesisir. Karena perkawinan itu, wilayah pesisir diserahkan kepada Gocah Pahlawan selaku Anak Beru (pangambil dara). Dan urung Sunggal yang disebut Serbanyaman diangkat menjadi Ulun Jandi dari Gocah Pahlawan. Ulun Jandi dalam bahasa Karo bermakna hulu = awal, Jandi = perjanjian. Pada akhirnya, Gocah Pahlawan mendirikan kesultanan Deli dan lepas dari Aceh. Sehingga pihak Ulun Jandi selalu ikut serta dalam pelantikan sultan dalam suksesi di kesultanan Deli.

Dari peristiwa kisah dari Hikayat Deli dapat dicermati bahwa Gocah Pahlawan datang di wilayah barkekuasaannya, yang pada mulanya adalah wilayah kekuasaan Haru yang sudah memiliki merga Karo. Gocah Pahlawan merangkul kembali raja-raja urung berampat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada empat wilayah raja urung berampat sebelum terbentuknya kesultanan Deli.

Urung Berampat di Kesultanan Deli

Ada empat urung Karo setelah keruntuhan kerajaan Haru. Haru takluk oleh kesultanan Aceh, panglima Gocah Pahlawan kemudian mendirikan kesultanan Deli dan melepaskan diri dari Aceh. Empat urung itu dipimpin oleh suku bermarga Karo. Urung kemudian dirubah menjadi kedadukan sehingga terjadi

Melayunisasi terhadap suku Karo. Pada tahun 1728, masa Tuanku Pasutan para Raja Urung Empat Suku berubah nama menjadi Datuk Berempat atau Datuk Empat Suku. Kemudian pada masa pemerintahan Alauddin Mangedar tahun 1805, penguasa Deli yang semula bergelar Tuanku Panglima berubah menjadi bergelar Sultan. Kesultanan Deli yang berdiri sekarang adalah kelanjutan dari Kerajaan Haru Delitua dan Empat Kedadukan itupun masih terus berlanjut. Empat raja urung (datuk empat suku) di Deli yakni:

- Urung Serbanyaman di Sunggal dipimpin klan Surbakti
- Urung Sepuluh Dua Kuta, di Hamparan Perak dipimpin klan Pelawi
- Urung Sukapiring di Delitua dipimpin klan Sembiring dan Karosekali
- Urung Senembah di Patumbak/Tanjung Morawa dipimpin klan Barus.

Dengan demikian pemangku ulayat dari Deli merupakan ke empat datuk tersebut yang bersuku Karo. Dan Urung Serbanyaman menjadi Ulun Jandi mendapat kedudukan yang lebih istimewa karena menjadi Kalimbubu dari kesultanan Deli menurut tradisi suku Karo.

Ada perdebatan mengenai etnisitas mereka bahwa urung yg berubah menjadi kedadukan berarti telah berubah juga kesukuan mereka dari Karo menjadi Melayu. Namun, meski mereka sudah berbudaya Melayu dan menganut Islam mereka tetaplah orang Karo. Hal seperti itu ditegaskankan beberapa tokoh dari Melayu yg masih menganggap mereka sebagai orang Karo. Seperti halnya klan Barus di urung Senembah yg mengikrarkan diri tetap sebagai suku Karo, Klan Pelawi dari Hamparan Perak juga menyatakan hal demikian di saat acara merdang-merdem kota Medan.

Bagian VI

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Budaya Runggu pada Etnis Karo, Sumatera Utara

Junita Setiana Ginting^{1,2}, Edi Sumarno¹, M. Aziz Rizky Lubis¹, Penina Simanjuntak¹

¹ Program Studi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Jauh sebelum Republik Indonesia ini ada dan menggunakan demokrasi sebagai mekanisme sistem pemerintahannya, masyarakat di tingkat lokal sudah lebih dulu menggunakan model tersebut. Demokrasi yang ada pada tingkat lokal merupakan hasil dari proses yang sudah terjadi sejak lama, dan dilakukan secara terus menerus. Hasil dari proses tersebut kemudian menjadi satu kearifan lokal yang merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri, berdasarkan penyesuaian terhadap alam dan lingkungan tempat kemunculannya. Diskursus mengenai demokrasi pada suatu negara dan pelaksanaannya ditingkat masyarakat dewasa ini bukanlah hal baru bagi masyarakat yang berasal dari kelompok Etnis Karo. Dengan melaksanakan rungu, masyarakat tanpa sadar sudah ikut dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokratis pada komunitasnya sendiri. Praktik semacam ini tentu tidak hanya dibatasi pada sesama kelompok etnisnya saja. Dalam pada itu, hal ini juga dapat diberlakukan pada kelompok etnis lain dalam struktur sosial kemasyarakatan. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana kelompok masyarakat Etnis Karo menjadikan rungu sebagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang tanpa disadari sudah melaksanakan nilai-nilai demokratis secara modern. Pembahasan dimulai dari pelaksanaan rungu dalam berbagai kondisi permasalahan, serta rungu sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi dengan kearifan lokal.

Keywords: Runggu, Kearifan Lokal, Demokrasi

Pendahuluan

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat, dan "Kratia" yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, hal ini dapat diartikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat". Defenisi ini juga menunjukkan bahwa demokrasi merupakan hal yang menjunjung tinggi kebebasan, tanpa adanya perbedaan di dalamnya (Smith dan Zurcher, 1996).

Berbicara tentang demokrasi, sering sekali dihubungkan dengan tatanan kehidupan bernegara. Sejatinya, demokrasi juga terdapat pada setiap lapisan masyarakat, termasuk pada lapisan masyarakat tradisional yang diisi oleh etnis. Masyarakat tradisional yang hidup dalam situasi sederhana telah terhubung dengan konsep religi dan sistem kekerabatan yang kompleks. Kelompok masyarakat ini juga memiliki nilai-nilai demokrasi yang tercermin pada kehidupan budaya mereka, sebagai wujud dari gerakan demokrasi di tingkat desa. Hal ini karena pelaksanaan demokrasi menjadi syarat penting untuk desa sebagai satuan wilayah kecil yang menopang bagian dari wilayah negara (Umamur Ra'is, Deki, 2020,).

Salah satu kelompok masyarakat tradisional yang memiliki nilai-nilai demokrasi dalam adat dan budayanya adalah Etnis Karo. Etnis Karo merupakan kelompok etnis yang bermukim di dataran tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan. Terdapat dua gunung merapi yang dikenal dengan nama Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Pengaruh Lokasi yang terletak di dataran tinggi serta dikelilingi oleh pegunungan, wilayah ini sangat cocok untuk ditanami sayur dan buah-buahan. Oleh sebab itu, umumnya kelompok etnis ini bermatapencaharian sebagai petani.

Etnis Karo memiliki karakteristik yaitu Rakut Sitelu, Merga Silima, Tuter Siwaluh, Perkadekaden Sepuluh Dua Tambah Sada (12+1)., yang dijunjung tinggi sebagai identitas mereka. Selain karakteristik tersebut, Etnis Karo juga memiliki berbagai tradisi dan nilai budaya yang terhubung dengan alam maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Etnis Karo adalah Budaya "Runggu". Budaya Runggu dilaksanakan hampir dalam setiap aktifitas adat maupun yang berkaitan dengan interaksi kepada masyarakat. Budaya ini tetap berlangsung secara

berulang dalam kegiatan sosial dan kekerabatan, baik dalam suasana suka maupun duka.

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah, yang meliputi tahapan heuristic, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Data-data yang digunakan pada tulisan ini didapat dari hasil observasi atau pengamatan langsung ke wilayah Dataran Tinggi Karo, sebagai data dan gambaran awal mengenai pelaksanaan "runggu" tersebut. Untuk melengkapi data primer dan data sekunder, dilakukan studi pustaka untuk mencari buku dan jurnal yang sejalan dengan tulisan ini. Setelah data-data diperoleh, proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap data. Apabila data dianggap valid, tahapan selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan menuangkannya ke dalam tulisan yang berbentuk deskriptif naratif.

Hasil dan Pembahasan

Karo merupakan sebutan untuk salah satu etnis yang ada di Sumatera Utara. Kata "Karo" tidak hanya menjadi sebutan bagi penduduk asli yang menghuni Dataran Tinggi Karo. Lebih dari itu, kata ini juga digunakan pada nama kabupaten, sebagai representatif dari daerah asal Etnis Karo. Kelompok-kelompok etnik terbentuk karena adanya ciri yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri (Fredrik, 1998). Identitas Etnis Karo yaitu "merga" (disebut juga dengan "marga") merupakan kata yang dilekatkan pada akhir nama seseorang. Etnis Karo adalah kelompok masyarakat yang menganut sistem patrilineal, sehingga "merga" tersebut diperoleh dari garis keturunan ayahnya (laki-laki).

Terdapat lima merga pada Etnis Karo yaitu, Karo-karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, dan Tarigan. Kelima "merga" tersebut memiliki sub-merga-nya masing-masing. Namun semua sub-merga ini dikelompokkan kepada salah satu dari lima "merga" tersebut. Penyebutan merga selalu melekat pada anak laki-laki. Untuk anak perempuan, kata "merga diganti dengan kata beru.

Patrinalisme yang dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat Etnis Karo tidak menjadi penghalang untuk

menghargai peranan dan kedudukan seorang perempuan. Dalam hal ini, kelompok masyarakat Etnis Karo sangat menghargai peranan dan kedudukan seorang ibu. Penghargaan tersebut ditunjukkan dengan penyebutan kata bere atau bre. Bere merupakan sebutan yang diambil dari "beru" ibunya. Dengan demikian, seseorang yang berasal dari Etnis Karo ditempatkan dalam posisi identitas yang jelas. Hal ini karena identitas yang digunakan tidak hanya dari garis identitas ayah, tetapi garis identitas ibu juga digunakan. Identifikasi posisi identitas ini juga akan terhubung pada kedudukannya dalam adat dan kekerabatan (Setiana Ginting, 2012).

Identitas lainnya yang terdapat pada Etnis Karo yakni Rakut Sitelu. Secara terminologi, kata "rakut" dapat didefinisikan sebagai pengikat, sedangkan kata "sitelu" dapat diartikan sebagai tiga (3). Secara harfiah, "Rakut Sitelu" diartikan sebagai tiga unsur penting dalam struktur kekerabatan yang saling mengikat antara satu dengan yang lain. Ketiga struktur kekerabatan itu yakni, sukut, kalimbubu, dan anak beru.

"Sukut" adalah saudara yang segaris dari keluarga ayah. Dengan kata lain, mereka memiliki "merga" yang sama. Kata "sukut" dapat disebut juga dengan "sembuyak" atau "senina". Dalam pada itu, karena kedudukan perempuan pada Etnis Karo juga penting, maka senina juga dilekatkan pada orang yang memiliki bere-bere yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa, kedudukan laki-laki dan perempuan dipandang sama dan seimbang.

Kalimbubu merupakan pihak dari kerabat ibu ataupun istri. Secara harfiah, "kalimbubu" juga diartikan sebagai kelompok pemberi anak dara. Sebagai contoh misalnya, orang tua atau saudara laki-laki dari ibu, dan termasuk juga istri. Mereka merupakan jajaran peran dari kelompok yang harus dihormati. Sebagai unsur ketiga dari rakut sitelu, anak beru berperan sebagai kelompok penerima anak dara. Secara harfiah, "kalimbubu" diartikan sebagai kerabat perempuan dari ayah. Pihak yang menikahi saudara perempuan atau anak perempuan inilah yang disebut dengan "anak beru".

Status kekerabatan rakut sitelu akan didapatkan jika anggota kelompok Etnis Karo tersebut sudah berumah tangga. Namun, posisi tersebut bisa saja berubah, mengikuti tempat yang berbeda-beda. Meskipun posisi statusnya berubah, anggota kelompok Etnis Karo tersebut akan tetap menjalankan masing-masing peran yang harus dipatuhinya. Dalam masing-masing peran yang dijalankan pada situasi dan tempat yang berbeda tersebut, ada berbagai hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Status kekerabatan yang dimiliki oleh anggota kelompok Etnis Karo akan mempengaruhi cara bertutur dalam sistem kekerabatan. Tutur merupakan cara menyapa berdasarkan kekerabatan yang ditentukan secara adat. Melalui tutur atau sapaan, seseorang akan dengan mudah mengetahui kedudukan dan hubungan antar sesama anggota kelompok dari Etnis Karo. Pada kelompok masyarakat Etnis Karo, hubungan kekerabatan tersebut akan diidentifikasi berdasarkan perkade-kaden. "Perkade-kaden" merupakan hubungan kekerabatan yang di dasarkan pada bagaimana seseorang memiliki keterkaitan secara adat. Kaitan tersebut bisa ditarik dari garis keturunan ayah maupun ibu, atau melalui perkawinan. Kedudukan ini juga berlaku dalam hubungan persahabatan atau relasi sosial lainnya.

Pelaksanaan Runggu pada Pesta Adat Pernikahan

Adat dan budaya tidak pernah lepas dari kelompok masyarakat Etnis Karo, terlebih lagi ketika melalui dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan seperti lahir, meninggal, hingga penyelesaian konflik, selalu dilaksanakan melalui proses Runggu. "Runggu" adalah aktifitas dalam bentuk musyawarah, untuk mencapai suatu mufakat, yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam mufakat ini, seluruh peserta yang terlibat secara sukarela menerima segala bentuk hasil yang telah disepakati secara bersama, tanpa ada yang merasa dirugikan atau dikecewakan. Segala bentuk kegiatan, baik dari perencanaan, saat pelaksanaan, bahkan akhir dari kegiatan adat selalu terkait dengan hasil rungu.

Ketika rungu akan dilaksanakan, maka hal utama yang harus dipenuhi adalah kehadiran ketiga unsur dari rakut sitelu. Jika

salah satu dari tiga unsur tersebut belum hadir, maka rungu tidak dapat dimulai, bahkan bisa ditunda apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut berhalangan hadir. Pelaksanaan rungu dimaknai atas dasar asas kepentingan bersama. Dengan kata lain, suatu acara ataupun penyelesaian konflik yang dilakukan merupakan milik semua orang yang disebut dengan kerabat.

Unsur pada rakut sitelu akan memiliki peran serta tanggung jawabnya masing-masing pada kegiatan rungu dan ditentukan pada kedudukan yang dimiliki. Hasil dari rungu tersebut, harus diterima oleh semua unsur pada rakut sitelu dengan senang hati. Pada saat acara pesta pernikahan misalnya, kedua calon mempelai terlebih dahulu harus menyampaikan niat tersebut kepada keluarga masing-masing. Kedua keluarga inti dari calon mempelai biasanya akan berkenalan, untuk menyambung tali silaturahmi terlebih dahulu.

Perkenalan keluarga inti ini bertujuan untuk saling mengenal antara keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan, sehingga terbangun perasaan saling terhubung antara dua keluarga yang akan berkaitan satu sama lain. Ketika perkenalan antar sesama keluarga inti telah terlaksana, maka masuklah ke fase yang melibatkan kerabat yang berasal dari ketiga unsur dalam rakut sitelu. Pada fase ini, ketiga unsur dalam rakut sitelu akan melaksanakan rungu terlebih dahulu. Dalam proses rungu, ketiga unsur akan membicarakan segala hal yang dianggap perlu dalam acara pernikahan yang direncanakan, mulai dari konsep acara, tempat, waktu, barang keperluan adat, konsumsi selama acara, hingga pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Biasanya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan acara pesta pernikahan tersebut adalah unsur anak beru, sedangkan unsur kalimbubu juga akan mempersiapkan sesuatu yang dapat dianggap sebagai hadiah.

Pelaksanaan rungu diawali dengan mempersilahkan duduk dari kedua belah pihak di atas tikar pandan putih, dengan posisi yang saling berhadap-hadapan. Seluruh anggota keluarga yang masuk ke dalam golongan "anak beru" akan duduk dibagian paling depan, dan salah satu laki-laki diantaranya akan bertindak sebagai juru bicara sekaligus moderator bagi keluarganya. Pada barisan

tersebut juga dihadiri oleh para ibu, yang telah siap memberikan pendapat dan pandangannya.

Pihak "sukut" dan "kalimbubu" akan duduk di belakang barisan "anak beru" secara berurut dan terpisah di atas amak mbentar (tikar pandan putih) yang telah disediakan. Setelah "anak beru" yang menjadi juru bicara sekaligus moderator (disebut juga dengan anak beru tua atau anak beru si ngercana) dari kedua belah pihak saling berkenalan, maka anak beru tua dari pihak perempuan akan menanyakan apa maksud dan tujuan dari rungu yang dilaksanakan ini.

Anak beru tua dari pihak laki-laki akan mengatakan untuk meminang sebagai jawaban. Para ibu dari golongan anak beru kemudian akan menyerahkan kampil kehamatenn. Kampil kehamatenn merupakan wadah yang terbuat dari pandan, pelepah pisang sirurus dan kain merah kurada sebagai bahan anyaman. Dalam proses ini, kampil yang diserahkan biasanya berjumlah enam. Jumlah tersebut di dasarkan pada jumlah pihak yang akan ditanya mengenai penentuan hari pelaksanaan pesta adat dari keluarga perempuan. Keenam pihak tersebut yakni, 1) tegun anak beru sinereh, 2) sukut, 3) kalimbubu singalo bere-bere, 4) kalimbubu singalo perkempun, 5) kalimbubu singalo perninin, 6) kalimbubu singalo ciken-ciken ras ulu emas.

Keenam kampil tersebut, masing-masing berisi sirih, kapur, tembakau, pinang dan gambir. Hanya dua kampil yang isinya berbeda, biasanya kampil ini diberikan kepada pihak sukut sinereh dan kalimbubu si ngalo ulu emas. Isi kampil ini kemudian akan ditambahkan dengan rokok. Setelah kampil diterima oleh pihak keluarga perempuan, isinya akan diambil dan kampil tersebut akan dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki. Runggu kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan seputar penerimaan lamaran oleh calon pengantin perempuan. Pertanyaan tersebut diberikan untuk mengetahui secara pasti dan mendalam, tentang alasan calon pengantin perempuan mau menerima lamaran dari calon pengantin laki-laki. Jika alasannya adalah karena sudah sesuai dengan hati nuraninya sendiri, maka pihak anak beru akan melanjutkan rungu dengan membahas hal-hal yang terkait dengan rencana pelaksanaan acara adat perkawinan.

Berbagai hal yang dibicarakan oleh anak beru dari kedua belah pihak dalam kegiatan rungu akan disampaikan kepada pihak sukut dan kalimbubu. Penyampaian ini bertujuan agar pihak sukut dan kalimbubu mengetahui berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pesta adat pernikahan. Dalam pada itu, anak beru dari masing-masing pihak juga berharap agar pihak sukut dan kalimbubu memberikan pendapat, baik bersifat menyetujui atau tidak menyetujui mengenai rencana tersebut. Hal semacam ini akan dilakukan secara terus menerus sampai tercapainya suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan. Apabila kesepakatan secara bersama sudah diperoleh, maka pelaksanaan rungu sudah bisa untuk diakhiri. Hasil dari rungu kemudian disampaikan kembali kepada seluruh keluarga atau kerabat yang berasal dari kedua belah pihak yang hadir. Penyampaian tersebut bertujuan agar semua anggota keluarga dapat mengetahui hasil rungu secara langsung. Hasil dari rungu tersebut bersifat mutlak untuk dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat.

Seperti halnya pelaksanaan rungu dalam acara suka, di dalam acara duka juga dilaksanakan. Keberadaan tiga struktur kekerabatan Karo itu tetap harus hadir. Hanya saja kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan berbeda sesuai dengan konteks acara.

Peran Rungu dalam Penyelesaian Konflik

Penggunaan rungu tidak hanya terbatas untuk memusyawarahkan sesuatu yang bersifat pertalian semata. Lebih dari itu, rungu juga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan suatu konflik. Konflik yang dapat diselesaikan melalui pelaksanaan rungu di antaranya yakni, konflik keluarga maupun, konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rungu sebagai wujud dari musyawarah mufakat, mampu menjadi penengah yang ampuh pada berbagai jenis situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Hubungan keluarga tidak selalu terjalin dengan harmonis. Perselisihan dan konflik bisa saja terjadi, bahkan pada situasi yang tidak direncanakan. Salah satu perselisihan dan konflik yang bisa saja terjadi pada keluarga adalah disebabkan oleh perebutan hak

waris. Terlebih lagi, jika kedua orang tua pada suatu keluarga sudah meninggal dunia, namun tidak memberikan wasiat atau semacam kesepakatan antar anggota keluarga. Situasi ini tentu akan menjadi pemicu perselisihan dan konflik pada suatu keluarga, karena besarnya kekhawatiran akan adanya ketidakadilan saat pembagian harta waris.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, rungu dapat diajukan oleh para ahli waris dengan mendatangkan pihak sukut, kalimbubu, dan anak beru. Dalam pelaksanaannya, ketiga unsur dalam rakut sitelu tersebut terlebih dahulu harus mendata barang-barang yang akan dibicarakan secara bersama dalam pembagian harta warisan, begitu juga dengan pihak mana saja yang akan menerima hak waris. Anak beru, sebagai juru bicara sekaligus moderator dalam pelaksanaan rungu, akan bertanya tentang apakah ada kesepakatan yang sudah dilakukan antar sesama ahli waris. Jika tidak ada kesepakatan, maka akan ditanya bagaimana kemauan dari para ahli waris tersebut.

Para ahli waris diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Namun, semua pendapat tersebut tidak akan dibenarkan antara satu dengan yang lain. Ketika terjadi ketegangan suasana sebagai akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan, maka sukut dan kalimbubu sebagai pihak yang paling dihormati akan memberikan pendapat yang kemudian diiringi dengan nasihat. Lebih dari itu, tidak jarang jika pihak sukut dan kalimbubu bersikap tegas, hanya karena adanya individu yang keras kepala dan tidak menghargai orang lain. Dalam situasi ini, biasanya individu tersebut akan tertunduk malu dan diam. Suasana yang awalnya menegang, tidak jarang kemudian berubah menjadi haru karena air mata yang mengalir dari setiap untaian pendapat dan nasihat yang disampaikan oleh pihak kalimbubu. Kesedihan tersebut muncul karena adanya ketidakinginan pihak kalimbubu melihat salah satu dari bagian keluarganya terpecah hanya karena harta. Proses ini akan terus berlanjut, hingga seluruh ahli waris telah mencapai suatu kesepakatan bersama.

Berbagai jenis perbedaan yang terjadi di masyarakat mampu membentuk pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda ini juga akan selaras dengan pemikiran dan pendirian yang berbeda juga.

Adanya perbedaan pada variabel tersebut dapat berpotensi memicu konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik ini bisa saja terjadi antar sesama anggota kelompok etnis, berbeda kelompok etnis, bahkan jangkauan konflik dapat lebih besar dari itu.

Bagi masyarakat yang berasal dari kelompok Etnis Karo, rungu tidak hanya sebagai media untuk memecahkan permasalahan antar sesama anggota kelompok Etnis Karo. Dalam pada itu, rungu juga dipilih untuk menjadi sarana pemecahan suatu masalah yang terjadi antar anggota kelompok etnis lain, atau bahkan masyarakat umum. Dalam konflik yang terjadi dengan anggota kelompok etnis lain atau masyarakat umum, terjadi perbedaan formasi dalam susunan peserta rungu. Selain ketiga unsur dalam rakut sitelu, pengetua adat dan pemerintahan desa setempat harus turut hadir dan ikut sebagai peserta rungu. Mereka akan ikut duduk di atas tikar pandan putih dan akan menerima kampil yang berisi rokok, kapur, sirih, pinang, dan tembakau. Kampil tersebut disediakan oleh pihak yang dianggap bersalah.

Pihak yang berselisih memiliki juru bicara atau moderator yang berasal dari anak beru masing-masing. Jika tidak salah satunya tidak memiliki anak beru, salah satunya boleh memilih seseorang yang dianggap mampu secara adil dan bijaksana untuk menjadi moderator. Kedua pihak akan diberikan kesempatan untuk menceritakan secara detail kronologi yang menjadi penyebab konflik, beserta solusi yang ditawarkannya. Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan bisa saja dalam bentuk denda, hukuman, ataupun ganti rugi. Ketika ada pihak yang sedang menguraikan kronologi dan menawarkan solusi, pihak lain harus duduk diam dan mendengarkan secara seksama penjelasan tersebut. Jika suasana tidak rungu tidak kondusif, masing-masing juru bicara tidak akan segan-segan untuk menegur dan meminta untuk tetap sabar. Sikap ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah yang kondusif, agar tercapainya suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Runggu sebagai Perwujudan Nilai Demokrasi dengan Kearifan Lokal

Budaya yang ada pada etnis muncul sebagai ciri khas atau penanda bagi etnis itu sendiri (Barth,1988). Budaya sebagai ciri pada suatu etnis ini kemudian dibawa dalam kehidupan sosial, sehingga terjadi proses peleburan antara budaya dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Kuntowijoyo, 1987). Budaya yang masing-masing dibawa oleh masyarakat etnis, seperti rungu pada kelompok masyarakat yang berasal dari Etnis Karo dapat menyatukan kembali bagian dari struktur sosial masyarakat yang terpecah (Nugroho, 2013).

Kehidupan sosial masyarakat yang memiliki perbedaan dalam setiap aspek, akan rentan terhadap retaknya tatanan kehidupan sosial masyarakat. Permasalahan ini justru terjadi akibat lunturnya nilai-nilai kearifan lokal, sebagai bagian dari budaya masyarakat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi-generasi penerusnya. Memang sangat generik apabila budaya hanya dianggap sebagai suatu pedoman turun temurun yang tidak dapat diubah. Dalam pada itu, budaya sendiri bersifat lentur, sehingga mampu membentuk dirinya sendiri dalam berbagai rupa dinamis dan situasional (Adullah, dkk. Ed, 2008).

Berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, turut mengambil peran dalam konteks perubahan yang terjadi pada segala aspek di kehidupan masyarakat. Kearifan lokal sebagai jiwa dari budaya, secara otomatis akan ikut luntur bersamaan dengan pudar atau berubahnya budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dari hal tersebut, Kelompok Etnis Karo tetap mempertahankan kearifan lokal dan budaya yang dimilikinya meskipun zaman dan ilmu pengetahuan sudah berkembang.

Runggu menjadi kearifan lokal yang sangat berharga, karena memiliki nilai dan wujud yang ada pada demokrasi. Mereka yang memahami sistem pelaksanaan rungu secara tidak langsung tentu memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Padahal, rungu sendiri sudah ada sebelum demokrasi menjadi suatu diskursus tersendiri di masyarakat. Nilai-nilai demokrasi yang muncul dan dipraktekkan pada rungu yakni, penghargaan

atas kesamaan, penghargaan partisipasi dalam kehidupan bersama, penghargaan atas kebebasan, serta penghargaan atas perbedaan yang ada (Suryana, dkk, 2022: 22). Hal ini karena new sebagai bagian dari kearifan lokal merupakan suatu sub sistem yang mampu menentukan harkat dan martabat manusia (Geertz, 1992). Untuk menentukan harkat dan martabat manusia, tentu diperlukan sikap lapang dada yang harus ditunjukkan oleh setiap peserta rungu dalam menerima prinsip dan keyakinan orang lain. Sikap ini tentu harus dijalankan tanpa harus mengorbankan prinsip dan keyakinan dari individu-individu tersebut, sebagai peserta yang ikut dalam pelaksanaan rungu (Nisvilyah, 2013).

Musyawarah mufakat yang diwakilkan oleh ketiga unsur dalam rungu untuk menyelesaikan berbagai hal dalam kelompok Etnis Karo, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam hal berdemokrasi. Dalam pada itu, demokrasi Pancasila yang merupakan kristalisasi dari budaya masyarakat merupakan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rungu yang secara jelas melaksanakan landasan idil bangsa yakni Pancasila, khususnya sila ke-4,¹²

Ada banyak nilai-nilai demokratis yang dapat di lihat pada rungu. Runggu juga mengajarkan untuk tidak bersikap otoriter dan dominan kepada setiap pesertanya. Akan tetapi justru mengedepankan nilai-nilai demokrasi, dalam memberikan peluang kepada semua pihak yang terlibat dalam rungu untuk berpendapat, dan memberi masukan tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lain, berdasarkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing (Anugerah, Boy & Endiarta, 2018: 31).

Kesimpulan

Runggu dari awal pelaksanaan, hingga pada tahap akhir dianggap sebagai suatu proses yang harus dihormati. Hasil dari rungu berupa kesepakatan untuk kemaslahatan bersama dari semua pihak yang terlibat. Keputusan bersama yang lahir pada rungu menjadi dasar untuk bertindak dan menyikapi berbagai hal pada tahapan selanjutnya. Dalam pada itu, meskipun pemimpin musyawarah pada rungu berasal dari kaum laki-laki, kaum perempuan tetap diberikan kebebasan dan hak yang sama dalam

proses pelaksanaan runggu. Ini merupakan wujud dari persamaan dan hak dalam hak azasi manusia. Dengan demikian, tidak ada satu pihakpun yang akan merasa diabaikan.

Referensi

- Adullah, Irwan, dkk. Ed. 2008, Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anugerah, Boy & Junian Endiarta, Jacob, 2018, Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat, Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 34. Juni 2018.
- Barth, Fredrik, 1988, Kelompok Etnik dan Batasannya, Jakarta: UI Press.
- Barth, Fredrik, 1998, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, USA: Waveland Press.
- Geertz, C. (1992) "Kebudayaan dan Agama" Kanisius Press, Yogyakarta, 1992.
- Kuntowijoyo, 1987, Budaya dan Masyarakat, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga.
- Lely Nisvilyah, 2013, Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto), Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013.
- Nugroho, Heru, 2013, Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan, Dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No. 2, November: 3.
- Setiana Ginting, Junita, 2012, Perubahan Sosial Budaya Merdang Merdem Sebagai Tradisi Pada Masyarakat Karo, Medan: Bartong Jaya.
- Smith dan Zurcher, 1996, Dictionary of American Politics, Barnes and Nobls, INC.
- Suryana, Cecep, dkk., 2022, Demokrasi Politik Indonesia. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Umamur Ra'is, Deki, 2020, Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Volume 9, Nomor 1.

Bagian VII

Kolaborasi Multihelix dalam Menghadapi Risiko Bencana di Tanah Karo

Ernalem Bangun

Pendahuluan

Letak Kabupaten Karo secara geografis menyebabkan Tanah Karo dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Dua gunung mengapit Tanah Karo yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Bahkan saat ini keberadaan Gunung Sinabung dengan ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut berada dalam status Siaga level 3.

Tidak hanya ancaman munculnya gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Tanah Karo juga tidak luput dari ancaman banjir dan tanah longsor. Menipisnya hutan-hutan di Tanah Karo akibat eksploitasi hutan, kurangnya penataan drainasi, kurangnya penataan ruang untuk berbagai kebutuhan masyarakat menjadi penyebab munculnya bencana. Prilaku pembuat kebijakan dan prilaku masyarakat juga tidak dapat dipungkiri menjadi permasalahan yang perlu didiskusikan. Berbagai permasalahan kebencanaan di Tanah Karo seakan hanya perlu dibicarakan saat terjadi bencana. Berbagai tindakan yang dilakukan bersifat sesaat. Kebijakan yang diambil pihak pemerintah tidak sesuai dengan tahap-tahap yang seharusnya diikuti berdasarkan prinsip-prinsip manajemen bencana.

Dalam manajemen bencana, sesungguhnya tahap-tahap mulai dari kegiatan pencegahan sampai tahap pemulihan, bukanlah kegiatan yang terpisah, namun merupakan satu kesinambungan yang juga berjalan secara simultan. Jika ini dilakukan secara konsisten maka ancaman yang ada tidak

menjadi bencana. Dan jika pun terjadi bencana, dapat ditangani dengan dampak yang minim dan tidak berkepanjangan.

Tanah Karo mengalami bencana yang sangat populer yaitu erupsi Gunung Sinabung. Sejak meletus pada awal tahun 2010, dampaknya sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Wilayah relokasi yang tidak ditempati lagi, wilayah terdampak yang secara formal masih dalam tahap waspada namun sudah banyak yang diusahai kembali, baik sebagai wilayah pertanian, maupun sebagai usaha kegiatan pariwisata. Demikian rugi banyak masyarakat yang masih mengeluh belum mendapatkan ganti rugi, dan lain-lain.

Banjir juga tidak bisa tidak harus diperhitungkan di Tanah Karo. Banjir yang terjadi di Tanah Karo menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Jalan-jalan nasional akan banjir jika jalanan diguyur hujan lebih dari 1 jam. Kondisi jalan yang rusak, banyak berlubang-lubang di saat arus deras akibat banjir membuat kendaraan sering kali terperosok. Hal ini membuat arus lalu lintas macet, karena di sana-sini kendaraan menjadi terjebak mogok dan rusak. tidak jarang merenggut nyawa. Demikian pula longsor yang sangat berdampak pada kelancaran transportasi dari satu desa ke desa lain di Tanah Karo. Bahkan longsor yang terjadi di sepanjang jalan Medan Berastagi membawa dampak yang signifikan akan kehadiran para wisatawan yang hendak ke Berastagi dan sekitarnya

Bencana yang terjadi sangat merugikan kehidupan masyarakat Karo, khususnya di bidang ekonomi. Erupsi Gunung Sinabung yang belum dipastikan akan berakhir, membuat masyarakat tidak memiliki pegangan untuk bertindak secara yakin. Akhirnya mereka hanya berorientasi pada tindakan yang bersifat sementara. Erupsi yang terjadi membuat lahan pertanian tertutup oleh abu vulkanik sehingga merugikan para petani. Sering kali tanaman sudah akan dipanen, namun karena tertutup abu vulkanik, maka tanaman menjadi rusak, tidak dapat dipanen.

Pemda Kabupaten Karo memiliki perangkat untuk penanganan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pencegahan dan kesiapsiagaan bencana adalah hal yang sangat penting karena

merupakan bagian edukasi kepada masyarakat terkait tindakan pencegahan hingga revitalisasi ketika bencana yang kerap terjadi tanpa terprediksi. BPBD tidak akan dapat bekerja sendiri. Perlu kolaborasi antar unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, akademisi dan unsur-unsur lain yang terkait. Kami akan menjelaskan bagaimana peran dari masing-masing stake holder dalam menghadapi bencana, mulai dari tahap prabencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana.

Bencana dan permasalahannya

Bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU Nomor 24 Tahun 2007). Bencana juga didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap aktivitas di masyarakat yang menyebabkan kerugian luas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (International Strategy for Disaster Reduction, 2004)

Bencana disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya (Nurjanah *et.al.*, 2012):

- a. Bahaya (*Hazard*), merupakan suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Bahaya dikelompokkan menjadi 2 yaitu bahaya alami yang terdiri dari bahan geologi, hidrologi-meteorologi, biologi dan lingkungan. Sedangkan bahaya buatan manusia yang terdiri dari kegagalan teknologi, degradasi, lingkungan dan konflik.
- b. Kerentanan (*Vulnerability*), yaitu suatu kondisi dari suatu masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman

bahaya. Kerentanan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Kerentanan fisik, yaitu menggambarkan suatu kondisi fisik yang rawan terhadap faktor bahaya tertentu seperti persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, jaringan listrik, rasio panjang jalan dan jalan kereta api.
- 2) Kerentanan sosial, yaitu menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bencana seperti kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan persentase penduduk usia balita-lansia.
- 3) Kerentanan ekonomi, yaitu menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bencana seperti persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan dan persentase rumah tangga miskin.
- 4) Kerentanan lingkungan, yaitu menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan lingkungan dalam menghadapi bencana meliputi ketersediaan atau kerusakan sumber daya seperti lahan, udara dan air.

c. Risiko bencana (*Disaster Risk*)

Risiko bencana merupakan interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Secara umum bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana, baik alam maupun nonalam. Kerentanan menunjukkan kerawanan yang dihadapi suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman. Semakin tinggi bahaya dan kerentanan akan semakin besar resiko bencana yang dihadapi. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko bencana yaitu melalui penurunan tingkat kerentanan karena hal ini relative lebih mudah dibandingkan dengan mengurangi atau memperkecil bahaya, sosial dan lingkungan. Oleh karenanya, pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan mengurangi

kerentanan dan/atau meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman.

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dibedakan menjadi tiga tahap yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana (UU No. 24 Tahun 2007):

a. Tahap Pra Bencana

1) Pencegahan (*prevention*)

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya: Melarang pembakaran hutan dalam perladangan, Melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan Melarang membuang sampah sembarangan.

2) Mitigasi (*mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui: a) pelaksanaan penataan ruang; b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

3) Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana

melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain: a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e) penyiapan lokasi evakuasi; f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

4) Peringatan Dini (*early warning*)

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Pemberian peringatan dini harus dapat menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas /tidak membingungkan (*coherent*), dan bersifat resmi (*official*).

Tahap Saat Terjadi Bencana

1) Tanggap Darurat (*response*).

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara

lain: a) pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

2) Bantuan Darurat (*relief*).

Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa: pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Tahap Pasca Bencana

1) Pemulihan (*recovery*).

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

2) Rehabilitasi (*rehabilitation*).

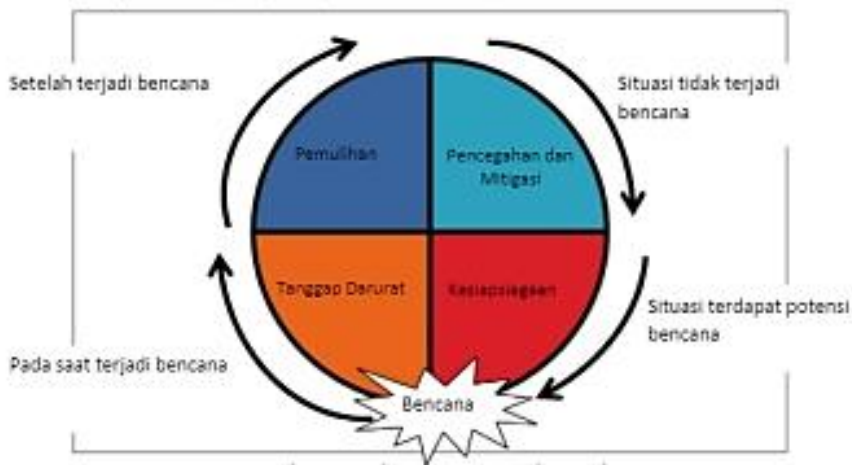
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

3) Rekonstruksi (*reconstruction*).

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,

tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Tahapan dalam penanggulangan bencana s diperlihatkan pada Gambar 2.1 tersebut (Triutomo, *et.al.*, 2011):



Gambar 2.1 Tahapan Penanggulangan Bencana

Sumber: Triutomo *et.al.* (2011)

Gambar 2.1 memperlihatkan terdapat kuadran-kuadran yang merupakan tahapan-tahapan dalam penanggulangan bencana yang tidak berarti bahwa dalam praktek tiap-tiap kuadran dilakukan secara berurutan. Pasa fase tanggap darurat yang dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana ketika diprediksi bencana akan segera terjadi, meskipun kejadian bencana belum terjadi, namun pada tahap ini sudah dapat dilakukan upaya-upaya tanggap darurat seperti evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian pangan, sandang, layanan kesehatan, dan sebagainya. Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa meskipun telah dilakukan kegiatan pada tahap tanggap darurat, namun terdapat dua kemungkinan situasi yaitu benar-benar terjadi bencana atau tidak terjadi bencana. Sebagai sebuah siklus, seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana

tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda, Siklus manajemen bencana yang berupa tahapan/fase penanggulangan bencana dapat bermanfaat dalam pengurangan atau pencegahan potensi bencana, perumusan kebijakan saat terjadi bencana dan pertimbangan dalam prosedur pemulihan pascabencana. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Kolaborasi Multihelix Dalam Menghadapi Bencana

Pendekatan multihelix merupakan suatu bentuk kerja sama lintas sektor yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan utama, yang dikenal dengan istilah pentahelix, yaitu:

1. Pemerintah
2. Akademisi
3. Dunia usaha/swasta
4. Komunitas/masyarakat
5. Media

Model ini terus berkembang dan dalam beberapa situasi diperluas menjadi hexahelix atau lebih, sesuai kebutuhan. Dalam penanggulangan bencana, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi sangat penting untuk membangun sistem yang responsif dan berdaya tahan. Berikut penjelasan peran mereka berdasarkan tahapan bencana:

Pada saat prabencana. Pemerintah dalam hal ini BPBD membuat kebijakan sebelum terjadi bencana. Wilayah yang rawan banjir diawali dengan penertiban pembuangan sampah, melakukan kordinasi dengan instansi terkait penebangan pohon, penyediaan lahan, pembakaran hutan dll. Penebangan pohon secara tidak teratur menyebabkan terjadinya longsor di desa-desa dan juga sepanjang jalan. Karena pada dasarnya landform (bentuk lahan) di Tanah Karo adalah pegunungan, bukit dan lembah. Dalam hal ini Pemerintah bersama-sama dengan stake holder terkait dapat membuat kebijakan, peta risiko dan juga Latihan kebencanaan dengan materi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.

Saat Bencana: Koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan.

Pada saat bencana terjadi pemerintah daerah merupakan leading sektor untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak. Apa yang telah dilatih pada saat aman (prabencana), saatnya dipraktekkan. Pemerintah secepatnya melakukan kordinasi dengan instansi terkait sehingga dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat. Karena kepanikan justru memperburuk suasana. Dibutuhkan komunikasi yang tepat sehingga dapat bekerja sama untuk menghubungi keluarga, teman untuk memberi tahu kondisi keluarga. Pemerintah harus mampu meniadakan korban atau paling tidak mengurangi korban akibat bencana yang terjadi, apakah itu bencana akibat erupsi gunung berapi, longsor, banjir atau kebakaran.

Pascabencana: Pimpin rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Setelah bencana usai, pemerintah wajib membangun dengan lebih baik (build better) sebagai antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya terjadi. Fasilitas umum seperti jembatan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, jalan-jalan termasuk rumah penduduk merupakan tanggung jawab yang perlu dituntaskan.

Semua kegiatan mulai saat prabencana, saat bencana dan pascabencana tidak bisa terlepas dari peran serta elemen lain yang terkait. Peran masyarakat secara pribadi maupun kelompok tidak bisa dipandang sebelah mata. Kelompok masyarakatlah yang paling tahu tentang wilayahnya, jumlah personal, sarana prasarana yang dapat dipakai dan yang terdampak dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk pengamanan kebencanaan. Di sinilah pentingnya pembekalan yang diberikan melalui pelatihan dan internalisasi saat prabencana.

Demikian pula peran dunia usaha tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu menggandeng dunia usaha khususnya saat bencana terjadi. Berbagai keperluan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan kordinasi dengan dunia usaha, karena sering kali justru dalam kondisi kesulitan akibat bencana, dunia usaha justru mengambil keuntungan.

Hasil penelitian tentang risiko bencana, pemanfaatan teknologi peringatan dini yang disarankan pada saat prabencana dapat dievaluasi saat bencana terjadi. Saat bencana terjadi para akademisi dapat melakukan analisis dampak bencana yang terjadi selanjutnya mendukung dalam pengambilan keputusan secara cepat. Selanjutnya pascabencana akademisi melakukan evaluasi penanganan, memberi masukan untuk Pembangunan ulang.

Media tidak kalah penting dalam berbagai kegiatan di setiap tahap mulai dari tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Saat prabencana, media dapat melakukan edukasi terkait kebencanaan, menyebarkan informasi terkait kesiapsiagaan. Ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada saat bencana, media dapat memberikan info secara real time untuk menghindari hoaks. Ini sangat penting untuk memberikan ketenangan dan kejelasan informasi bagi masyarakat. Sedangkan pascabencana, media dapat mengawal transparansi berbagai kegiatan saat bencana dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Informasi pemulihan juga perlu disampaikan untuk membuat masyarakat memiliki peduli dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang pada dasarnya menjadi tujuan bersama bangsa dan negara RI.

Referensi

- Aminudin. (2013). *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*. Bandung: Angkasa.
- Bakornas PB. (2007). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia Eds. 2*. Jakarta: Direktorat Mitigasi.
- BNPB. (2011a). *Garis Besar Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana: Buku Panduan Fasilitator*. Jakarta: BNPB dan AUSAID.
- BNPB. (2011b). *Panduan Penyelenggaraan Kontinjensi Menghadapi Bencana Edisi Kedua*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. (2012). *Pedoman Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Direktorat Kesiapsiagaan BNPB.

- BNPB. (2017). *Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana: Membangun Kesadaran, Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB..
- Creswell, J. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. Jakarta: LIPI-UNESCO
- Kent, Randolph. (1994). *Disaster Preparedness 2nd Edition*. UNDP.
- Nurjanah., Sugiharto, R., Dede, K., Siswanto B.P., & Adikoesoemo. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sopaheluwakan, J. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami*. Jakarta: LIPI-UNESCO.
- Triutomo, S., Widjaja, B.W., Sugiharto, R., P. Siswanto, B., Kristanto, Y. (2011). *Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (edisi kedua)*. Jakarta: BNPB.
- Jurnal dan Hasil Penelitian
- Dermatoto, Argyo. (2019). Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis Collaborative Governance. *Talenta*. 2(3), 44-50.
- Rakhmat, Basuki. (2013). *Kajian Kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Mengantisipasi Ancaman Bencana Banjir* (Tesis Magister). Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Sutton, Jeannette & Tierney, Kathleen. (2006). *Disaster Preparedness: Concepts, Guidance, and Research*. Retrieved from <http://beta.fritzinstitute.org/PDFs/WhitePaper/DisasterPreparedness-Concepts.pdf> diakses pada 13 September 2021.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Bagian VIII

Kekuasaan dalam Masyarakat Karo: Perspektif Adat dan Kekerabatan

Power in Karo Society: Customary and Kinship Perspectives

Lila Pelita Hati¹, Lestari Dara Cinta Utami Ginting¹, dan Liandra Khairunnisa²

¹Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara

²Prodi S1 Psikologi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dien

Abstrak

Tulisan ini membahas gagasan tentang kekuasaan dalam masyarakat Karo, yang sangat berbeda dari teori kekuasaan Max Weber, yang menganggap kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak melalui paksaan atau manipulasi. Menurut Weber, kekuasaan lebih bersifat kolektif dan didasarkan pada kesepakatan kolektif. Kekuasaan dalam masyarakat Karo diatur melalui sistem "*daliken si telu*," yang terdiri dari kalimbubu, senina, dan anak beru. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data yang kaya dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen sejarah. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan yang erat, diperoleh melalui keturunan, perkawinan, dan proses ertitur, membentuk dasar dari struktur sosial masyarakat Karo. Sistem Runggu, sebagai forum permusyawaratan, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Pemerintahan desa di Tanah Karo, yang awalnya berbasis pada kesain,

menunjukkan struktur pemerintahan adat yang kompleks namun terorganisir. Sistem fratur berdasarkan merga, beru, dan bere mengatur kedudukan dan kekerabatan sosial. Meskipun masyarakat Karo cenderung patriarkhi dalam hal gender, peran perempuan masih sangat penting, terutama sebagai kalimbubu yang dihormati dalam berbagai upacara adat dan keputusan penting. Selain berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, perempuan juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mempertahankan adat istiadat. Tulisan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Karo membentuk gagasan kekuasaan, yang menekankan kerja sama, saling menghormati, dan keseimbangan. Tulisan ini memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Karo mengelola kekuasaan dan menjaga harmoni sosial dalam komunitas mereka melalui pendekatan kolektif ini. Pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan dan harmoni sosial dalam komunitas Karo.

Kata Kunci: kekuasaan, Karo, pemerintahan adat, gender, dan rungu.

Pendahuluan

Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka terhadap orang lain, seringkali melalui paksaan, manipulasi, atau bujukan. Namun, budaya dan tradisi lokal Karo, yang berpusat pada "*daliken si telu*", yang terdiri dari kalimbubu, senina, dan anak beru, sangat memengaruhi struktur sosial dan pemahaman tentang kekuasaan. Ketiga elemen ini berperan dalam membentuk dasar pengambilan keputusan dan pemerintahan dalam masyarakat Karo.

Struktur masyarakat Karo sangat unik dan kompleks. Dalam komunitas Karo, hubungan kekerabatan dan adat istiadat memegang peranan penting dalam pengaturan kehidupan sosial. Masyarakat Karo memiliki sistem yang disebut Runggu, yang merupakan forum permusyawaratan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang bersifat adat maupun pemerintahan. Oleh sebab itu, rungu berfungsi sebagai wadah di mana

kalimbubu, senina, dan anak beru bekerja sama, bertukar peran, dan meraih konsensus dalam membuat keputusan. Pada masyarakat Karo, kekuasaan cenderung bersifat kolektif dan kekuasaan merupakan hasil konsensus bukan dominasi. Sistem demikianlah yang menjadikan peran sosial terbuka dan dinamis, dimana seorang individu dapat menjadi kalimbubu, senina, atau anak beru sekaligus, tergantung dari konteks dan situasi yang sedang terjadi. Karena demikian, kekuasaan pun tidak bersifat statis tapi dinamis berdasarkan perubahan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan kolektif ini mencerminkan nilai-nilai budaya Karo yang menekankan pentingnya kerja sama, saling menghormati, dan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi ini, kekuasaan digunakan untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial daripada untuk menindas. Akibatnya, untuk memahami kekuasaan dalam masyarakat Karo, kita harus melihat tradisi dan prinsip budaya yang mengatur interaksi sosial mereka.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut bagaimana kekuasaan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Karo, seperti pemerintahan desa, hubungan senioritas, konteks gender, dan sistem kekerabatan. Diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat Karo menjaga keseimbangan sosial dan mengelola kekuasaan.

Kajian Literatur

Teori-teori klasik ilmuwan sosial seperti Max Weber biasanya menjadi dasar penelitian tentang kekuasaan dalam masyarakat tradisional. Kekuasaan, menurut Weber, didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan kehendaknya dalam menghadapi perlawanan (Weber, 1947). Pendekatan Weber masih relevan sebagai titik awal dalam memahami bentuk-bentuk kekuasaan, termasuk dalam masyarakat adat seperti masyarakat Karo, meskipun gagasan ini berasal dari konteks masyarakat Eropa. Namun, untuk menerapkan gagasan ini di Karo, akan diperlukan penyesuaian

dengan norma dan struktur sosial yang unik dari masyarakat tersebut.

Dalam bukunya *Manusia Batak Karo*, Tridah Bangun (1986) menyatakan bahwa kekerabatan adalah sumber kekuasaan dalam masyarakat Karo. Ia menjelaskan konsep *daliken si telu* sebagai inti dari tatanan sosial masyarakat Karo, yang terdiri dari *kalimbubu*, *senina*, dan *anak beru*. Ketiganya bukan hanya kedudukan kekerabatan, tetapi juga menentukan peran sosial dalam setiap upacara adat, pengambilan keputusan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab sosial.

Sementara itu, Nyoman Beratha (1982) dalam tulisannya *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, menunjukkan bahwa struktur pemerintahan desa di Tanah Karo sangat dipengaruhi oleh sistem adat. Pemerintahan desa pada masa lalu dijalankan berdasarkan musyawarah antara para penghulu kesain dan tokoh adat, dan bukan melalui sistem birokratis yang kaku seperti dalam pemerintahan modern. Ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat Karo berakar pada nilai mufakat dan hubungan sosial yang bersifat kolektif.

Amitai Etzioni (1985), meskipun menulis dalam konteks organisasi modern, memberikan wawasan yang berguna melalui bukunya *Organisasi-Organisasi Modern*. Ia menyebut bahwa meskipun organisasi modern dan tradisional berbeda, prinsip-prinsip dasar seperti pembagian peran, konsensus, dan kerjasama tetap menjadi pilar penting. Hal ini bisa dilihat dalam praktik masyarakat Karo, di mana kekuasaan tidak dipegang oleh satu pihak secara mutlak, tetapi dibagi dan dijalankan berdasarkan norma adat.

Lebih jauh, Evers dan Schiel (1992) dalam buku mereka *Kelompok Strategis* menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok sosial secara aktif membentuk strategi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Dalam masyarakat Karo, struktur *daliken si telu* juga dapat dipahami sebagai bentuk kelompok strategis yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan politik tertentu, serta menjadi alat negosiasi dalam pelaksanaan adat dan urusan kehidupan sehari-hari.

Meneth Ginting (1988) dalam bukunya *Ada Apa di Tanah Karo* memberikan gambaran yang sangat rinci tentang kehidupan masyarakat Karo dari perspektif orang dalam. Ia menyoroti bagaimana praktik-praktik adat, relasi kekerabatan, dan kehidupan sehari-hari membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan dari struktur kekuasaan. Ginting menunjukkan bahwa untuk memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat Karo, seseorang tidak cukup hanya membaca teori, tetapi harus memahami secara mendalam bagaimana adat dijalankan dan dimaknai oleh masyarakat itu sendiri.

Secara keseluruhan, kajian-kajian di atas memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat Karo tidak semata-mata merupakan instrumen dominasi, tetapi dibentuk oleh hubungan sosial yang kompleks, nilai budaya, dan sistem kekerabatan yang telah diwariskan lintas generasi. Ini sekaligus membedakannya dari pemahaman kekuasaan dalam kerangka barat yang cenderung menitikberatkan pada relasi dominasi formal dan struktural.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif, yang dikombinasikan dengan metode kajian pustaka. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yang adalah untuk memahami konsep kekuasaan dalam masyarakat Karo melalui studi literatur yang ada. Dengan menggunakan sumber tertulis yang relevan, penulis berusaha menciptakan pemahaman teoritis dan reflektif tentang kehidupan sosial orang Karo.

Data dikumpulkan dalam dua cara utama. Pertama, informasi dikumpulkan melalui penelitian literatur tentang karya ilmiah, tesis, disertasi, buku, dan dokumen lainnya yang secara langsung membahas masyarakat Karo, terutama yang berkaitan dengan struktur sosial dan struktur kekuasaan. Cara kedua adalah dengan menganalisis dokumen, terutama yang bersifat etnografis dan historis, seperti catatan adat, arsip kuno, dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Pertama,

data diklasifikasikan berdasarkan tema literatur utama seperti struktur daliken si telu, sistem pemerintahan adat, gender, pola kekerabatan, dan relasi senioritas.

Selanjutnya, penulis melakukan analisis deskriptif untuk menunjukkan secara rinci bagaimana kekuasaan digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Terakhir, analisis interpretatif digunakan untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik praktik sosial tersebut dan mengaitkannya dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Karo. Kemudian dilakukan proses triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan keandalan data dengan membandingkan berbagai literatur yang berasal dari latar belakang dan pendekatan yang berbeda. Selain itu, penulis meninjau kritis setiap literatur yang digunakan untuk memastikan hanya sumber yang relevan dan dapat diandalkan yang dijadikan rujukan utama. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan memiliki dasar akademik yang kuat dan tidak spekulatif. Maka diharapkan tulisan ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kekuasaan dalam masyarakat Karo, yang sering diabaikan atau disederhanakan dalam diskusi akademik yang didominasi oleh teori-teori Barat.

Hasil dan Pembahasan

- **Karo Dalam Berbagai Sisi**

Sering sekali untuk menelusuri asal usul sebuah bangsa amatlah sukar, karena bahan-bahan tertulis hampir tidak ada dan kalau pun ada tentu sangat langka. Untuk mengkonstruksi sejarah etnis atau daerah para sejarawan sering menggunakan metodologi yang khusus, yaitu menganalisa folklore maupun mitos yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang diteliti. Terlepas dari hasil analisa tersebut apakah sejarah yang dihasilkan kredibilitasnya diragukan atau tidak, namun metodologi ini amat penting dalam salah satu usaha konstruksi sejarah.

Secara etimologis, menurut P. Tamboen kata Karo berasal dari kata *Ha* dan *Roh* (*Ha* = pertama, *Roh* = datang). Secara evolusi dan lambat laun *Haroh* berubah menjadi Karo (Tambun, 1952:65). Namun demikian sangat disayangkan P. Tamboen tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud pertama datang.

J.H. Neumann seorang etnolog dan pendeta yang lama bertugas di Karo menguraikan perkataan Karo itu berasal dari perkataan "Karo", dalam bahasa Karo dan dalam bahasa Toba disebut "Haro". Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan kata Karo berasal dari kata Kalak (manusia) dan Aru, nama sebuah pulau dekat Belawan/Teluk Aru. Selain dari kata-kata tersebut, ada juga pendapat bahwa perkataan itu berasal dari kata Aru, berubah menjadi Haru dan akhirnya Karo seperti sekarang ini. Perkataan Haru dalam bahasa Karo selalu ditulis dan diucapkan dengan kata Haru dan Karo. Lalu secara etimologis berubah menjadi Karo (Putro, 1981: 13).

Sebelum invasi ras Proto Melayu berlangsung di daerah ini, telah bermukim pula bangsa Negrito yang disebut Umang (orang Karo zaman purba). Bangsa Negrito akhirnya terdesak dan bercampur baur dengan kaum pendatang Proto-Melayu yang masuk melalui pantai timur Sumatera atau sekitar Pangkalan Brandan dan Belawan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang Karo adalah hasil percampuran, atau akulturasi biologis apa yang kita namakan sekarang ini Hindia Belakang atau Indocina. Semula mereka menduduki dataran rendah, dan bercampur baur dengan penduduk asli, bermukim di pondok-pondok yang tersebar di daerah Karo (Sinar, 1995:1).

Roberto Bangun menyebutkan ada berbagai alasan pindahnya suku Karo dari daerah pesisir ke dataran tinggi adalah karena masuknya pendatang baru Deutero-Melayu dan juga karena penyerbuan Mataram ke pantai timur dan barat Sumatera, serta terjadi peperangan kerajaan Haru (Karo) dengan Majapahit kira-kira 1331-1364 (Bangun, 1989: 102). Invasi migran terus berlanjut menuju dataran tinggi Karo, terutama dari daerah Dairi dan Toba seperti marga Barus, Lingga Sitepu dan lainnya. Mereka menetap dan mendirikan kampung atau kuta. Menurut T. Lukman Sinar, perpindahan ini adalah akibat adanya desakan orang India Tamil yang datang dari arah pantai barat Singkel dan Barus yang masuk ke Tanah Karo seperti marga Pandia, Colia, Kembaren, Brahmana, Meliala, dan lainnya (Sinar, 1995:11).

Orang Karo yang berasal dari percampuran Hindia Belakang ini kemudian tersebar di Sumatera Timur dan bermukim di

pegunungan (Bangun dan Chairuddin, 1994:8). Sebelum masuknya migran-migran kelompok marga lain ke daerah ini penduduk pribumi asli adalah marga Karo Sekali, yang masuk dalam klen marga Karo-Karo. Selanjutnya mereka bercampur baur dengan kelompok pendatang lainnya sehingga kita kenal masyarakat Karo seluruhnya pada saat ini dalam bentuk klen lima marga serta sejumlah cabang. Walaupun orang Karo telah tersebar keluar dari dataran tinggi Karo namun mereka masih terikat dengan warisan sosial budaya yang sama, terutama bahasa Karo yang berbeda dialek tetapi saling komunikatif di antara sesamanya. Jika dibandingkan dengan stereotipe masyarakat “Batak” yang juga Karo diidentifikasi di dalamnya, maka bahasa dan budaya Karo sangat berbeda dengan yang lain seperti Simalungun, Toba, Pakpak, Mandailing serta Angkola. Masing-masing memiliki kultur dan bahasa tersendiri.

Daerah permukiman yang dihuni oleh masyarakat Karo sebelum kolonial ke wilayah ini sangat luas. Mereka menganggap dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka dan tidak pernah dijajah bangsa manapun. Dalam perkembangannya wilayah masyarakatnya semakin bertambah luas, hampir separuh daerah yang dulu dikenal sebagai Sumatera Timur, yaitu membentang dari Tamiang (perbatasan Aceh sampai kerajaan Siak) (Reid, 1987:18). Adapun tempat-tempat yang didiami oleh orang Karo mulai membentang dari Sipispis di sekitar Tebing Tinggi sebelah utara menyusuri pantai sampai ke Langkat. Kemudian daerah selatan ke arah dataran tinggi Karo sekarang, dan Tiga Lingga atau Karo Baluren, terus sampai Lembah Alas (Aceh Tenggara dan Dairi), terus ke Simalungun Atas dan menyambung lagi ke Sipispis (Bangun dan Chairuddin, 1994:18). Setelah Belanda melaksanakan politik *Pax Neerlandica* dan misi *Penetration Pasique*-nya ke pedalaman dataran tinggi Karo, dan pembentukan wilayah administrasi pemerintahan Sumatera Timur, maka wilayah ini yang hampir lebih separuh dihuni oleh orang Karo semakin dipersempit dan diciutkan. Dataran tinggi Karo yang sebenarnya sebagai sentrum budaya menjadi daerah yang paling kecil.

Bentuk dataran tinggi Karo menyerupai sebuah kuali yang sangat besar karena dikelilingi oleh pegunungan dengan

ketinggian 140-1400 di atas permukaan laut dan terhampar di punggung Bukit Barisan. Keadaan tanah yang berbukit-bukit serta diselang-selingi oleh lembah dan padang rumput serta zat belerang yang dihembuskan oleh angin dari Gunung Sibayak dan Sinabung mengakibatkan tanah di sekitarnya menjadi subur. Sehingga tidak mengherankan jika kesuburan ini dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk Bertani (Sinuhaji, 2004).

Identitas dan sifat orang Karo memiliki ciri yang sangat khas dan berbeda dengan etnik lain yang terdapat di Sumatera Utara. Faktor yang menyebabkan karakteristik orang Karo tersebut di antaranya sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam yang mengitari wilayahnya. Wilayah pusat orang Karo berada Tanah Karo yaitu berada di Bukit Barisan yang terdapat banyak hutan rimba dan lingkungan yang berat di daerah pegunungan. Orang karo di pegunungan ini secara teritorial adalah masyarakat yang terisolir di pedalaman dataran tinggi Karo, memiliki suatu budaya yang menjadi patron dalam hubungan dengan Sang Pencipta, alam lingkungan beserta isinya, dan hubungan dengan masyarakat di dalamnya.

Orang Karo yang bermukim di pegunungan jauh sebelum masuknya kolonialisme Belanda telah dipaksa oleh alam dan lingkungannya untuk menjalin hubungan dengan wilayah pesisir atau pantai. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pertukaran barang dan perdagangan. Salah satu komoditi yang sangat penting bagi orang Karo adalah garam. Maka dari itu orang-orang Karo menyusuri ke dataran rendah untuk melakukan perdagangan garam, dan di pantai sebaliknya mereka membawa berbagai barang dari dataran tinggi untuk dipertukarkan dengan garam. Lambat laun, karena perjalanan mereka sangat jauh, mereka pun mulai menetap di dataran rendah sambil bertani dan berdagang. Pertanian mereka terutama adalah lada. Lada adalah suatu tanaman yang membutuhkan waktu yang lama dan bertahun-tahun baru menghasilkan. Dalam masyarakat Karo, kegiatan ini lazim disebut dengan "*erlada*" yang dimaksudkan dengan panjang waktunya.

Sebelum jalur perdagangan di kawasan pantai timur Sumatera berkembang pada pertengahan abad ke-18, cikal bakal

dan ciri masyarakat Karo sebagai masyarakat yang mempunyai prinsip entrepreneurship yakni "*perlanja sira*" (pemikul garam) yang bermukim di sepanjang lembah Lau Renun dan lembah Liang Melas (Karo Baluren) terlihat dari aktivitas yang selain bertani secara subsistensial, tetapi juga mencari hasil hutan, seperti damar, kemenyan, gading gajah, cula badak, dan kapur barus, yang kemudian semuanya diekspor ke luar negeri kepada pedagang-pedagang Aceh dan Mesir serta Cina dan India (Sinuhaji, 2004). Aliran sungai Renun dan sungai Alas yang bertemu di sungai Singkel menjadi lalu lintas pelayaran utama orang Karo di wilayah Karo Baluren dan Liang Melas menuju pelabuhan Barus. Sebaliknya di pantai barat Sumatera dari pelabuhan Barus dibawa kebutuhan barang untuk penduduk lokal seperti garam, kain, cangkul, dan lain-lain. Di daerah ini juga banyak terdapat kapur barus dengan kualitasnya yang sangat baik, demikian juga tembakau dan sebagai produsen komoditi beras dan kopi.

Setelah terjadi perubahan perpindahan kawasan perdagangan ke pantai timur Sumatera, wilayah Karo Baluren bermetamorfosis pada abad ke-18 ke wilayah di daerah pantai timur Sumatera seperti Langkat, Deli, dan Serdang. Pertanian lada dan tembakau pada saat itu berkembang menjadi pertanian rakyat di tiap-tiap kampung orang Karo di sepanjang sungai Ular, sungai Seruai, sungai Petani, sungai Belawan, sungai Mencirim, sungai Batang Serangan, sungai Bingai, dan sungai Wampu. Hasilnya diekspor ke luar negeri oleh pedagang Arab, Melayu, dan Cina, terutama ke bandar perdagangan Melaka (Putro, 1981: 79-85).

Aktivitas itulah yang kemudian menjadikan orang Karo berkembang dan ekspansif sehingga mereka bermukim di wilayah yang sangat luas tidak hanya yang disebut sebagai Kabupaten Karo sekarang, tetapi hampir lebih dari separuh dari eks yang dahulu disebut sebagai Sumatera Timur. Selain itu, orang Karo juga sangat ekspansif hingga ke wilayah Aceh Tengah, terbukti bahwa suku-suku di Takengon, Blangkejeren dan Alas banyak yang memakai marga-marga Karo, terlebih di Aceh Tenggara masih banyak yang memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan orang Karo dan pada saat-saat tertentu

seperti upacara adat masih saling mengunjungi satu sama lain (Bangun dan Chairuddin, 1994:8-12).

Apabila diselidiki lebih jauh bahwa etnik Karo bertetangga dengan empat etnik dari Sumatera Utara yang lain yaitu sebelah Utara dengan etnik Melayu di Sumatera Timur, sebelah Barat dengan etnik Alas di Aceh Tengah, sebelah Timur dengan etnik Simalungun, dan sebelah Selatan dengan etnik Pakpak. Sering terjadi kesalah pahaman penafsiran bahwa Tanah Karo disamakan dengan Kabupaten Karo, padahal Tanah Karo sebenarnya lebih luas dari Kabupaten Karo sekarang ini.

Orang Karo yang bermukim di Tanah Karo mendiami wilayah yang umumnya pegunungan dan dataran tinggi. Setelah kolonial Belanda menancapkan kekuasaan kolonialismenya di Sumatera Utara, wilayah Tanah Karo yang sedemikian luasnya dipecah-pecah oleh pemerintah Belanda setelah Belanda menguasai Sumatera Timur dalam rangka politik "*divide et impera*". Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara administratif wilayah Tanah Karo terdiri dari, Kabupaten Karo di dataran tinggi Karo, Langkat Hulu di Kabupaten Langkat, Deli Hulu di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai sekarang ini. Selain itu, dilihat dari sudut pandang persamaan budaya, penduduk di satu kecamatan di Kabupaten Dairi (tanah Pakpak), yaitu Kecamatan Tanah Pinem, termasuk juga dalam wilayah Tanah Karo.

- **Kekuasaan dan Struktur Sosial Karo**

Masyarakat Karo memiliki cara tersendiri dalam mengatur kehidupan sosial mereka. Tidak hanya soal adat istiadat, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan, dibagikan, dan dipertanggungjawabkan. Salah satu wadah utama dalam proses pengambilan keputusan bersama adalah *runggu*. Runggu bukan lembaga formal seperti dalam sistem negara, tetapi berfungsi sebagai forum musyawarah di tingkat komunitas. Di sinilah warga, khususnya para tokoh adat dan kepala keluarga, duduk bersama membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama—baik soal adat, sengketa keluarga, hingga rencana pesta. Setiap suara punya ruang, dan keputusan diambil bukan lewat voting mayoritas, tapi lewat mufakat

Sistem sosial Karo sangat erat kaitannya dengan hubungan kekerabatan. Seseorang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan yang lain melalui sistem *merga* (untuk laki-laki) dan *beru* (untuk perempuan). Hubungan sosial diperkenalkan dan diakui melalui proses *ertutur*, yaitu saling memperkenalkan diri berdasarkan asal-usul marga. Dari sini diketahui bagaimana hubungan seseorang dengan yang lain, apakah sebagai *kalimbubu*, *senina*, atau *anak beru*, dan dengan itu pula ditentukan bagaimana mereka harus saling menghormati dan bertindak.

Berbeda dengan pengertian kekuasaan dalam teori Max Weber yang menekankan kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya, masyarakat Karo memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab. Dalam sistem Karo, seseorang yang diberi posisi atau peran adat bukan bebas melakukan apa saja, tetapi justru harus menegakkan aturan bersama, menjaga keseimbangan, dan memastikan semua pihak merasa dihormati. Kekuasaan berjalan bersama norma.

Ada tiga pilar utama yang membentuk kerangka sosial masyarakat Karo yaitu *Merga Silima*, *Daliken Si Telu*, dan *Tutur Si Waluh*. *Merga Silima* adalah lima marga pokok dalam masyarakat Karo. Seseorang tidak bisa menikah dengan orang dari marga yang sama. Ini menjadi dasar dalam pengaturan relasi sosial dan adat. Dalam setiap pesta adat, posisi seseorang ditentukan dari marganya.

Daliken Si Telu adalah struktur sosial tiga pihak yang saling terhubung: *kalimbubu* (pemberi perempuan), *senina* (kerabat sedarah), dan *anak beru* (penerima perempuan). Dalam konteks pernikahan, ketiganya memiliki fungsi yang sangat jelas dan masing-masing punya peran dalam pelaksanaan adat. Anak beru, misalnya, bertanggung jawab menyiapkan segala sesuatu, sementara kalimbubu biasanya duduk sebagai yang dihormati dan banyak didengarkan pendapatnya.

Sementara itu, *Tutur Si Waluh* memperluas relasi kekerabatan menjadi delapan jenis hubungan. Di dalamnya ada aturan yang lebih rinci, termasuk soal bagaimana berinteraksi dengan kerabat dari klan lain, cara bertutur dalam acara adat, hingga posisi seseorang ketika menghadiri upacara. Sistem ini

membantu masyarakat Karo menjaga keteraturan, tanpa perlu struktur formal seperti organisasi birokrasi modern.

Semua sistem ini, merge, daliken, dan tutur, berjalan bukan karena adanya kekuasaan tunggal, melainkan karena adanya saling pengertian, tanggung jawab kolektif, dan rasa hormat terhadap yang lebih tua serta mereka yang punya posisi adat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini terasa dalam cara mereka mengatur pesta, menyelesaikan konflik, atau menjalankan kewajiban adat. Tidak ada satu orang yang bisa memaksakan kehendak sendirian. Semua keputusan melibatkan pihak-pihak yang terkait, dan semuanya kembali pada adat yang diwariskan secara turun-temurun.

- **Pemerintahan Desa di Tanah Karo**

Pemerintahan desa di Tanah Karo pada mulanya adalah pemerintahan adat. Desa dibentuk dengan pembentukan "kesain," yaitu kelompok permukiman yang didirikan oleh pendiri desa yang disebut "*simantek*" atau "*bangsa taneh*" dengan *anak beru* dan *seninanya* (Bangun, 1980:110). Kesain adalah unit permukiman yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan. Kesain dikepalai oleh penghulu kesain dan biasanya diteruskan oleh keturunannya yang disebut *bangsa taneh* atau *simantek*.

Setelah terbentuk beberapa kesain, diadakan musyawarah untuk mendirikan "jambur" atau balai kuta, tempat bermusyawarah dari penghulu kesain yang dipimpin oleh penghulu kesain paling tua. Jambur adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat berkumpul untuk melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan. Kepala kuta dibantu oleh penghulu kesain lainnya dan tokoh masyarakat seperti *gor sibaso* (orang yang pandai menentukan hari baik), guru atau dukun, serta sieberjabeten (pemusik dan ahli irigasi). Tokoh-tokoh ini memiliki peran penting dalam masyarakat karena keahlian dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pada masa tradisional atau pra-kolonial, dataran tinggi Karo terbentuk sistem pemerintahan politik dan pemerintahan yang disebut pemerintahan tradisional berdasarkan merge-merge. Adapun hierarkinya adalah

terbentuknya sebuah kuta atau kampung. Kuta ini dipimpin oleh kepala kampung. Kuta ini terdiri dari beberapa kesain (bagian dari kampung), yang masing-masing dari kesain ini dipimpin oleh pengulu. Di atas kekuasaan kepala/pengulu kesain terdapat pula kekuasaan kepala kampung asli (*perbapaan*) yang menjadi kepala dari sekumpulan kuta yang asalnya dari kuta asli tersebut. Kumpulan beberapa kuta tersebut dinamakan *urung*. *Urung* dipimpin oleh seorang bapa urung atau biasa juga disebut raja urung. *Urung* artinya adalah satu kelompok kuta dimana semua pendirinya masih dalam satu merga atau satu garis keturunan.

Proses berdirinya sebuah kuta menurut konsepsi adat-istiadat masyarakat Karo tidak bisa dipisahkan dengan sistem kemasyarakatannya yaitu "*daliken sitelu*", yaitu, *Senina*, *Anak beru*, dan *Kalimbubu*. Ketiga unsur inilah merupakan sendi kelengkapan dalam setiap pembentukan kuta. Tata susunan dalam pembentukan suatu kuta tetap terpelihara menjelang era kolonial Belanda. Garis turunan dan perkawinan menurut adat adalah dasar yang pokok dalam susunan politik dan pemerintahan Karo menurut adat-istiadat. Sebelum kedatangan Belanda pada awal abad ke-20, kuta merupakan kesatuan politis terbesar dalam masyarakat. Kelompok patrilineal yang merupakan keturunan dari pendiri suatu kuta merupakan "*bangsa taneh*" dalam kuta itu. Hampir semua sub-klen di Karo mempunyai *kuta-kuta* yang didirikan oleh anggotanya dan sering kuta tersebut adalah asal dari sub-klen tersebut. Dengan demikian maka setiap orang Karo adalah "*bangsa taneh*" dalam kuta tersebut.

Apabila dalam sebuah kuta sudah terlalu padat, maka sebagian penduduknya akan pindah ke tempat lain, untuk mendirikan sebuah perkampungan baru yang dinamakan barung-barung. Selanjutnya akan menjadi sebuah kuta jika penduduknya semakin banyak dan bertambah. Apabila beberapa kuta bergabung untuk menggalang kekuatan menghadapi ancaman musuh, inilah embrio dalam bentuk federasi yang kemudian menjadi apa yang disebut sebagai *urung*. Kuta di wilayah Karo sebelum kolonial Belanda sering saling melakukan peperangan. Hal ini dilakukan untuk menggalang kekuatan menghadapi musuh mereka dan bergabung menjadi satu, membentuk semacam

pemerintahan federal dan dipimpin oleh kepala senior dan memiliki kharisma di antara sesamanya.

Dalam tingkatan paling bawah yakni kesain, berkembang menjadi sebuah kuta dan kemudian menjadi urung yaitu memiliki tanah yang disebut tanen kesain merupakan harta penduduk yang diusahakan oleh pemiliknya. Biaya operasional pemerintahan berasal dari imbalan jasa sederhana dan sumbangan dari masyarakat, terutama dari hasil ladang, perburuan dan lain-lain, yang diatur sesuai dengan adat. Tiga kedudukan sentral yaitu, senina, anak beru, dan kalimbubu adalah turun-temurun dan kuasanya yaitu pemerintahan kaum keluarga (Tambun, 1952:189). Adat dan pemerintahan memanglah sangat erat. Garis keturunan dan hubungan perkawinan menurut adat adalah dasar dalam susunan politik dalam pemerintahan Karo menurut adat. Sistem pemerintahan tradisional Karo ini telah berjalan selama ratusan tahun. Sistem ini mengalami sedikit perubahan ketika wilayah Karo berada dalam pengaruh Aceh yang membentuk sistem raja berempat (sibayak) di Tanah Karo pada abad ke-18.

- **Hubungan Senioritas dalam Masyarakat Karo**

Kekerabatan Suku Karo berlandaskan pada dua aspek utama: hubungan keturunan berdasarkan klan dan ikatan perkawinan di dalam komunitas Karo itu sendiri. Sistem kekerabatan ini mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat Karo dengan ketat. Setiap orang Karo memiliki status tertentu dalam berbagai peristiwa, sehingga tidak ada yang bebas dari ketentuan adat yang berlaku. Meski tidak ada peraturan tertulis, masyarakat Karo secara alami memahami dan mematuhi adat serta tradisi yang diwariskan turun-temurun melalui pengalaman hidup sehari-hari.

Inti dari sistem kehidupan bermasyarakat Karo adalah konsep "*merga*," yang berasal dari kata "*meherga*" atau "*erga*" yang berarti harga atau nilai yang tinggi. Garis *merga* dalam masyarakat Karo mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal, di mana setiap anggota klan memakai identitas *merga* yang melekat pada nama mereka. Ini menandakan bahwa mereka memiliki kakek moyang yang sama.

Struktur kekerabatan Karo diatur oleh *Rakut Si Telu* dan *Tutur Si Waluh*. *Rakut Si Telu*, yang terdiri dari *Kalimbubu*, *Senina*, dan *Anak Beru*, serta *Tutur Si Waluh*, yang mencakup *Sembuyak*, *Senina*, *Sipermen*, *Anak Beru*, *Anak Beru Menteri*, *Kalimbubu*, dan *Puang Kalimbubu*, menjadi landasan ikatan sosial. Ketika dua orang Karo bertemu, mereka pertama-tama akan "ertutur" untuk menentukan hubungan kekerabatan mereka.

Meskipun garis merga diperoleh melalui ayah, orang Karo juga menanyakan "*beberenya*" saat bertutur. Ini menambah dimensi pada hubungan kekerabatan yang kemudian menjadi jelas setelah mengetahui merga dan bere. Tidak ada individu, baik dari dalam maupun luar suku Karo, yang tidak menjadi bagian dari *Rakut Si Telu* jika mereka memiliki ikatan perkawinan dengan suku Karo, baik langsung maupun tidak langsung. *Rakut Si Telu* ibarat tenaga penggerak masyarakat Karo, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsi tertentu (Tarigan, 1988:116-117).

Menariknya, peran dalam *Rakut Si Telu* tidak tetap dan bisa berubah tergantung situasi. Seseorang bisa menjadi *Kalimbubu*, *Senina*, atau *Anak Beru* dalam kesempatan yang berbeda. *Kalimbubu* berperan sebagai penasehat, pengawal, dan pemberi petunjuk dalam acara adat, sementara *Senina* sebagai pelaku utama, dan *Anak Beru* sebagai petugas lapangan. Sebagai pendukung konsep *Rakut Si Telu*, nilai-nilai seperti "*mehamat*," "*medes*," dan "*metami*" menjadi pedoman dalam hubungan sosial masyarakat Karo. "*Mehamat*" mengajarkan hormat kepada *Kalimbubu*, "*medes*" mengajarkan kesetaraan di antara *Senina*, dan "*metami*" mengajarkan penghargaan kepada *Anak Beru*. Runtung Sitepu dalam disertasinya mendukung nilai-nilai ini yang menjadi dasar hubungan dalam masyarakat Karo (Sitepu, 2002:172).

Menurut Singarimbun dalam bukunya "*Kinship, Descent and Alliance among the Karo Batak*," (1975: 97), semua orang yang memiliki hubungan genealogi atau perkawinan dengan orang Karo disebut "*kade'-kade'*" atau kerabat. Kategori kerabat agnatik disebut "*sembuyak*," sementara kerabat non-agnatik termasuk "*anak beru*" dan "*kalimbubu*," yang dibedakan berdasarkan hubungan kelahiran atau perkawinan.

Sistem kekerabatan ini menciptakan kehidupan masyarakat Karo yang tertib, damai, harmonis, dan terorganisir. Tidak ada orang Karo yang merasa terpinggirkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Garis keturunan patrilineal, yang ditandai dengan identitas *merga*, memastikan bahwa orang-orang dengan *merga* yang sama memiliki hubungan darah dan tidak boleh menikah satu sama lain.

Senioritas dalam masyarakat Karo penting baik dari segi usia maupun kekerabatan. Dalam keluarga, panggilan seperti *anak singma*, *anak sintengah*, dan *anak sinmuda* menunjukkan kedudukan. Fratur, yang mengatur hubungan kekerabatan berdasarkan *merga*, *beru*, dan *bere*, menentukan senioritas bukan hanya berdasarkan usia tetapi juga kedekatan silsilah. Sistem Tutar Siwaluh, yang mencakup delapan tutur dalam masyarakat Karo, mengatur peran dan tanggung jawab spesifik dalam menjaga hubungan sosial dan pelaksanaan adat. Setiap tutur memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam menjaga hubungan sosial dan pelaksanaan adat. Dengan sistem kekerabatan yang kompleks namun harmonis ini, masyarakat Karo berhasil menjaga keutuhan dan kelestarian budaya mereka di tengah perubahan zaman.

- **Kekuasaan dalam Konteks Gender**

Keturunan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Karo. Secara garis besar, masyarakat Karo menarik garis keturunan secara bilateral, dari bapak dan ibu. Namun, dalam konteks kekuasaan, masyarakat Karo cenderung patriarkhi. Perempuan secara tradisional tidak mempunyai hak waris dan dianggap sebagai pelengkap suami dalam istilah Karo disebut "*Sirukatmakan*" (penyendok nasi). Hal ini berarti bahwa perempuan memiliki peran pendukung dalam keluarga dan masyarakat, terutama dalam urusan rumah tangga.

Namun, kelompok kerabat dari pihak istri sangat dihormati, yaitu *kalimbubu* (pemberi anak gadis). Dalam pesta adat, *kalimbubu* dilayani oleh *anak beru*. Ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap pihak wanita meskipun secara kekuasaan cenderung patriarkhi. Peran *kalimbubu* sangat penting dalam berbagai upacara adat dan keputusan-keputusan penting,

menunjukkan bahwa meskipun secara struktural masyarakat Karo cenderung patriarkal, terdapat penghargaan dan penghormatan terhadap peran perempuan dalam konteks adat dan kekerabatan.

Lebih jauh, walaupun peran perempuan dalam aspek formal kekuasaan terbatas, mereka memiliki peran signifikan dalam menjaga dan meneruskan adat istiadat serta nilai-nilai budaya Karo. Perempuan sering kali berperan sebagai penjaga dan pengatur urusan domestik, serta memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan yang melibatkan rumah tangga dan upacara adat. Selain itu, perempuan Karo juga dikenal memiliki peran dalam aktivitas ekonomi, seperti perdagangan dan pertanian, yang menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan formal cenderung patriarkhi, kontribusi perempuan dalam aspek sosial dan ekonomi sangat dihargai.

Selain itu, perkembangan zaman dan pendidikan telah membuka peluang bagi perempuan Karo untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan Karo mulai mengambil peran dalam politik, pemerintahan, dan organisasi masyarakat. Mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya yang lebih luas, seperti pelestarian seni tradisional dan budaya Karo.

Peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender di kalangan masyarakat Karo juga berdampak pada perubahan pandangan terhadap peran perempuan. Perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi dalam mengubah pandangan tradisional ini, namun peran perempuan dalam masyarakat Karo terus berkembang dan diakui.

Dalam masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal seperti Karo, perkawinan eksogami adalah hal yang umum. Contohnya adalah perkawinan jujur yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara mempelai laki-laki dengan perempuan. Dalam perkawinan ini, pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk bergabung dalam klannya, memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota keluarga laki-laki. Penarikan ini disertai dengan pemberian jujur (*unjuken*) berupa barang-barang atau uang kepada keluarga perempuan, yang

menjadi syarat penting agar perkawinan dianggap sah secara adat.

Perkawinan di masyarakat Karo tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga atau klan, membentuk hubungan baru antara kalimbubu dan anak beru. Tujuan utama perkawinan dalam masyarakat Karo adalah memperluas hubungan kekeluargaan dan melanjutkan keturunan. Dalam upacara adat, pasangan pengantin selalu didoakan untuk memperoleh keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, yang dianggap penting dalam masyarakat Karo (Sitepu, 2002: 20).

Tahapan-tahapan dalam perkawinan adat Karo melibatkan berbagai proses musyawarah dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Tahapan ini dimulai dari *ngembah belo selemba*, *nganting manuk*, hari H pesta perkawinan, hingga *mukul*, yang semuanya mencerminkan pentingnya musyawarah dan konsensus dalam setiap langkahnya. Kehadiran dan persetujuan dari berbagai pihak, seperti *sukut*, *sembuyak*, *senina sikaku rana*, *kalimbubu*, dan *anak beru*, menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses ini (Tarigan, 2016: 34).

Dalam perkawinan jujur, terdapat tiga akibat hukum utama: pertama, istri bergabung dalam klan suaminya dan berada di bawah kontrol suaminya serta kerabat suaminya; kedua, semua anak yang lahir masuk ke dalam klan ayahnya dan ayah memiliki tanggung jawab penuh terhadap mereka; ketiga, semua harta pernikahan diatur berdasarkan prinsip kekerabatan yang dianut masyarakat Karo (Sitepu, 2002:34).

Dengan demikian, meskipun kekuasaan dalam konteks gender di masyarakat Karo cenderung patriarkhi, ada dinamika dan perubahan yang menunjukkan semakin meningkatnya pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem perkawinan dan kekerabatan yang kompleks ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam menjaga harmoni dan keberlangsungan hidup bermasyarakat.

Kesimpulan

Kalau bicara soal kekuasaan dalam masyarakat Karo, kita tidak bisa memakai pengertian kekuasaan seperti yang biasa dijelaskan di teori-teori politik barat. Dalam masyarakat Karo, kekuasaan tidak dijalankan oleh satu tokoh sentral atau pemimpin tunggal, tapi justru muncul dari relasi antar keluarga yang sudah diatur oleh adat. Yang jadi dasar bukan dominasi, tapi relasi. Segala sesuatu dijalankan bersama, lewat kesepakatan, dan posisi sosial seseorang tergantung dari kedudukan kekerabatannya.

Salah satu struktur yang penting adalah *daliken si telu*, yaitu hubungan antara *kalimbubu*, *senina*, dan *anak beru*. Tiga posisi ini sudah menentukan sejak awal siapa yang memegang peran apa dalam setiap peristiwa adat. *Kalimbubu* biasanya dihormati dan punya wewenang bicara lebih dulu, *anak beru* punya kewajiban melayani dan menyiapkan keperluan adat, sementara *senina* menjadi saudara yang mendampingi. Tapi tidak ada yang bisa jalan sendiri. Kalau satu pihak tidak hadir, maka adat tidak bisa dijalankan. Jadi kekuasaan di sini sifatnya saling mengikat dan tidak ada yang mutlak.

Kegiatan adat seperti perkawinan, kematian, atau pesta panen selalu dijalankan lewat musyawarah. Tempat untuk bermusyawarah disebut *runggu*. Di sana bukan cuma tetua adat yang bicara. Semua yang terlibat dalam relasi *daliken si telu* punya hak bicara. Kadang prosesnya bisa lama, karena harus tunggu kesepakatan. Tapi masyarakat sudah terbiasa dengan itu. Mereka tidak buru-buru mengambil keputusan. Yang penting semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Kekuasaan dalam masyarakat Karo juga tidak berdiri terpisah dari sistem *Merga Silima*, yaitu lima marga utama: Ginting, Karo-karo, Perangin-angin, Sembiring, dan Tarigan. Marga menentukan hubungan sosial dan adat. Seseorang tidak boleh menikah dengan yang semarga. Dan dari marga itu juga diketahui siapa yang jadi *kalimbubu* dan *anak beru*. Jadi kekuasaan muncul dari struktur relasi ini, bukan dari jabatan administratif seperti lurah atau kepala desa. Dalam praktiknya, laki-laki memang lebih sering tampil di depan, terutama dalam forum *runggu* atau ketika bicara soal keputusan adat. Tapi peran perempuan juga tidak kecil. Justru

dalam urusan persiapan pesta, ekonomi rumah tangga, dan hubungan antar keluarga, perempuan Karo banyak memegang kendali. Mereka yang mengatur belanja, logistik, bahkan juga jadi penghubung kalau ada konflik kecil antar keluarga. Perempuan memang tidak memimpin rumah, tapi mereka punya suara dalam keluarga. Dan dalam banyak kasus, keputusan di tingkat rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ibu. Meskipun masyarakat Karo secara struktur masih patriarkal, tapi peran perempuan di balik layar sangat menentukan. Bahkan dalam banyak acara adat, kalau tidak ada perempuan, acara bisa tidak jalan. Karena mereka yang tahu persis kapan harus masak, apa yang kurang, siapa yang harus diundang, dan sebagainya.

Perubahan zaman juga mulai menggeser peran ini. Banyak perempuan Karo sekarang sekolah tinggi, bekerja di luar, aktif di organisasi. Tidak sedikit yang sudah menjadi kepala desa, dosen, bahkan anggota legislatif. Pandangan masyarakat pun perlahan berubah. Perempuan mulai diberi ruang untuk bicara di forum publik, walau masih belum sepenuhnya setara. Tapi proses ke arah itu sedang berjalan. Jadi kalau kita melihat kekuasaan dalam masyarakat Karo, kita harus melihatnya sebagai bagian dari adat dan relasi sosial. Bukan soal siapa paling berkuasa, tapi bagaimana relasi antara kalimbubu, senina, dan anak beru dijaga. Kekuasaan di sini muncul dari kesepahaman, bukan dari dominasi. Dan meskipun perempuan tidak selalu tampil di depan, mereka tetap punya peran yang kuat dalam menjaga keberlangsungan adat dan kehidupan sosial.

Referensi

- Bangun, T., 1986. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Bangun, R. 1989. *Mengenal Orang karo*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Bangun.
- Bangun, T., & Chairuddin, H. 1994. *Kilap Sumagan: Biografi Selamat Ginting*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Beratha, I.N., 1982. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Etzioni, A., 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: UI Press.

- Evers, H-D. & Schiel, T., 1992. *Kelompok Strategis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ginting, M., 1988. *Ada Apa di Tanah Karo*. Medan: USU Press.
- Hati, L.P., 1991. *Sejarah Pemerintahan Desa di Kabupaten Karo*. Skripsi Sarjana Sastra, Medan: Fakultas Sastra USU.
- Putro, B., 1979. *Karo dari Zaman ke Zaman*. Medan: Ulih Saber.
- Putro, B. 1981. *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*. Medan: Ulih Sabar.
- Reid, A. 1987. *Perjuangan Rakyat dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Seaton, L.S. & Classen, H.J.M., 1979. *Political Anthropology*. New York: Mountain Publishers.
- Sinar, T. L. 1995. *Perang Sunggal (1872-1895)*.
- Sinar, T. L. 1995. "Wilayah Dusun Karo Jahe di Hulu Deli, Langkat, dan Serdang dalam Lintasan sebelum Masa Kemerdekaan", *Makalah*, dalam Kongres Kebudayaan Karo, Berastagi.
- Singarimbun, M. 1975. *Kinship, Descent, and Alliance among the Karo Batak*. California: University of California Press.
- Sinuhaji, W. 2004. *Aktivitas Ekonomi dan Entrepreneurship Masyarakat Karo Pasca Revolusi*. Medan: USU Press.
- Sitepu, R. 2002. *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Berastagi*. Disertasi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tamboen, P., 1952. *Adat Istiadat Karo*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Tarigan, H.G. 1988. *Percikan Budaya Karo*. Jakarta: Yayasan Merga Silima.
- Tarigan, Sarjani. 2016. *Mengenal Rasa, Karsa, dan Karya Kebudayaan Karo*, Medan: Balai Adat Budaya Karo Indonesia.
- Weber, M., 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.

Bagian IX

Kebudayaan Musikal Masyarakat Karo

Yoe Anto Ginting¹, Hubari Gulo¹

¹Program Studi Etnomusikologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Suku Karo adalah salah satu etnis yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Bagi masyarakat Karo, musik berperan penting dalam keberlangsungan hidup komunal, karena musik berkaitan erat dengan berbagai konteks upacara, baik upacara ritual adat, upacara keagamaan dan upacara hiburan. Masyarakat Karo mengenal dua jenis ensambel musik tradisional yakni ensambel *gendang sarune* dan ensambel *gendang telu sendalenen*. Demikian juga terdapat alat musik solo (tunggal), dan musik vokal dalam kebudayaan musikalnya. Setelah tahun 2000-an perkembangan penggunaan alat musik dalam masyarakat Karo mengalami perubahan, yang awalnya hanya menggunakan alat musik tradisional berubah menjadi alat musik *kibod* (*keyboard*), yang biasa disebut *kibod* Karo. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan alat musik tradisional pada masyarakat Karo serta bagaimana perkembangan kebudayaan musikalnya hingga saat ini.

Pendahuluan

Suku Karo adalah salah satu etnis yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Bagi masyarakat Karo, musik berperan penting dalam keberlangsungan hidup komunal, karena musik berkaitan erat dengan berbagai konteks upacara, baik upacara ritual adat, upacara keagamaan dan upacara hiburan. Alat musik yang digunakan untuk kegiatan upacara tidaklah selalu sama, melainkan digunakan sesuai konteks upacara yang dilaksanakan.

Secara administratif suku Karo memiliki wilayah dan pemerintahan tersendiri yang disebut sebagai Kabupaten Karo. Sarjani Tarigan (2018:4) menyatakan bentuk dataran tinggi Kabupaten Karo menyerupai sebuah kuali yang sangat besar karena dikelilingi oleh pegunungan dengan ketinggian 140-1400 meter di atas permukaan laut, terhampar di bukit barisan serta terletak pada koordinat $2^{\circ}50^0$ L.U, $3^{\circ}19^0$ LS, $97^{\circ} 55^098^038^0$ B.T diantara gunung- gunung yang ada di Kabupaten Karo. Di sebelah utara adalah gunung Barus, Pinto, Sibayak, Simole, dan Sinabung, di sebelah selatan terdapat gunung Sibuatan.

Sering terjadi kekeliruan dalam percakapan sehari-hari, seperti Tanah Karo diidentikkan dengan Kabupaten Karo. Padahal Tanah Karo tidak hanya sebatas Kabupaten Karo saja, dalam Prinst, (2021:12) menyatakan bahwa Tanah Karo meliputi Kabupaten Karo, Sebagian Kabupaten Dairi, sebagian Kabupaten Deli Serdang, sebagian Aceh tenggara, Kotamadya Medan dan beberapa wilayah di Kabupaten Langkat. Gambaran tentang daerah domisili masyarakat Karo dapat pula dilihat seperti apa yang digambarkan oleh J.H. Neuman dalam buku Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisasi (Sarjani Tarigan, 2009 : 36), yaitu: sebelah timur suku Karo mendiami wilayah yang berbatasan dengan pinggir jalan yang memisahkan dataran tinggi dari Serdang. *Lau Biang* (sungai wampu) membatasi wilayah Karo bagian selatan, serta di sebelah Barat wilayah Karo dibatasi oleh gunung Sinabung dan di sebelah Utara wilayah itu meluas sampai ke dataran rendah Deli dan Serdang.

Telah dikenal bahwa hampir semua bunyi-bunyian atau musik tradisional Indonesia hingga kini masih digunakan sebagai sarana upacara agama maupun upacara adat budaya. Musik tradisional Karo juga demikian, selalu berkaitan dengan upacara ritual yang dilaksanakan di dalam masyarakat pendukungnya secara fungsional. Bunyi-bunyian dalam upacara agama dan budaya di Indonesia menunjuk kepada segala bunyi-bunyian vocal dan instrumental yang disajikan dalam rangkaian upacara keagamaan maupun acara adat budaya di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Masyarakat Karo mengenal dua ensambel musik, musik solo instrument serta musik vocal. Ensambel musik

Karo adalah *gendang sarune* yang alat musiknya terdiri dari *sarune* (pembawa melodi), *gendang singanaki* (pembawa ritmis yg tetap), *gendang singindungi* (pembawa variasi ritmis), *gung* (pengatur tempo) dan *penganak* (gung kecil); sedangkan ensambel *gendang telu sendalenen* alat musiknya terdiri dari *kulcapi* atau *balobat* sebagai pembawa melodi, *keteng-keteng* (pembawa ritmis), serta *mangkuk meciho* (mangkuk putih) sebagai *pengatur* tempo. Instrument solo adalah alat musik yang dipergunakan secara tunggal, salah satunya adalah *surdam*, *murbab*, *pingko-pingko*. Sedangkan musik vocal diantaranya: *Didong-doah*, *Katoneng-katoneng*, *Io-io*, dan lain sebagainya.

Pembahasan

a. Ensambel Gendang sarune

Gendang sarune atau *gendang lima sendalenen* merupakan satu bentuk ensambel musik tradisional yang utama di masyarakat Karo. Ensambel musik ini terdiri dari satu buah *sarune* (sejenis alat tiup berlidah ganda; dua buah gendang kecil berkulit muka dua sisi, yakni *gendang singindung* (kadang-kadang disebut juga dengan nama *gendang indung*) dan *gendang singanaki* (kadang-kadang disebut juga *gendang anak*); dan dua buah gong, satu buah *gung* (jenis gong pencu yang berukuran besar) dan satu buah *penganak* (jenis gong pencu kecil).

Gendang sarune, sebagaimana lazimnya istilah yang dipakai sehari-hari untuk menyebut jenis ensambel ini, juga memiliki sebutan yang lebih bermakna filosofis, yaitu „*telu sendalenen silima sada perarih*.— Sebutan ini pada dasarnya terbagi atas dua bagian konteks pemaknaan istilah: pertama, *telu sendalenen*; dan kedua *silima sada perarih*. Pengertian *telu sendalenen* (harfiah: „tiga yang sejalan—) bertolak dari kebiasaan para pemusik bahwa dahulu kala yang selalu beriringan dalam perjalanan untuk memenuhi undangan sebuah pesta atau upacara adalah seorang *panarunei* (pemusik *sarune*) dan dua orang *penggual* gendang (*penggual singindungi* dan *singanaki*). Peran ke tiga pemusik ini sangat penting, tidak hanya berkaitan dengan

kemampuan yang harus mereka kuasai akan tetapi juga terkait dengan perolehan material sebagai bekal perjalanan dan jerih payah selama bermain musik. Dengan kata lain, pengertian dari *telu sendalanan* menggambarkan perjalanan ke tiga orang pemusik--*panarunei*, *penggual singindungi* dan *penggual singanaki*—yang selalu bepergian secara bersama dari satu tempat ke tempat lain untuk bermain musik di suatu upacara tertentu.

Pengertian dari *silima sada perarih* (harfiah: „lima dalam sebuah kesatuan—) diambil dari gabungan ke tiga *penggual* (*panarunei*, *penggual singindungi* dan *penggual singanaki*) dengan dua pemusik lainnya, yaitu satu orang yang memainkan *gung* (*simalu gung*) dan seorang lainnya memainkan *penganak* (*simalu panganak*). Dalam kebiasaan masyarakat Karo pada zaman dahulu, setiap melaksanakan *kerja* (upacara besar yang bersifat komunal) yang melibatkan ensambel *gendang sarune*, pihak keluarga pelaksana acara biasanya menyediakan dua orang pemusik untuk memainkan *gung* dan *penganak*. Kedua orang yang mendapat peran tersebut umumnya diwakili oleh pihak *anak beru* dari kelompok *merga* yang melaksanakan acara. Dari dua bentuk gambaran filosofis di atas lahirlah istilah „*telu sendalanan silima sada perarih*— untuk menyebutkan konsep ensambel musik *gendang sarune*.

Formasi pertunjukan ensambel *gendang sarune* umumnya terdiri dari lima orang pemain musik: satu orang memainkan alat musik *sarune*; satu orang memainkan *gendang singindungi*; satu orang memainkan *gendang singanaki*; satu orang memainkan *gung*, dan satu orang lainnya memainkan *penganak*. Namun format pertunjukan seperti ini cukup jarang dijumpai lagi pada saat ini khususnya peran untuk pemusik yang memainkan alat musik *gung* dan *penganak*. Pada masa ini sering dijumpai kedua alat musik *gung* dan *penganak* umumnya hanya dimainkan oleh satu orang saja.

b. Sarune

Sarune merupakan alat musik tiup yang memiliki lidah ganda (*double reed*), dan tabung alat musik ini berbentuk konis (*conical*) mirip dengan alat musik obo (*oboe*). Instrumen ini terdiri dari lima bagian alat yang dapat dipisah-pisahkan serta terbuat dari bahan yang berbeda pula yaitu: (a) *anak-anak sarune*, (b) *tongkeh*, (c) *ampang-ampang*, (d) *batang sarune*, dan (e) *gundal*. *Anak-anak sarune* berfungsi sebagai lidah (*reeds*), terbuat dari dua helai kecil daun kelapa yang telah dikeringkan. Biasanya ketika hendak memainkan *sarune*, *anak-anak sarune* tersebut harus dibasahi terlebih dahulu dengan air liur agar menjadi lunak sehingga mudah bergetar jika ditiup.



Gambar 1 : Sarune Karo

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

Ampang-ampang yaitu sebuah lempengan berbentuk bundar yang terbuat dari kulit binatang *Baning* (*trenggiling*) diletakkan di tengah *tongkeh* (terbuat dari timah). *Ampang - amping* berfungsi sebagai penahan bibir pemain *sarune* ketika sedang meniup alat tersebut. *Batang sarune* sendiri terbuat dari *kayu selantam* atau pohon nangka, pada *batang sarune* inilah terdapat lobang-lobang nada berjumlah delapan buah sebagai penghasil atau pengubah nada ketika *sarune* ditiup. *Gundal* juga terbuat dari *kayu selantam* yang berada pada bagian bawah *sarune*. *Gundal* ini merupakan *corong* (*bell*) pada alat tiup *sarune* yang fungsinya membuat lantunan nada-nada menjadi lebih panjang dan nyaring atau keras. Perlu

ditambahkan, *ampang-ampang*, *anak-anak sarune*, dan *tongkeh* biasanya dihubungkan satu sama lain dengan seutas tali berukuran kecil, yang berfungsi sebagai pengikat agar bagian-bagian tersebut tidak tercecer, terpisah atau hilang karena ukurannya yang kecil.

c. Gendang Singindungi dan Gendang Singanaki

Kedua alat musik tersebut memiliki kesamaan dari sisi bahan, bentuk, ukuran, dan cara pembuatannya. Perbedaannya hanya pada "*gendang mini*" yang disebut *gerantung* (panjang 11,5 cm) yang diikatkan di sisi badan *gendang singanaki*, sedangkan pada *gendang singindungi* tidak ada. *Gendang singindungi* dapat menghasikan bunyi naik turun melalui teknik permainan tertentu, sedangkan *gendang singanaki* tidak memiliki tehnik tersebut sehingga bunyi yang dihasilkannya tidak bisa naik turun. Masing-masing gendang memiliki *dua palu-palu gendang* atau alat pukul (*drum stick*) sepanjang 14 cm.



Gambar 2: *Gendang Singindungi* dan *Gendang Singanaki*

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

d. *Gung* dan *Penganak*

Gung dan *penganak* adalah alat musik sejenis gong berpencu yang keduanya memiliki ukuran yang sangat kontras. Ukuran diameter dari *gung* berkisar antara 64-65 cm dengan diameter pencu berkisar 15cm dan memiliki tebal 10 cm. Sedangkan *penganak* berdiameter berkisar 14-15 cm dengan diameter pencu berkisar 4 cm dan tebal 2,8 cm. Bahan alat musik *gung* umumnya terbuat dari plat besi

sedangkan *penganak* terbuat dari kuningan.

Letak alat musik *gung* biasanya digantung dengan memakai tali, sementara *penganak* langsung dipegang tergantung ditangan pemainnya. Pada masa sekarang ini *gung* dan *penganak* umumnya telah digantungkan pada sebuah rak dimana pemainnya biasanya duduk berhadapan dengan alat musiknya. Pada saat ini *gung* dan *penganak* sering hanya dimainkan oleh satu orang saja dimana pada zaman dahulunya kedua alat musik ini dimainkan oleh masing-masing satu orang. Stik pemukul *gung* dan *penganak* terbuat dari kayu dimana permukaan ujung stik yang dipukulkan dilapisi dengan karet ban.



Gambar 3: *Gung* (kanan) dan *Penganak* (kiri)

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

Gendang Telu Sendalanan

Ensambel *gendang telu sendalanan* terdiri dari tiga buah jenis instrumen, yaitu *balobat*, *keteng-keteng* dan *mangkuk meciho*. Penggunaan *kulcapi* sebagai pengganti melodi *balobat* pada ensambel *telu sendalanan* untuk waktunya tidak diketahui secara pasti, namun menurut penuturan Surensen Tarigan *kulcapi* sudah digunakan dalam ensambel gendang telu sendalanan sebelum tahun 1990-an. Penggunaan *kulcapi* tersebut dilakukan untuk upacara *erpangir kulau* oleh alm. Tukang Ginting.

a. Balobat

Balobat adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Lobang nada pada *balobat* terdiri dari enam lobang nada, dua lobang nada berukuran besar dan empat lobang lainnya berukuran lebih kecil daripada dua lobang nada. Klasifikasi alat musik tersebut adalah aerofon, karena penggetar utama bunyinya berasal dari udara. *balobat* dalam ensambel *gendang telu sendalanan* berperan sebagai pembawa melodi saat memainkan repertoar-repertoar saat upacara dilaksanakan. Peran *balobat* pada ensambel *gendang telu sendalanan* adalah sebagai pembawa melodi. Karena pada ensambel *gendang telu sendalanan* terdapat dua instrumen melodis, yaitu *kulcapi* dan *balobat*, maka penggunaan kedua instrumen dalam memainkan repertoar secara bergantian.



Gambar 4: Balobat Karo

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

b. Kulcapi

Kulcapi adalah sebuah alat musik petik yang berasal dari suku Karo. Alat musik ini pada awalnya digunakan pada *ensambel telu sendalanan* dan juga secara solo instrumen, dengan membawakan *turi-turin* (cerita rakyat yang dibuat menjadi sebuah lagu) dan disajikan di *kede kopi* (warung kopi) ataupun *jambur* (tempat berkumpulnya masyarakat desa). Menurut penuturan Sorensen Tarigan, *turi-turin* tersebut biasanya disajikan dalam komunitas kecil yang terdiri dari 5 sampai 20 orang ataupun hanya kepada kerabat dekat saja. *Kulcapi* dalam ensambel *gendang telu sendalanan* berperan sebagai pembawa melodi untuk kegiatan upacara *erpangir kulau*. Seiring perkembangan zaman dan masuknya alat musik *kibod* serta dikolaborasikan

dengan *kulcapi* dalam kebudayaan musikal Karo, membuat penggunaan *kulcapi* mengalami perubahan pada upacara yang di iringinya. Upacara yang sudah diiringi menggunakan *kulcapi* setelah bergabungnya dengan alat musik *kibod* adalah upacara pernikahan (*nereh-empo*), upacara *gendang guro-guro aron* dan upacara adat *mengket rumah* (memasuki rumah baru).



Gambar 5: *Kulcapi* Karo

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

c. Keteng-keteng

Keteng-keteng adalah alat musik sejenis idio-kordofon yang terbuat dari bambu. Alat ini terbuat dari satu ruas bambu yang cukup besar. Dawai dari alat ini dibuat dari badan alatnya sendiri. Alat musik ini dimainkan dengan memakai stik pemukul. Secara musikal fungsi alat musik *keteng-keteng* dapat menggantikan atau disejajarkan dengan fungsi *gung*, *penganak* dan *gendang* pada ensambel *gendang sarune*.



Gambar 6: Keteng-keteng

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

d. Mangkuk Meciho

Mangkuk Meciho atau biasa disebut mangkuk adalah alat musik yang pada dasarnya merupakan mangkuk biasa yang sering dipakai sebagai alat musik dalam ensambel gendang *kulcapi* dan gendang *balobat*. Mangkuk yang sering dipakai adalah sejenis mangkuk dari porselen yang berwarna putih.



Gambar 7: Mangkuk Meciho

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

Alat Musik Tunggal dalam Masyarakat Karo

a. Surdam

Surdam adalah suatu alat musik tiup dari kebudayaan musik karo yang terbuat dari seruas bambu, bambu yang digunakan untuk membuat surdam adalah *bambu kerapat*. Surdam Karo ada tiga jenis yakni; *surdam puntung*, *surdam rumamis* dan *surdam tangko kuda*.

1. *Surdam puntung* adalah surdam yang memiliki enam buah lobang nada dan ukuran *surdam* ini lebih besar dari ukuran *belobat*. *Surdam* ini biasanya dipakai oleh *permakan* (pengembala) dipadang rumput waktu mengembalakan ternaknya.
2. *Surdam rumamis* juga sama dengan *surdam puntung* yaitu terbuat dari bambu, hanya memiliki perbedaan pada posisi/letak lobang nadanya. Lobang nada *surdam rumamis* terdiri dari enam buah yaitu empat buah ditengah dan dua buah sebelah bawah dengan ukuran satu besar dan satu kecil. *Surdam* ini biasa dipergunakan untuk lagu- lagu sedih (*lagu tangis-tangis*).

3. *Surdam belin (surdam tangko kuda)*, *surdam belin* ini juga bahannya dari bambu hanya saja panjangnya jauh lebih panjang dibanding *surdam puntung* dan *surdam rumamis*. Lobang nada *surdam* ini ada enam buah, yaitu dua disebelah atas, tiga dibagian tengah dan satu dibagian bawah. Cara memainkan *surdam* ini memiliki sedikit perbedaan dari *surdam-surdam* sebelumnya. *Surdam* ini cara memainkannya dengan meniup lobang tiupan dibagian atas dan menutup lima lobang nada dengan jari tangan dan lobang satu lagi ditutup dengan induk jari.



Gambar 8: Surdam Puntung

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

b. *Murbab*

Murbab adalah alat musik tradisional Suku Karo dari Sumatera Utara yang termasuk alat musik dalam kategori instrumen berdawai dan satu-satunya alat musik Karo yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik *murbab* dapat dimainkan secara solo dan juga ansambel sebagai melodi dan keberadaanya sampai saat ini sudah jarang ditemukan pada masyarakat Karo. *Murbab* terbuat dari kayu, tempurung kelapa, serat daun nenas dan bow penggeseknya terbuat dari rambut ekor kuda. Sebagai catatan, alat musik *murbab* ini sudah tidak ditemukan lagi pada masyarakat Karo (sudah punah)

c. *Balobat Pingko-pingko*

Belobat pingko-pingko terbuat dari bambu yang berukuran kecil, lobang nada *belobat pingko-pingko* ini sebanyak enam buah, lima buah ditengah dan satu buah

dibawah. *Belobat pingko-pingko* ini adalah alat musik tiup yang memiliki *timbre* (warna suara) yang berbeda dengan balobat gendek. Belobat pingko-pingko memiliki timbre bunyi yang melengking. *Belobat* ini biasanya dipakai oleh pengembala sapi dipadang rumput.



Gambar 9: Pingko-pingko

Dok.: Hubari Gulo & Yoe Anto Ginting

Penggabungan Alat musik tradisional dengan Kibod karo

Alat musik keyboard merupakan alat musik tergolong elektrofon, alat musik yang menggunakan listrik dalam menghasilkan bunyi. Masyarakat karo menyebut alat musik keyboard dengan istilah *Kibod*, alat musik keyboard yang digunakan adalah bermerek Technic type KN. Masuknya alat musik keyboard ke dalam kebudayaan musical masyarakat Karo tentunya melalui proses secara bertahap.

Pada tahun 1970-an, *kulcapi* pertama kali digabungkan dengan *gendang lima sendalanen* pada acara *gendang guro-guro aron*. *Kulcapi* dan *sarune* digunakan sebagai pembawa melodi utama yang dimainkan secara bergantian. Pada saat itu penggabungan ini dilakukan oleh Alm. Djasa Tarigan sebagai pemain *kulcapi*. Perikuten Tarigan (2003:50) menyatakan pada tahun 1990- an *kulcapi* dipakai untuk menambah melodi pada lagu-lagu yang dibawakan *sarune*, sedangkan *kibod* digunakan untuk menambah variasi dari ritem atau bunyi perkusi tambahan untuk memeriahkan suasana. Alat musik *kibod* pada saat itu masih memakai merk Yamaha type PSS dan PSR hingga kemudian pada tahun 2000-an dipakai *kibod* merk Technics type KN 2000 dan sekarang KN 2600. Penggabungan ini juga awalnya

digunakan oleh Alm. Djasa Tarigan dan awalnya mendapat respon positif oleh masyarakat Karo sehingga pada saat itu pekerjaan Djasa Tarigan bermain kulcapi untuk mengiringi hiburan *gendang guro – guro aron* masyarakat Karo.

Kibod KN 2000 dan KN 2600 yang sudah di program menyerupai bunyi alat musik Karo kemudian disebut sebagai gendang *kibod*. Gendang dalam hal ini diterangkan ke sebuah ensambel, penggunaan *kibod* semakin marak digunakan di *gendang guro-guro aron*, tetapi di upacara pernikahan, upacara pemakaman dan upacara ritual lainnya, penggunaan *kibod* dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an penggunaan alat musik karo sudah semakin jarang digunakan, tetapi pada tahun 2005-an penggunaan kulcapi sudah mulai semakin populer digabungkan dengan *kibod* Karo. Menurut penuturan Jhon Hadir Purba, perkulcapi pada saat itu hanya ada dua orang yang mengiringi *guro-guro aron* dengan mengkolaborasikan *kibod* dan *Kulcapi*. Kedua *perkulcapi* tersebut adalah Alm. Djasa Tarigan dan Jhon Hadir Purba. Penggunaan *kulcapi* dengan *kibod* semakin populer dan menghasilkan beberapa *perkulcapi* muda sehingga menyebabkan perkembangan fungsinya juga. Pada awalnya *kulcapi* dan *kibod* hanya digunakan di upacara *gendang guro-guro aron*, tetapi sekarang penggabungan kedua instrumen tersebut sudah digunakan untuk mengiringi upacara pernikahan, memasuki rumah baru, dan kebaktian di gereja.

Kesimpulan

- a. Dalam kebudayaan instrument musical masyarakat Karo, mengenal istilah ensambel dan solo instrument atau alat musik yang digunakan secara tunggal. Ansambel musik Karo terdiri dari Ansambel *Gendang Sarune atau Gendang lima sendalanen* dan Ansambel *Gendang Telu Sendalanen* atau disebut juga dengan *Gendang Kulcapi* atau *Gendang Balobat*, Ansambel *Gendang Sarune* adalah gabungan alat musik yang terdiri dari *sarune gendang singindungi*, *gendang singanaki gung*, dan

penganak.

- b. Ansambel *Gendang telu sendalanen* adalah gabungan alat musik yang terdiri dari *kulcapi*, *balobat*, *keteng-keteng* serta *mangkuk meciho*.
- c. Instrument solo atau alat musik tunggal dalam masyarakat Karo terdiri dari *surdan*, *murbab* dan *belobat pingko-pingko*.
- d. Masyarakat Karo memiliki hubungan erat antara upacara adat dengan musik. Ensambel yang mengiringi upacara dalam masyarakat karo ada dua, yakni *gendang sarune* dan *gendang telu sendalanen*. Pada tahun 1990-2000, adanya perubahan dalam kebudayaan musikal masyarakat Karo, Alm. Djasa Tarigan melakukan inovasi dalam ensambel musik Karo dengan menambah alat musik *kibod* ke dalam alat musik pengiring upacara.

Referensi

- Tarigan, Sarjani. 2008. *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisasi*. Balai Adat Karo Indonesia.
- Ginting, Adi Suranta. 2016. *Kajian Organologis Balobat Buatan Bapak Ropong Tarigan Sibero di Berastagi*. Skripsi Sarjana Etnomusikologi, USU.
- Sembiring, Riko. 2016. *Studi Deskriptif Teknik Permainan Kulcapi Karo*. Skripsi Sarjana Etnomusikologi, USU.
- Barus, Eridianto. 2019. *Deskripsi Pembuatan dan Teknik Permainan Belobat Pingko-Pingko oleh Bapak Simpei Sinulingga di desa Lingga*. Skripsi Sarjana Etnomusikologi, USU.
- Sitepu, Rano. 2016. *Studi Organologi Keteng-Keteng Pada Masyarakat Karo Buatan Bapak Bangun Tarigan*. Skripsi Sarjana Etnomusikologi, USU.
- Gurusinga, Ardy Brena Gurusinga. 2017. *Analisis Musikal dan Tekstual Perkulcapi dalam Turin-turin Perkabang Nggurisa pada masyarakat Karo*. Skripsi Sarjana Etnomusikologi, USU.

Biografi Singkat Editor



Junita Setiana Ginting, merupakan seorang Dosen dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Lulus Sarjana Sejarah di Departemen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara dan Magister Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan.

Telah menghasilkan beberapa karya tulis dalam bentuk buku dan artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional. Beberapa kali menjadi narasumber di media televisi, surat kabar, serta pertemuan ilmiah. Selain itu, aktif di kegiatan Tridharma perguruan tinggi, juga mengikuti beberapa kegiatan sosial di luar kampus, salah satunya tergabung sebagai anggota Karo Foundation, Ketua Harian WANITA KARO INDONESIA (WKI), serta Bendahara Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Sumatera Utara.



Muhammad Rasyidin, merupakan seorang tenaga pengajar di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Beliau meraih gelar Master of Arts dari Program Studi S2 Ilmu Sejarah FIB USU. Beliau juga aktif dalam pertemuan ilmiah.

Biografi Singkat Penulis

Erond L. Damanik, pada 2016 menyelesaikan doktor Ilmu Sosial (S3) di Universitas Airlangga, Surabaya dan saat ini merupakan seorang Guru Besar pada politik lokal dan etnisitas. Erond L Damanik merupakan Wakil Rektor Universitas Negeri Medan dalam Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat. Selain itu juga aktif sebagai Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Asosiasi Museum Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Kurator Museum Perkebunan Indonesia dan Honorary member of the SSEASR, Bangkok, Thailand.

Mokhtar Saidin, Telah terlibat dalam bidang arkeologi di Universiti Sains Malaysia sejak tahun 1987. Pada tahun 1993, Prof. Dato' Dr. Mokhtar Saidin memperoleh gelar Magister Arkeologi (MA) dari Universiti Sains Malaysia (USM). Ia kemudian meraih gelar PhD (Arkeologi) pada tahun 1998 dari USM dan mengikuti program kursus khusus di Harvard University, Amerika Serikat, setelah menyelesaikan gelar MA-nya. Ia memulai karirnya sebagai Peneliti pada tahun 1987 dan bekerja hingga tahun 1990. Ia kemudian bekerja sebagai Asisten Pascasarjana dari tahun 1991 hingga 1992 untuk Proyek Arkeologi Malaysia, USM. Dari tahun 1993 hingga 1994, ia kembali bekerja sebagai Peneliti. Hingga saat ini, ia masih aktif dalam sejumlah penelitian yang bekerjasama dengan UNESCO.

Suprayitno, Pada tahun 2010 menyelesaikan Pendidikan doktor dalam bidang arkeologi sejarah di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia. Aktif sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cab.Sumut.2015-2026, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara 2019-Sekarang, Anggota Dewan Rempah Indonesia Sumatera Utara 2021-2026, dan Ketua Tim Penilai Benda Cagar Budaya Provinsi Aceh Tahun 2025. Adapun beberapa karya tulis terakhir seperti *Unveiling the Past: Archaeological and Historical Analysis of Batu Aceh Gravestones and the Kingdom of Aru in*

Kelambir Lima, North Sumatra. Eminak, NO.1(49) 2025. Journal Terindexs Scopus Q1.

Julianus Limbeng, menyelesaikan Pendidikan doktor (S3) dibidang Antropologi di universitas Indonesia dan juga mendapat pendidikan tambahan di bidang Perekaman Musik Tradisional untuk Radio Siaran, dieselenggarakan oleh Ford Foundation, Radio Fancis Internasional (RFI) dan Radio Suara Surabaya dan Indonesia-Australia Special Traning Project bidang Intellectual Property Rights, Dep. Kehakiman dan Ausaid, Australia.

Martin L Peranginangin, pemerhati budaya Karo. Menyelesaikan study Manajemen USU tahun 1995 dan Magister Management diselesaikan di Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (2021). Beberapa tulisan dimuat di Majalah GBKP Maranatha, menulis buku Orang Karo di antara Orang Batak (2004). Masih aktif menjadi Pertua di Gereja Batak Karo Protestan beberapa periode sejak 2004. Dan kini berdomisili di Kab. Bogor.

Junita Setiana Ginting, Dosen Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Beliau menghasilkan beberapa karya tulis berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan kebudayaan. Beliau juga aktif pada penelitian dan pengabdian yang berfokus pada bidang kebudayaan.

Edi Sumarno, merupakan seorang Dosen Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan pendidikan Magisternya di Jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada pada tahun 1998 dan menyelesaikan Pendidikan doktor (S3) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2024. Beliau aktif dalam kegiatan Tri Dharma yang berfokus kepada Sejarah Perkebunan dan Sejarah Kota.

M Azis Rizky Lubis, merupakan salah satu Dosen pada Prodi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Studi S2 Ilmu Sejarah Univeristas Sumatera Utara. Selain aktif sebagai

dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi beliau juga berperan aktif dalam bidang Cagar Budaya, kegiatan komunitas, serta juga aktif sebagai narasumber dalam kegiatan ilmiah dan media online maupun televisi. Ia memiliki fokus keilmuan pada sejarah politik, sejarah ekonomi, serta etnohistori.

Peninna Simanjuntak, adalah lulusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara dan Magister Filologi Universitas Padjajaran. Beliau merupakan salah seorang Dosen pada Program Studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan memiliki fokus keilmuan pada Sejarah Pedesaan, Sejarah Ekonomi, serta Sejarah Kesehatan.

Ernalem Bangun, merupakan seorang dosen di Program Studi Strategi Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI, selain itu juga mengajar di Susjemen Litbang. Menyelesaikan studi doktor dibidang Antropologi di Universitas Indonesia.

Lila Pelita Hati, merupakan seorang dosen dan juga Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada jenjang S2 di Fakultas Pascasarjana Program Studi Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan pada tahun 2007. Penghargaan yang diraih beliau adalah Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.

Lestari Dara Cinta Utami Ginting, merupakan seorang Dosen Prodi S1 Ilmu Sejarah yang menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018. Tesisnya berjudul "Hubungan Negara dan Agama: Kajian Awal Kepercayaan Pemena di Karo, Sumatera Utara Pada 1966-1979" yang dibimbing oleh Prof. Dr. Budi Agustono, M.S. Sebelumnya, Dara telah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Sejarah di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013. Skripsinya berjudul "Sugondo Kartoprodjo: Pendidik dan Pejuang

Kemerdekaan di Sumatera Utara" yang dibimbing oleh Dr. Suprayitno, M. Hum.

Liandra Khairunnisa, adalah dosen pada program studi Psikologi Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dien Medan. Tahun 2016 menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Sumatera Utara. Tahun 2021 menyelesaikan pendidikan S2 Magister Psikologi Profesi dari Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Tahun 2024 memulai karir di Fakultas Bisnis dan Humaniora program studi S1 Psikologi Universitas Tjut Nyak Dien. Penulis juga merupakan founder dari media konseling online The Clavis Counseling sejak tahun 2022 dan bagian dari tim konsultasi pendidikan Daun Kaktus Cendikia.

Yoe Anto Ginting, Dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Etnomusikologi sejak tahun 2003 sampai sekarang. Beberapa kali menjadi narasumber pada acara Seni Budaya Karo di TVRI Medan, sekaligus menampilkan Musik dan Tari Tradisional Karo. Pada kurun waktu 2003-2004 beberapa kali ikut tur kesenian Sumatera Utara ke Eropah Barat (Belanda, Jerman, dan Prancis). Pada tahun 2007 mengikuti program UEM (United Evangelical Mission) ke Tanzania dan Zanzibar membawa musik dan tari Batak. Hasil Penelitian yang sudah dicetak dalam bentuk : buku *Menenun Asa Uis Karo dan Eksistensinya*, 2022. (ISBN 978-623-449-127-2). (Sebagai Penulis kedua) dan buku *Hoho Faluaya Tradisi Lisan Masyarakat Nias: Analisis Teks Dan Struktur Musik*, 2025 (ISBN 978-623-6149-23-2) (Sebagai Penulis kedua).

Hubari Gulo, Saat ini mengajar, sekaligus Sekretaris Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. November 2001 pernah ikut dalam tim kesenian Universitas Sumatera Utara sebagai pemusik dan penari tradisi pada acara Hari Ulang Tahun Jinan University Guangzhou Cina. Pada tahun 2013-2019 oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Kepercayaan Terhadap TYME dan Tradisi mendapat tugas sebagai Tim Verifikator program Fasilitasi

Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) dan Revitalisasi Desa Adat (RDA). Aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mengikuti seminar nasional dan internasional, menulis artikel di jurnal, dan saat ini sedang proses membuat buku tradisi lisan Nias yakni Hoho Faluaya.